



UNIVERSITAS INDONESIA

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN *BLOCK GRANT MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT* (MEDP). (STUDI KASUS DI DUA MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR)

TESIS

**Lilis Harlisa Musa
1006797010**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN *BLOCK GRANT MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT* (MEDP). (STUDI KASUS DI DUA MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

**Lilis Harlisa Musa
1006797010**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMINATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DEPOK
JUNI 2012**

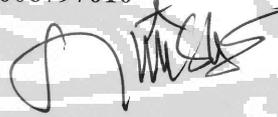
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lilis Harlisa Musa

NPM : 1006797010

Tanda Tangan :



Tanggal : Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : LILIS HARLISA MUSA
NPM : 1006797010
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Peminatan : Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Block Grant
Madrasah Education Development Project (MEDP),
(Studi Kasus Di Dua Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial (M.Kessos) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arif Wibowo, S.Sos, S.Hum, M.Hum (.....)

Penguji : Dra. Ety Rahayu, M.Si (.....)

Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (.....)

Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan *Block Grant Madrasah Education Development Project* (MEDP). (Studi Kasus Di Dua Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur).

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Jurusan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Arif Wibowo, S.Sos, S.Hum, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga membuka dan menambah wawasan berfikir penulis serta seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang senantiasa memberikan dukungan dan pelayanan terbaik kepada penulis.
3. Tim Penguji pada sidang tesis ini, yaitu Ibu Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (Ketua), Dra Firtiyah, M.Si (Sekretaris), Dra. Ety Rahayu, M.Si (Penguji Ahli), dan Bapak Arif Wibowo, S.Sos,S.Hum,M.Hum (Pembimbing).
4. Kepala, Guru, Staf, Komite, dan Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Lamongan, Jawa Timur

yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan tesis ini.

5. Kasubdit Kelembagaan Kementerian Agama RI, Koordinator PCU, Koordinator DCU, Staf PCU dan para Staf Kontarktual DCU yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini
6. Secara Khusus kepada Bapak Dr.Ibrahim Musa, M.A. dan Ibu Luspinah Ibrahim selaku orang tua yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat, perhatian dan kasih sayangnya.
7. Teristimewa suamiku tercinta Hakim, M.Pd., dan anak-anakku tersayang Harun, Rachmat, Imha Luchman, Cherlyza dan M.Aziizurachman yang senantiasa sabar dan memberikan dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta selalu mengiringi dengan panjatan do'a dengan penuh keikhlasan.
8. Rekan-rekan satu kelas di Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia angkatan 2010 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 28 Juni 2012

Penulis

Lilis Harlisa Musa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Harlisa Musa

NPM : 1006797010

Program Studi : Magister

Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan *Block Grant Madrasah Education Development Project* (MEDP). (Studi Kasus Di Dua Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur)

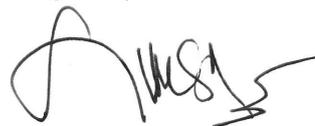
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal :

Yang menyatakan



(Lilis Harlisa Musa)

ABSTRAK

Nama : Lilis Harlisa Musa
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan *Block Grant Madrasah Education Development Project* (MEDP). (Studi Kasus Di Dua Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur)

Tesis ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan *block grant Madrasah Education Development Project* (MEDP) di dua Madrasah Ibtidaiyah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang mencakup input dan proses pelaksanaan program, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan adanya program lanjutan dan pendampingan dalam pelaksanaannya, pedoman/juknis dibuat oleh ahli yang berpengalaman dibidangnya, diadakannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru and internal efisiensi madrasah serta peningkatan tata kelola manajemen madrasah.

Kata kunci: *block grant, peningkatan kualitas guru, internal efisiensi, tata kelola manajemen madrasah*

ABSTRACT

Name : Lilis Harlisa Musa
Program Study : Social Welfare Departement
Title : Program Evaluation on Implementation of Block Grant Madrasah Education Development Project (MEDP). (Case Study in Two Islamic Elementary School at Lamongan District, East Java)

The focus of this thesis is to evaluate the implementation of block grant program of Madrasah Education Development Project (MEDP) in two Islamic elementary schools, at Lamongan district, East Java, which includes aspects of input and process of program implementation, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. This study is a descriptive qualitative research design. The results suggest that a follow-up programs and assistancy in the implementation should be made, guidelines should be made by experts with related experiences, implement/conduct workshops or trainings to improve teacher quality and internal efficiency and madrasah management and good governance.

Key Words: *block grants, improving teacher quality, internal efficiency, Madrasah management and good governance.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Manfaat Akademis	12
1.4.2. Manfaat Praktis	13
1.5. Keterbatasan Penelitian	13
1.6. Metodologi Penelitian	13
1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
1.6.2. Tipe Evaluasi	15
1.6.3. Kerangka Pemikiran	16
1.6.4. Teknik Pemilihan Informan	19
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.6. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data	22
1.6.7. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
1.7. Sistematika Penulisan Tesis	25
2. TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1. Teori dan Konsep	28
2.1.1. Kemiskinan	28
2.1.2. Pembangunan Sosial dan hubungannya dengan pendidikan	31
2.1.3. Pendidikan	36
2.1.3.1 Pendidikan Sekolah Umum dan Pendidikan Madrasah ..	38
2.1.4. Sarana dan Prasarana Sekolah	40
2.1.5. Kualitas atau Mutu Pendidikan	42
2.1.6. Manajemen Berbasis Madrasah	45
2.1.7. Evaluasi Program	50
2.1.7.1. Pengertian Evaluasi Program	50
2.1.7.2. Tujuan Evaluasi Program	52
2.1.7.3. Tipe Evaluasi Program	54
2.1.7.4. Langkah-langkah dalam Evaluasi Program	59
3. GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN LOKASI PENELITIAN	62
3.1. Gambaran Umum Program	62

3.1.1. Pengertian <i>Block Grant</i>	63
3.1.2. Kriteria Penentuan Wilayah dan Lokasi Penerima Block Grant	64
3.1.3. Tujuan Umum Program	65
3.1.4. Tujuan Khusus Program.....	65
3.1.4.1. Komponen dan Kegiatan <i>Block Grant</i>	65
3.1.5. Dana Block Grant	69
3.1.6. Kriteria Madrasah Penerima Block Grant	69
3.1.7. Dasar Hukum	70
3.1.8. Pengaturan Pelaksanaan MEDP	71
3.1.8.1. Lembaga Pelaksana dan Implementasi MEDP	71
3.1.8.2. Tugas dan Fungsi Institusi di lingkungan Kemenag	74
3.1.9. Mekanisme Aliran Dana <i>block grant</i> untuk Madrasah	77
3.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
3.2.1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu,	79
3.2.1.1. Identitas Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah	79
3.2.1.2. Sajarah Singkat Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah	79
3.2.1.3. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah	81
3.2.1.4. Data Siswa Dan Guru.....	83
3.2.1.5. Sarana dan Prasarana	85
3.2.1.6. Struktur organisasi pengurus MEDP di MI Islamiyah	86
3.2.2. Profil Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng Lamongan	87
3.2.2.1. Identitas Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum	87
3.2.2.2. Sajarah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum	87
3.2.2.3. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum.	89
3.2.2.4. Data Siswa Dan Guru	89
3.2.2.5. Sarana dan Prasarana	91
3.2.2.6. Struktur organisasi pengurus MEDP di MI Darul Ulum	92
4. HASIL PENELITIAN	93
4.1. Pelaksanaan Program <i>block grant</i> MEDP	93
4.1.1. Aspek Input (Masukan).....	94
4.1.1.1. Dana	94
4.1.1.2. Sumber Daya Manusia	97
4.1.1.3. Sarana dan Prasarana	99
4.1.2. Aspek Proses (Pelaksanaan)	102
4.1.2.1. Profesionalisme guru Meningkatkan	102
4.1.2.2. Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya belajar	105
4.1.2.3. Efisiensi Internal Madrasah.....	107
4.1.2.4. Tata Kelola/Manajemen Madrasah sesuai Standar Nasional	109
4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	115
4.2.1. Faktor Pendukung	115
4.2.2. Faktor Penghambat.....	117
5. ANALISA HASIL PENELITIAN	121
5.1. Pelaksanaan Program Block grant MEDP di dua Madrasah Ibtidaiyah	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Indikator-Indikator Komparatif Pembangunan Manusia	9
Tabel 1.2. Informan	20
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Program Block Grant MEDP	62
Tabel 3.2. Daftar Siswa MI Islamiyah	83
Tabel 3.3. Jumlah Guru MI Islamiyah	83
Tabel 3.4. Hasil Rata-rata Ujian Nasional MI Islamiyah	84
Tabel 3.5. Hasil Nilai Rata-rata Ujian Madrasah MI Islamiyah	84
Tabel 3.6. Sarana Fisik	85
Tabel 3.7. Prasana Fisik	85
Tabel 3.8. Daftar Siswa MI Darul Ulum.....	89
Tabel 3.9. Jumlah Guru MI Darul Ulum.....	90
Tabel 3.10. Hasil Rata-rata Ujian Nasional MI Darul Ulum	90
Tabel 3.11. Hasil Nilai Rata-rata Ujian Madrasah MI Darul Ulum.....	91
Tabel 3.12. Sarana Fisik	91
Tabel 3.13. Prasana Fisik	92
Tabel 4.1. Data Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan	103
Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan	106
Tabel 4.3. Ringkasan Temuan Lapangan	118
Tabel 5.1. Perbandingan Hasil penelitian	128

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran	18
Bagan 3.1. Struktur Organisasi MEDP	73
Bagan 3.2. Mekanisme Arus Dana untuk Block grant	77
Bagan 3.3. Struktur Organisasi Pengurus MEDP di MI Islamiyah	86
Bagan 3.4. Struktur Organisasi PengurusMEDP di MI Darul Ulum	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	
Lampiran II	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tercatat sebesar 6,5% pada triwulan III 2011 berdasarkan Berita Resmi Statistik (Nov. 2009). Pembangunan ekonomi yang tidak diintegrasikan dengan pembangunan sosial akan memarginalkan golongan-golongan yang tidak memiliki akses terhadap kebijakan publik, program pembangunan, proses politik, serta sumber-sumber ekonomi yang ada (Suharto, 2008, h. 16) sehingga hanya sekelompok kecil saja yang menikmati pembangunan ekonomi tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sekarang ini lebih memperhatikan aspek-aspek sosial dalam proses pembangunan ekonominya. (No. 72/11/th.XIV). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi kesejahteraan sosial yang belum terwujud mengakibatkan banyak masalah sosial yang timbul, salah satunya adalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia bila tidak diatasi dengan baik akan berdampak memunculkan masalah lainnya seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, munculnya anak jalanan, kriminalitas yang tinggi dan lain sebagainya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 30,02 juta orang, yaitu masyarakat yang berpengeluaran per bulannya sebesar atau kurang dari Rp. 200.000 per kapita. Jumlah ini mengalami penurunan 1 juta orang atau 3,2% dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 tahun lalu yang mencapai 31,02 juta orang. Rendahnya tingkat pendidikan dapat terlihat pula dari banyaknya masyarakat yang belum dapat sepenuhnya mengenyam

pendidikan formal, walau sudah ada program pendidikan gratis, dan masyarakat juga masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan pendukung pendidikan.

Paiva (1977) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai sebuah proses peningkatan kapasitas individual “untuk bekerja bagi kesejahteraannya sendiri dan masyarakatnya” (Midgley, 2005, h. 165). Dengan demikian, majunya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kesempatan seseorang ataupun masyarakat untuk memperoleh pendidikan, dan tingkat mutu pendidikan dari bangsa yang baik akan dapat mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Menurut Jalal dan Supriadi (2001) pendidikan berfungsi sebagai peletak dasar dan penunjang pembangunan. Pendidikan harus dilakukan secara terintegrasi dan sistematis dengan sebaik-baiknya oleh berbagai pihak yang meliputi keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keberhasilan pendidikan bukan saja dapat diketahui dari kemampuan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan melainkan juga terkait erat dengan peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (h. 101).

Pemerintah Republik Indonesia telah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pendidikan dalam usaha mencerdaskan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat berbunyi: “... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ...” Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat (2) menegaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya Ayat (4) menegaskan bahwa: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan konstitusi ini merupakan amanat reformasi di bidang pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan belanja publik yang lebih besar, terutama untuk meningkat layanan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Kurangnya lulusan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu tinggi diakui sebagai penyebab utama terhambatnya perkembangan usaha skala kecil dan

menengah yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Sekitar 2 sampai 3 juta anak putus sekolah diperkirakan bergabung dengan tenaga kerja setiap tahun selama 5 tahun yang akan datang, dan jumlah remaja yang berusia 15 sampai 24 tahun yaitu lulusan pendidikan dasar dan menengah yang menganggur diperkirakan akan meningkat secara tajam di daerah-daerah pedesaan. Untuk itu, memperluas kesempatan pendidikan menengah di pedesaan merupakan hal yang penting untuk mengatasi permasalahan ini.

Kerjasama dalam membuat kebijakan antarlembaga penyedia layanan pendidikan merupakan hal yang sangat strategis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengelola sistem pendidikan nasional bertugas mengembangkan kebijakan dan perencanaan strategis secara menyeluruh dalam bidang pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, mengatur penyelenggaraan pendidikan secara terdesentralisasi kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sejak tahun 2001. Sementara penyelenggaraan pendidikan Islam yang berskala lebih kecil, termasuk madrasah, dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) secara terpusat. Madrasah adalah salah satu jenis pendidikan dalam UU Sisdiknas yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Sistem pendidikan di madrasah merupakan bagian penting dari strategi Pemerintah untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bersifat universal sesuai dengan Sasaran Pembangunan Millennium (*Millennium Development Goals/MDGs*). Target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah tahun 2004 – 2009 yang dilanjutkan dengan RPJM 2010- 2014 adalah pada tahun 2015 semua anak usia pendidikan dasar sudah ditampung dalam program wajib belajar pendidikan dasar. Program pembangunan pendidikan nasional dalam RPJM sejalan dengan agenda pembangunan internasional yang telah menjadi komitmen para donor dan negara berkembang yang tertuang dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* yang dibentuk pada tahun 2005. Komitmen tersebut berupa kerja sama antarnegara mitra guna memastikan negara tersebut mempunyai rasa memiliki dan melaksanakan gagasan tersebut secara berkelanjutan.

Undang-undang pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga menggalang kemitraan dari masyarakat (swasta) untuk membantu mencapai target pendidikan dasar yang universal. Kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat (swasta) serta kontribusi orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anaknya merupakan pondasi yang kuat bagi mengatasi masalah kemiskinan termasuk melalui pendidikan Madrasah. Madrasah diminati oleh sebagian besar masyarakat dari kalangan keluarga miskin di daerah pedesaan – yaitu kelompok masyarakat yang terbukti paling sulit dijangkau oleh sekolah umum tingkat pendidikan dasar. Kehadiran Madrasah sangat membantu upaya pemerintah dalam menjangkau dan mempertahankan angka partisipasi pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan di daerah yang sulit dijangkau.

Saat ini, ada sekitar 40.000 sekolah Madrasah di Indonesia, dengan sekitar 6 (enam) juta siswa mendaftar di madrasah, yang merupakan sekitar 18% dari angka partisipasi pendidikan di tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Sebagian besar Madrasah yang berlokasi di daerah pedesaan di mana masyarakatnya yang mayoritas Muslim dan kurang berminat untuk mengikuti pendidikan umum misalnya di daerah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Lebih dari 50% peserta pendaftaran terdiri dari perempuan, dan sementara sebagian besar siswa berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Sekitar 90% dari Madrasah adalah diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam. Namun, karena sebagian besar masyarakat pendukung Madrasah adalah keluarga berpenghasilan rendah, Madrasah tidak mampu untuk meningkatkan fasilitas belajar yang baik atau untuk membeli bahan pelajaran/ buku atau untuk menarik guru yang berkualitas. Sekitar 40% - 60% dari guru Madrasah yang baik tidak memenuhi kualifikasi akademik S1, dan tidak memiliki kesesuaian antara pelajaran yang mereka ajarkan dan subyek dari kualifikasi mereka. Seringkali, personil Yayasan Madrasah serta Kepala Madrasah kurang memiliki visi kepemimpinan dan keterampilan dalam manajemen Madrasah yang efektif (*Asian Development Bank, 2006*).

Berdasarkan UU Sisdiknas, sistem pendidikan Madrasah menjadi bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu Pemerintah telah

menargetkan agar Madrasah mencapai standar pendidikan yang sama seperti di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Untuk itu, Pemerintah memberikan bantuan dana kepada Madrasah, baik melalui sumber daya domestik maupun bantuan donor. Selama 1998-2004, Pemerintah bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) telah memberikan bantuan dana untuk pembangunan Madrasah yaitu melalui Proyek Pendidikan Dasar (*Basic Education Project*) dan Proyek Pengembangan Madrasah Aliyah (*Madrasah Aliyah Development Project*).

Hingga saat ini beberapa program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pelaksana dengan badan bantuan internasional sebagai negara donor di antaranya, Pemerintah Australia (AusAID), UNESCO, UNICEF, Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat [USAID], *Asian Development Bank* (ADB), *World Bank*, *Islamic Development Bank* (IDB), telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, mutu dan relevansi, serta efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Madrasah.

Misalnya, untuk program *Decentralized Basic Education Project* (Proyek Desentralisasi Pendidikan Dasar) *Asian Development Bank* (ADB) yaitu Pinjaman 1863-Indonesia [INO] tahun 2001-2008. Proyek bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak miskin dan untuk menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun melalui: (i) pengembangan sekolah yang didasarkan kepada manajemen berbasis sekolah yang tercermin dalam rencana pengembangan sekolah yang didukung oleh bantuan pengembangan sekolah, dan (ii) pengembangan pendidikan dasar berbasis kabupaten/kota yang mengembangkan kapasitas kabupaten/kota untuk merencanakan dan mengelola pendidikan dasar secara terdesentralisasi. Program proyek ini didukung dengan menggunakan Dana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota. Namun, apabila program ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan berlanjut, serta tidak melibatkan seluruh aspek dari sekolah dan segenap stakeholdernya serta tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, maka keberlanjutannya tidak dapat dijamin (*Asian Development Bank*, 2006).

Demikian juga halnya dengan program kerjasama Indonesia dan Australia dalam pembangunan pendidikan dasar (*Indonesia-Australia Partnership in Basic Education*) yang digagas oleh *Australian Agency for International Development* (AusAID) tahun 2004–2007, merupakan dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Pendidikan 2005-2006. Program ini mencakup (i) peningkatan akses terhadap kesempatan pendidikan dasar formal dan non formal yang berkualitas tinggi, (ii) peningkatan standard, kualitas dan efisiensi internal secara kesinambungan dalam pendidikan, (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan untuk manajemen kinerja pendidikan, pemantauan dan pemberian pelayanan, dan (iv) peningkatan volume, efektifitas, dan pemerataan mobilisasi sumber daya serta alokasi di bidang pendidikan, tidak akan dapat terrealisasi dengan baik jika tidak terdapat kerjasama yang baik antar sekolah, para stakeholdernya dan masyarakat sekitarnya (*Asian Development Bank*, 2006).

Proyek lain adalah *Basic Education Project* (Proyek Pendidikan Dasar) ADB (Pinjaman 1442-INO) tahun 1996-2002 yang bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas madrasah negeri dan swasta (Madrasah Ibtidaiyah [MI] dan Madrasah Tsanawiyah [MTs]). Program ini memberikan dukungan untuk kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan dasar terutama untuk kaum miskin dan perempuan serta memperkuat kinerja institusi pengelola Madrasah di lingkungan Kementerian Agama (*Asian Development Bank*, 2006).

Sejak tahun 2007 hingga saat ini, Pemerintah telah menjalin kemitraan dengan ADB melalui program Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (*Madrasah Education Development Project [MEDP]*). Dimana pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan bantuan *block grant* kepada madrasah sasaran MEDP untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan Madrasah agar sesuai dengan standar nasional, yaitu dengan memberikan bantuan dana secara langsung kepada Madrasah. Dana *block grant* tersebut dikelola langsung oleh masing-masing madrasah dan dipergunakan sesuai dengan Rencana Pengembangan Madrasah (*Madrasah Development Plan - MDP*) yang telah dibuat oleh masing-masing Madrasah dan disetujui oleh koordinator Kabupaten dan Propinsi pada awal pelaksanaan proyek. Secara khusus, dana *block grant* ini hanya dipergunakan untuk (1) pengembangan profesionalisme guru, (2)

meningkatkan mutu sumber belajar dan fasilitas pembelajaran, (3) peningkatan efisiensi internal, yaitu dengan menurunkan angka drop-out dan meningkatkan angka transisi dan (4) penguatan tata kelola, manajemen dan keberlanjutan pendidikan madrasah agar dapat bersaing atau setara dengan sekolah umum dibawah Kementerian Pendidikan Nasional (*Asian Development Bank, 2007*).

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Madrasah telah menerima bantuan dana dari Pemerintah dan berbagai negara donor yang digunakan untuk meningkatkan daya tampung, kemampuan profesional guru, dan kemampuan manajemen pada tingkat Madrasah. Dengan latar belakang kondisi inilah penelitian dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dengan mengambil topik “Evaluasi Pelaksanaan Program *Block Grant Madrasah Education Development Project (MEDP)*”.

Cukup sulit mencari hasil studi terkait yang telah dilakukan sebelumnya tentang bantuan dana *block grant* untuk pengembangan pendidikan madrasah. Namun untuk melihat *research gap* dari penelitian yang dilakukan, pada penelitian ini dipaparkan penelitian pembandingan yang bersifat deskriptif dan menggunakan data dengan ruang lingkup yang berbeda. Persamaan dari ke empat penelitian tersebut dibawah adalah bahwa penelitian ini sama-sama mengevaluasi bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada pengguna. Sedangkan perbedaannya adalah: (1). Subjek penelitian di dua lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Lamongan, Jawa Timur. (2) Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan program *block grant* dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah sesuai dengan standard nasional. (3) Jumlah dana yang di terima madrasah.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Bahar Sinring terhadap pelaksanaan pemberian bantuan dana secara langsung dalam hal ini Dana BOS, terdapat peningkatan prestasi sekolah dan peningkatan tingkat enrollment, tingkat kelulusan dan prestasi akademis peserta didik dan menurunkan tingkat drop out sekolah. Namun dalam penelitian tersebut juga di paparkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran.

Demikian juga hasil penelitian terhadap Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Lembaga penelitian SMERU di lima Kabupaten/Kota yang menunjukkan bahwa dalam penargetannya, ditemui adanya kesalahan sasaran dan

timbulnya berbagai masalah dalam pendistribusian dana BLT. Serta terbatasnya waktu pelaksanaan BLT

Serupa juga dengan hasil penelitian terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Lembaga penelitian SMERU di DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa tidak ditemukannya acuan atau pedoman umum tentang program, tidak adanya sosialisasi program secara formal dan menyeluruh, serta pembagian KKB dan pencairan dana yang tidak sesuai dengan yang telah didata.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Bantuan Hibah UNDP oleh Riana M. Hutahayan, dalam Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa tingkat kinerja pelaksanaan proyek PKM tergolong rendah karena keterbatasan tenaga serta kapasitas pelaksana yang tidak merata dan untuk meningkatkan dampak positif program, diusulkan untuk meningkatkan kinerja staf di pusat, maupun wilayah, serta kapasitas LSM/KSM yang menjadi mitra kerja masyarakat.

Secara lengkap, hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran I terlampir.

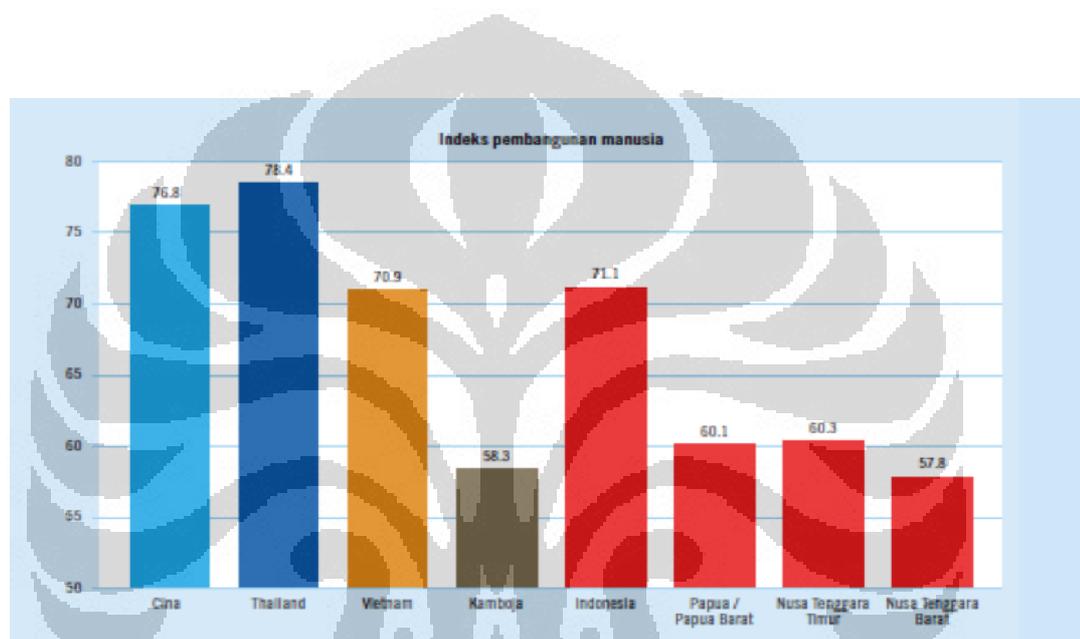
1.2. Rumusan Permasalahan

Menurunkan angka kemiskinan tetap menjadi tantangan yang besar di Indonesia dimana 49 persen dari penduduknya (sekitar 110 juta orang) masih hidup dengan pendapatan per bulan US \$2 atau Rp. 200,000 per kapita. Kesenjangan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia, antara provinsi satu dengan yang lain, antara daerah satu dengan daerah lain dalam satu provinsi, dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa kota tertentu di Jawa dan Bali, tingkat kemiskinan berada di bawah lima persen, sedangkan tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat hampir mencapai 40 persen. Selanjutnya, di beberapa kotamadya terkaya, kemiskinan dapat dikurangi hingga setengahnya (50%) pada periode 1999–2006, sementara di kabupaten-kabupaten termiskin, tingkat kemiskinan hanya turun seperenamnya (16%) saja. Tabel 1.1. membandingkan data pembangunan manusia di kawasan Asia dan di wilayah-wilayah di Indonesia. Meskipun Indonesia kini termasuk negara berkembang

dengan pendapatan menengah, banyak dari provinsi dan kabupatennya yang memiliki tingkat pendapatan sebanding dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah (*Australia Indonesia Partnership*, 2008)

Tabel.1.1

Indikator-indikator Komparatif Pembangunan Manusia di Wilayah Asia dan di Indonesia



Sumber: Indikator-indikator Pembangunan Bank Dunia tahun 2006, Laporan Pembangunan Manusia BAPPENAS –UNDP Indonesia tahun 2004 dan berbagai laporan pembangunan manusia UNDP lainnya

Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang paling penting untuk menurunkan kemiskinan dan ketidak-adilan serta memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga merupakan investasi seseorang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat sekitarnya. Seperti yang dikemukakan Adam Smith (1776) modal sumber daya manusia (*human capital*) berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja, memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan ketrampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik *rate of return* yang

sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan human capital ada hubungan linier antara tingkat investasi pendidikan dengan tingkat produksi dan penghasilan yang tinggi. Investasi dalam peningkatan potensi manusia sebagai modal dasar akan menghasilkan individu dan masyarakat terdidik yang produktif dan meningkatkan penghasilannya sebagai dampak dari kualitas kerja yang diperoleh melalui pendidikan. Selanjutnya, individu dan masyarakat yang memperoleh penghasilan lebih besar akan mampu membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar, dan dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan Negara dan kesejahteraan bangsa (Schultz, 1971, h. 27)

Dengan adanya program pemberian bantuan *block grant* kepada madrasah swasta melalui Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (*Madrasah Education Development Project (MEDP)*), diharapkan madrasah swasta dapat memenuhi standar nasional pendidikan sehingga setara dengan pendidikan sekolah umum atau sekolah negeri lainnya dan dapat meningkatkan mutu pendidikannya serta mutu kelulusannya. Dengan peningkatan mutu pendidik, diharapkan pendidik akan dapat meningkatkan taraf hidupnya, dan untuk siswa dengan mutu pendidikan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya hingga perguruan tinggi, atau paling tidak menyelesaikan hingga tingkat Madrasah Aliyah (MA), tidak berhenti sampai MTs atau hanya lulus MI saja (*Asian Development Bank, 2006, h. 6*)

Berdasarkan hasil penelitian internasional, mutu pendidik yang baik serta kepemimpinan sekolah yang mendukung, merupakan kunci untuk meningkatkan hasil pendidikan. Kurangnya sistem bantuan pengawasan di tingkat kabupaten dan kurangnya jumlah pegawai kabupaten menghambat pengelolaan madrasah di kabupaten. Serta kurangnya keterwakilan madrasah dalam dewan pendidikan di tingkat kabupaten mengakibatkan tingkat bantuan pun rendah dari pemerintah daerah (*Asian Development Bank, 2006, h. 4*).

Dalam Nota Panduan Administrasi, monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program. Monitoring akan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak internal (pengelola program) dan eksternal (pihak yang independen, yang tidak terkait dengan pelaksanaan program). Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi yang bersifat internal disediakan

untuk tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk eksternal monitoring terdapat dalam dana langsung dari negara donor (*Asian Development Bank*, 2007, h. 2).

Program bantuan *block grant* MEDP telah di setujui sejak tahun 2007, namun pendistribusian dana ke madrasah baru terrealisasi pada akhir tahun 2009. Evaluasi yang telah dilakukan terhadap program MEDP adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang bersifat internal, yang dilakukan oleh pengelola program baik di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat yaitu monitoring yang lebih mengarah kepada pemantauan pelaksanaan dan realisasi dana, namun belum mengarah kepada kegiatan evaluasi terhadap program itu sendiri. Dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut terdapat penilaian terhadap pelaksanaan *block grant* di madrasah yang berkategori tinggi, sedang dan rendah kesesuaiannya dengan proses dan prosedur yang ditetapkan oleh proyek MEDP. Dalam penelitian ini Madrasah Ibtidaiyah dipilih sebagai lokasi penelitian dan bukan Madrasah Tsanawiyah ataupun Madrasah Aliyah, karena sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah di pedesaan masih dibawah standar nasional dan kualitas gurunya pun masih kurang. Penelitian ini juga dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta, bukan Madrasah Ibtidaiyah Negeri karena di Kabupaten Lamongan, tidak ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang mendapatkan dana bantuan *block grant*. Diantara 16 Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang mendapat dana *block grant* di Kabupaten Lamongan, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah dipilih karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi dana *block grant*, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah mendapat nilai tertinggi yaitu 91.91 sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum mendapat nilai 72.79 (Laporan TA-IME, 2010), dan berdasarkan lokasi geografisnya, MI Darul Ulum berada di daerah lembah pegunungan kapur dan berada jauh dari perkotaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan *block grant* Madrasah Education Development Project (MEDP) untuk melihat apakah pelaksanaan bantuan *block grant* ini berjalan sesuai yang direncanakan, apa yang telah direncanakan, apa yang tidak atau belum dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi, serta upaya apa saja yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Berkaitan dengan kondisi tersebut, evaluasi

pelaksanaan program *block grant* MEDP, dilakuan pada 2 (dua) Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program *block grant* MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program bantuan *block grant* di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng di kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program *block grant* MEDP dalam meningkatkan dan mengembangkan Madrasah Ibtidaiyah, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program *block grant* di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian evaluasi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun terhadap dunia praktis, yaitu :

1.4.1. Manfaat akademis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

1.4.2. Manfaat praktis

- Memberikan masukan dan saran bagi praktisi lembaga pendidikan khususnya madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam memberikan akses layanan di bidang pendidikan.
- Dapat mengembangkan, meningkatkan, dan memperbaiki program, sehingga program pelaksanaan *block grant Madrasah Education Development Project* (MEDP) ini dimasa yang akan datang lebih efektif dan lebih efisien.
- Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, BAPPENAS serta seluruh jajaran fungsionalnya di daerah yang terkait dengan pemberian bantuan dana *block grant* dan dapat memberikan masukan terhadap solusi/pemecahan masalah dalam menyusun/merumuskan suatu kebijakan, program dan kegiatan layanan lainnya bagi keluarga miskin di masa yang akan datang.

1.5. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini disadari banyak keterbatasan dan kekurangan, baik akibat keterbatasan kemampuan maupun keterbatasan waktu penelitian. Dalam hal ini penelitian hanya memfokuskan pada pelaksanaan program, belum melihat pada ketepatan sasaran, ataupun hasil dari program. Oleh karena itu kepada pihak-pihak yang tertarik dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran serta koreksi guna memberikan manfaat yang lebih besar

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program *block grant* MEDP di dua Madrasah Ibtidaiyah, Lamongan, Jawa Timur. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Patton (2002) penelitian evaluasi program adalah sekumpulan informasi/data yang sistematis tentang serangkaian aktifitas,

karakteristik, dan hasil (*outcome*) dari program untuk membuat penilaian terhadap program, meningkatkan efektifitas program, dan/atau memberikan keputusan tentang program yang akan datang. Metode Evaluasi Kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi dan menghasilkan temuan yang berguna, sehingga pemahaman terhadap program dan pelaksana program dapat digunakan sebagai pendeskripsian/gambaran terhadap pelaksanaan dan hasil program untuk membuat keputusan terhadap program (h. 10)

Metode penelitian kualitatif dipilih untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian secara maksimal. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, informasi yang diterima melalui wawancara mendalam dengan informan, datanya dapat dianalisis berdasarkan deskripsi dari informan. Untuk lebih jelas penelitian kualitatif ini merupakan upaya untuk menggali informasi secara luas dan mendalam dari para informan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan suatu program.

Menurut Patton (2002) penelitian kualitatif berdasarkan pada *grounded theory* yaitu teori yang secara induktif dihasilkan dari penelitian lapangan yang muncul dari pengamatan peneliti dan wawancara terhadap berbagai sumber informan untuk menghasilkan dan menemukan suatu pemahaman akan interpretasi atau makna terhadap suatu gejala atau masalah (h. 11).

Sedangkan menurut Nitimiharjo dan Iskandar (1993) penelitian evaluasi adalah untuk mengukur pengaruh suatu program terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai dan diberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat keputusan tentang suatu program untuk meningkatkan atau memperbaiki program dimasa yang akan datang (h. 129).

Bogdan dan Taylor (1975) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini dipilih karena obyek penelitian dipandang sebagai individu atau kelompok secara holistik (utuh). Jadi penelitian kualitatif tidak mengisolasi individu/kelompok kedalam variable/hipotesis tertentu (Moleong, 2001, p. 3).

1.6.2. Tipe Evaluasi

Tipe evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi formatif, dimana peneliti tidak memperhatikan kesuksesan suatu program. Tapi berfokus pada pengumpulan informasi terhadap pelaksanaan program *block grant Madrasah Education Development Project (MEDP)*, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan program *block grant MEDP* agar dapat meningkatkan pelaksanaan dan kinerja Program *block grant* tersebut secara keseluruhan sehingga dapat pula memberikan masukan kepada pelaksana program sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Menurut Sugiono (2008) evaluasi formatif digunakan untuk mendapat *feedback* dari suatu aktifitas dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program atau produk yang berupa barang atau jasa (h. 10).

Menurut Dale (2004) evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari program atau proyek yang di evaluasi, melalui pembelajaran pengalaman yang didapat (*lesson learned*), dengan tujuan untuk membuat perubahan perencanaan dan pelaksanaan yang mungkin perlu terhadap program (h. 33).

Menurut Rubin dan Babbie (2008) evaluasi formatif berfokus pada pengumpulan informasi yang berguna bagi perencanaan program dan peningkatan pelaksanaan serta kinerja program, dan tidak untuk menguji keberhasilan program (h. 306).

Menurut Herman, Morris dan Fitz – Gibon (1987) evaluasi formatif berfokus juga pada penyediaan informasi untuk pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan baik. termasuk juga memonitor pelaksanaan program dan pencapaian tujuan. Untuk meningkatkan program, diperlukan pemahaman terhadap kinerja program oleh pelaksana program agar tujuan dari program dapat tercapai (h. 16).

William (1976) menyatakan bahwa terdapat kurang-perhatian terhadap pelaksanaan program yang saat ini sangat penting untuk memperbaiki kinerja program yang kompleks, analisa kebijakan, dan percobaan dalam kebijakan sosial (Patton, 2002, p. 161).

Wirawan (2011) mengemukakan bahwa evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilayani: sumber-sumber yang dipergunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program. Diidentifikasi juga dalam evaluasi proses perkembangan pengaruh dari program terhadap pemangku kepentingan program (h. 21).

Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Menurut Emerson (1913) salah satu cakupannya adalah mengukur apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program jika terjadi penyimpangan dari yang direncanakan, diputuskan apa yang harus dilakukan untuk mengontrol ketimpangan dan mengembalikan pelaksanaan program ke jalurnya dalam pengertian: kinerja yang diharapkan, penggunaan *man, money, material, machine, dan method* yang dipergunakan untuk melaksanakan program (Phiffner, dan Presthus, 1960, h. 551).

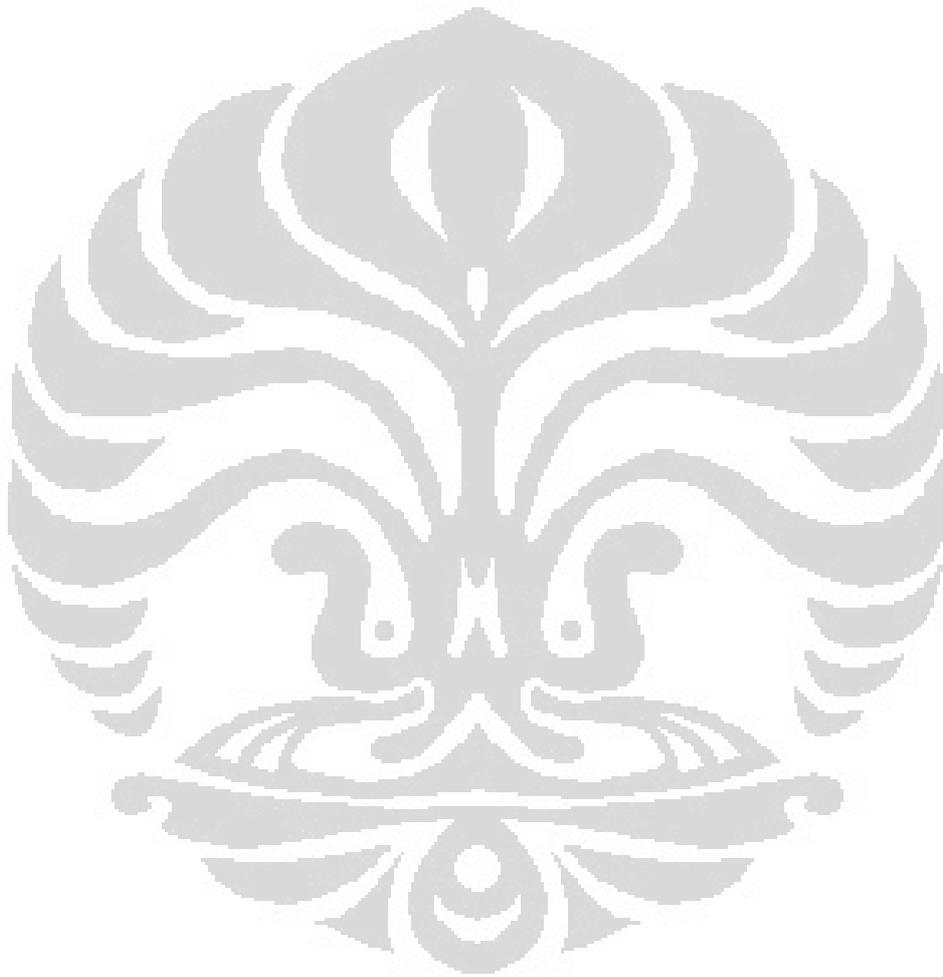
1.6.3. Kerangka Pemikiran

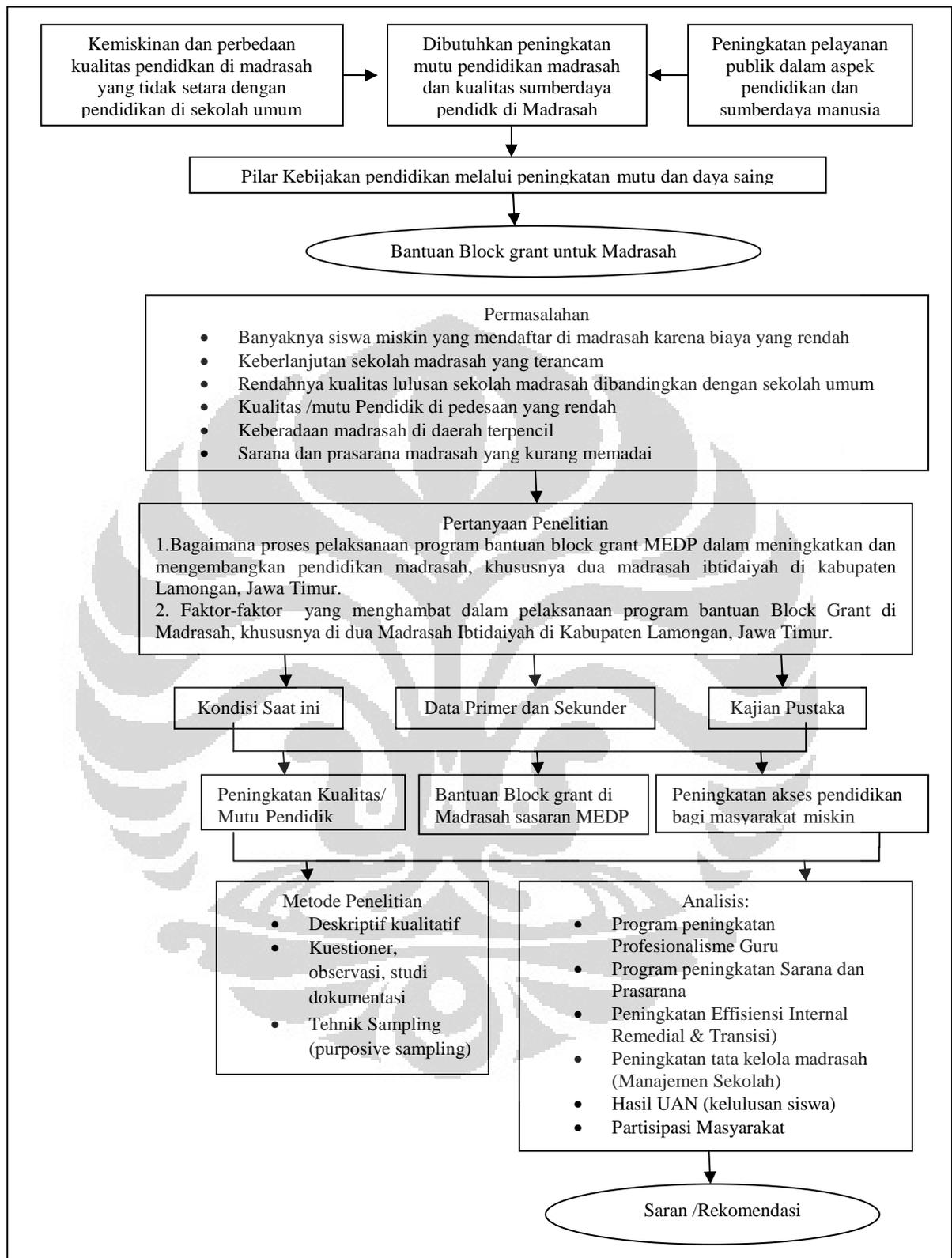
Bantuan *block grant* untuk madrasah (sebagai komponen *input*/masukan) diberikan berdasarkan kebutuhan akan peningkatan mutu pendidikan di madrasah dan kualitas sumberdaya pendidik di Madrasah agar dapat setara layanannya dengan pendidikan di sekolah umum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Petunjuk Teknis Pengelolaan *Block Grant* bagi Madrasah akan dijadikan pedoman dalam proses pelaksanaan program tersebut (sebagai komponen proses). Apabila pelaksanaan program sesuai dengan sasaran rumusnya, maka akan diperoleh hasil-hasil program sebagaimana yang diinginkan (sebagai komponen *output*/keluaran). Sehingga akan tercapai hasil-hasil dari pelaksanaan program ini yang memiliki manfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan (sebagai komponen *outcome*/dampak).

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan *block grant* untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi Madrasah dengan mengguakan Pedoman *Block Grant* sebagai data primer. Analisis deskriptif dilakukan terhadap kondisi dan hambatan yang ada untuk dijadikan

dasar dalam menyusun saran kebijakan bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan *block grant* untuk Madrasah di masa yang akan datang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah seperti dirangkum dalam Bagan 1.1. dibawah ini.





Bagan 1.2. Alur Pemikiran Penelitian

1.6.4. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang mengetahui informasi yang ingin kita peroleh untuk membantu kita dalam memahami secara holistik tentang program yang kita teliti. Penetapan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka mengetahui tentang informasi yang ingin diperoleh. Seperti yang dikemukakan Moleong (2004) bahwa :

“Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat agar informasi yang didapat betul-betul akurat dan faktual, maka informan yang dipilih harus mengetahui dan memahami sepenuhnya tentang objek kajian yang diteliti” (h. 90).

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah “*purposive sampling*”, dimana informan dipilih secara sengaja berdasarkan *pemikiran* logis dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan teknik ini sesuai dengan pendapat Alston dan Bowles (1998), yaitu: “*The sampling technique allow us to select the sample for our study for purpose. We may have prior knowledge that indicates that a particular group is important to our study or we select those subjects who we fell are*” *typical*” *examples of the issue we wish to study.*” (Teknik sampling ini membolehkan kita untuk memilih sample sesuai tujuan penelitian. Kita mungkin telah mengetahui sebelumnya kelompok mana saja yang akan berguna untuk penelitian kita atau kita memilih subjek-subjek yang kita anggap sebagai sampel yang sesuai dengan permasalahan yang kita teliti) (h. 92).

Informan yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahannya dan pertanyaan yang diajukan. Selain itu dianggap mengetahui dan memahami kondisi nyata di lapangan. Penetapan informan berdasarkan informasi yang ingin diperoleh, dirangkum dalam kisi-kisi *sampling* berikut ini :

Tabel 1.2. Informan

No.	Informasi Yang di cari	Insitusi/Lembaga		Informan	Jumlah
1.	Pelaksanaan Program Block Grant MEDP di kedua Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	Kementerian Agama Pusat		Kepala Subdit Kelembagaan, mantan Ketua Proyek MEDP (2009 dan 2010)	1 orang
		Kementerian Agama Propinsi		Koordinator PCU	1 orang
				Staf Kontractual di PCU	1 orang
		Kementerian Agama Kabupaten		Koordinator DCU	1 orang
				Staf Kontractual di DCU	2 orang
		MI Islamiyah	MI Darul Ulum		
		1 orang	1 orang	Kepala Madrasah Ibtidaiyah	2 orang
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Program	1 orang	1 orang	Bendahara Madrasah	2 orang
		1 orang	1 orang	Guru	2 orang
		1 orang	1 orang	Komite Madrasah	2 orang
		1 orang	1 orang	Orang tua Siswa yg tergabung dalam Komite Madrasah/ Masyarakat	2 orang
		1 orang	1 orang		
3	Kondisi fisik dan pembelajaran di Sekolah/Madrasah sebelum dan Sesudah mendapat dana Block grant	3 orang	3 orang	Siswa kelas V	6 orang
Total Informan					22 orang

Informan di atas merupakan sumber data primer/utama sehingga data yang dikumpulkan dari sumber data/informan tersebut merupakan data primer (utama) dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan haruslah orang yang mempunyai banyak pengalaman mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan atau manfaat informan adalah agar dalam jangka waktu yang relatif singkat banyak informasi yang diperoleh (Moleong, 2004, h. 90).

Menurut Faisal (1990), penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial yang dapat memberikan informasi tertentu yang valid dan terpercaya melalui elemen-elemen yang ada (h. 78).

Informan penelitian sebagai sumber data dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian dan kecukupan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pemimpin lembaga di Pusat, propinsi, kabupaten dan madrasah, guna mengetahui kegiatan-kegiatan, perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan program.
- Staf di propinsi dan kabupaten yang berhubungan langsung dengan Madrasah dan mengetahui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh madrasah
- Para pengajar dan Staf Madrasah yang turut terlibat dalam pelaksanaan program
- Masyarakat yang tergabung dalam Komite Madrasah dan Orangtua siswa yang tergabung dalam komite madrasah
- Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas V, yang telah menikmati fasilitas belajar sejak adanya dana block grant di madrasah tersebut.

Pengumpulan data yang berasal dari sumber data primer tersebut perlu didukung oleh sumber data sekunder sebagai penguat informasi yang didapat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen/data-data tentang pelaksanaan program pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Literatur dan dokumentasi

Studi literatur adalah kegiatan mencari secara literatur, melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan kita teliti. Dokumen bisa berupa teori-teori dan bisa pula hasil-hasil penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti (Sangadji dan Sopiah, 2010, h. 133). Pada penelitian ini, studi literatur dilaksanakan dengan mengkaji teori-teori dan konsep-konsep dari buku-buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dsb., yang erat kaitannya dengan masalah penelitian diantaranya teori kemiskinan, dimana pembangunan sosial, sarana dan prasarana sekolah, kualitas atau mutu pendidikan, Manajemen Berbasis Madrasah, teori evaluasi program di samping mengkaji dan mempelajari laporan-laporan kegiatan, data, informasi dan file-file

yang yang berkaitan dengan pelaksanaan program Block grant MEDP di kedua Madrasah Ibtidaiyah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

b. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara intensif dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Proses wawancara juga memperhatikan bahasa *non verbal* yang diekspresikan informan.

Menurut Moloeng (2001) wawancara mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan digunakan dalam proses wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah *in depth interview* (wawancara mendalam) (h. 136). Alston dan Bowles (1998) mengemukakan bahwa wawancara mendalam bertujuan untuk melihat dunia dari pandangan responden untuk menyelidiki pemikiran dan perasaan mereka dan untuk memahami secara seksama sudut pandang mereka (h. 120).

1.5.7. Pengolahan Data dan Analisa Data

Pengolahan data dilakukan secara langsung dan bertahap setelah data penelitian diperoleh. Langkah pertama adalah mengelompokkan jawaban-jawaban informan (responden) dari hasil wawancara dalam kategori tertentu. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Kegiatan awal yang dilakukan adalah membuat ringkasan kasus (*case summary*) dari hasil wawancara dengan tiap-tiap informan, observasi dan studi dokumentasi. Ringkasan tersebut dikelompokkan berdasarkan topik pertanyaan yang diajukan dalam bentuk matriks atau tabel. Kemudian menganalisa dengan menggunakan matriks yang berisi data ringkasan hasil wawancara mendalam dan dokumen yang berkaitan dan melakukan tehnik reduksi data dan teknik triangulasi data.

Sarantakos (1993) mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu :

- a. Reduksi data (*data reduction*) artinya membuat tema berdasarkan instrument penelitian dan memasukkan serta memilah jawaban masing-masing informan berdasarkan tema.

- b. Menggabungkan data (*data organization*) artinya mengelompokkan jawaban dari tiap-tiap informan berdasarkan tema yang sama.
- c. Menjelaskan/menginterpretasikan data (*data interpretation*), artinya membuat kesimpulan dari jawaban-jawaban yang diberikan informan mengenai suatu tema (Alston dan Bowles, 1998, h. 195).

Menurut Patton (2002) sebuah penelitian dapat juga menggunakan lebih dari satu *sampling strategy*, analisa data juga dapat dilakukan dengan teknik Triangulasi data (h. 247).

Menurut Denzin (1978) ada 4 jenis triangulasi:

1. *Data triangulation*, “the use of a variety of data sources in a study” (penggunaan berbagai macam sumber data dalam sebuah penelitian)
2. *Investigator triangulation*, “the use of several different researchers or evaluator” (penggunaan beberapa peneliti atau evaluator yang berbeda)
3. *Theory triangulation*, “the use of multiple perspectives to interpret a single set of data” (penggunaan berbagai perspektif untuk mengartikan satu set data)
4. *Methodological triangulation*, “the use of multiple methods to study a single problem or program” (penggunaan berbagai metode untuk meneliti sebuah masalah atau program) (Patton, 2002, h. 247).

Menurut Nurlala (1998) uji validasi data dalam penelitian dapat dilakukan melalui:

- a. Triangulasi sumber, yaitu dengan melakukan cross-check kembali informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda atau membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.
- b. Triangulasi metode, yaitu dengan melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data. Selain menggunakan metode wawancara mendalam, dalam penelitian ini juga dilakukan telaah dokumen.
- c. Triangulasi data, yaitu dengan meminta umpan balik dari informan penelitian (Riyanti, 2008, h. 44)

Menurut Pietrzak et al (1990) di perlukan adanya penetapan atau pemilihan kriteria dalam mengases keberhasilan terhadap program. Penetapan atau pemilihan kriteria disesuaikan dengan tipe evaluasi dan metodologi yang dilakukan. Misalnya dalam mengases *input* biasanya di bandingkan dengan *standards of best practice, community needs, program goals*, dan *unit cost*, dalam mengases *process*, biasanya dibandingkan dengan *standards of best practice, agency policy and procedures, agency process goals*, dan *client satisfaction*, sedangkan dalam mengases *outcome*, hasil *outcome* biasanya dibandingkan dengan *test scores, normative test data*, dan standar kinerja dari pihak agency, pemberi dana atau *best practice standards* di lapangan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan lebih dari satu perbandingan jika diperlukan, misalnya *best practice standards* dan *written agency policies* digunakan dengan instrumen audit. Keputusan untuk menggunakan lebih dari satu kriteria tergantung dari keterkaitan sumber pembanding terhadap sumber yang tersedia (h. 37).

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah kebijakan dan peraturan lembaga (*agency policy and procedures*) yaitu indikator kinerja dari program MEDP.

1.5.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian evaluasi ini adalah model evaluasi studi kasus pada dua Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini untuk membandingkan proses pelaksanaan program MEDP di kedua madrasah ibtidaiyah ini karena kedua madrasah ibtidaiyah mendapatkan bantuan *block grant* namun setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *block grant*, ternyata Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu mendapat nilai tinggi sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng mendapat nilai rendah. Dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu diusulkan untuk mendapat tambahan dana *block grant* sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng tidak. Dan Kedua Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Darul Ulum, Sambeng berlokasi dekat Sekolah Dasar Negeri, tetapi tetap menjadi pilihan utama bagi orangtua siswa untuk menyekolahkan anak mereka di sana. Sedangkan secara geografis Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu

berada pada bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu, sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng berada pada bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro (KPDE Lamongan, 2008). Dan berdasarkan segi penghasilan masyarakatnya, di kecamatan Kembangbahu, pendapatan masyarakatnya tergolong menengah kebawah, sedangkan di kecamatan Sambeng, pendapatan masyarakatnya tergolong rendah.

Oleh karena itu penelitian dilakukan agar dapat di ketahui hambatan-hambatan maupun tehnik-tehnik yang dilakukan masing-masing madrasah agar dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja madrasah agar sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan Proyek MEDP yang telah ditetapkan dalam “*Project Administration Memorandum*” (PAM).

Waktu Penelitian kurang lebih 2 bulan, yaitu sejak minggu keempat bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

Table1.3. Jadwal dan Kegiatan Penelitian

No.	Waktu	Kegiatan
1	23 – 25 April 2012	Administrasi penelitian
2	26 April - 14 Juni 2012	Mengumpulkan data baik melalui wawancara, pengamatan, maupun kajian dokumen
3	15 Juni – 22 Juni 2012	Mengolah dan Menganalisis data

1.6. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu Bab 1 (satu) merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah dan perumusannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik akademis

maupun praktis. Selanjutnya pada bab ini juga dijelaskan metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tipe evaluasi, kerangka pemikiran, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, lokasi dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang merupakan penjelasan tentang teori dan konsep yang relevan dengan topic penelitian yang mencakup penelitian terdahulu yang terkait, teori dan konsep tentang kemiskinan, pembangunan sosial dan hubungannya dengan pendidikan, teori dan konsep pendidikan termasuk pendidikan umum dan pendidikan madrasah, sarana dan prasarana sekolah, kualitas atau mutu pendidikan, manajemen berbasis madrasah (MBM) dan teori evaluasi program itu sendiri.

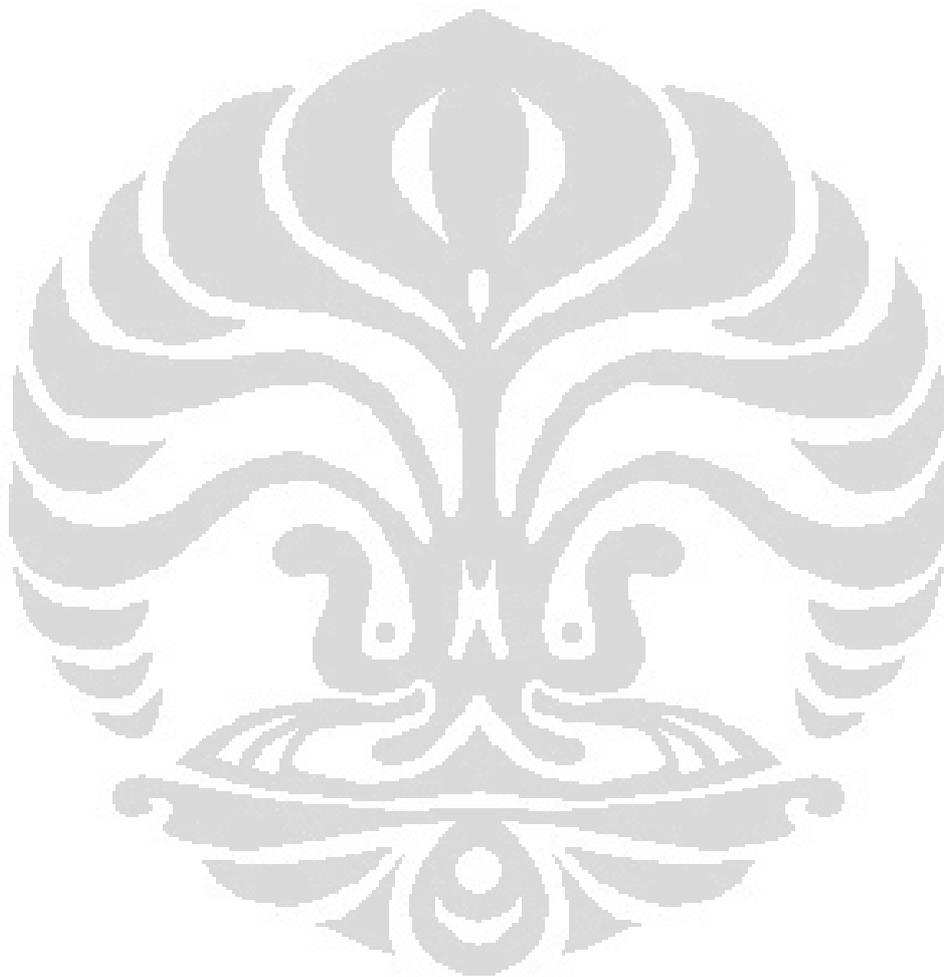
Bab 3 memuat gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng sebagai lokasi penelitian yang meliputi profil madrasah, letak geografisnya dan keadaan pendukungnya. Dalam bab ini disajikan pula gambaran umum program bantuan *block grant* MEDP yang meliputi latar belakang program, tujuan, sasaran program, pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, organisasi pelaksana, tata tertib pengelolaan dana, mekanisme penyaluran dana.

Bab 4 membahas temuan yang berisi fakta, informasi yang bersumber dari wawancara dan kajian terhadap data, dokumentasi dari literatur yang relevan sehingga dapat diketahui *input*, dan proses pelaksanaan program bantuan *block grant* MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng. Pada intinya terdapat dua hasil penelitian yaitu: *Pertama*, hasil penelitian yang mendeskripsikan realitas pelaksanaan program. *Kedua*, hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

Bab 5 memuat analisis hasil temuan penelitian pada Bab 4 dengan pendekatan penelitian evaluatif yang mengacu pada metodologi penelitian serta kerangka teoritik yang mendasari penelitian ini.

Bab 6 merupakan penutup yang dibagi dalam dua sub bab yakni : *Pertama*, kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya.

Kedua, saran yang merupakan rekomendasi hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian ini.p



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mutlak diperlukan untuk mencari landasan teori dan kerangka pemikiran yang jelas tentang objek penelitian. Untuk memberikan pemahaman tentang program bantuan *block grant* ditinjau dari teori dan konsep ilmu sosial, maka pada Bab ini akan diuraikan teori dan konsep yang erat kaitannya dengan program sosial, yaitu teori dan konsep kemiskinan, pembangunan sosial, kualitas atau mutu pendidikan, sarana dan prasarana, dan manajemen berbasis madrasah. Sedangkan untuk kepentingan evaluasinya, akan diuraikan teori dan konsep evaluasi program.

2.1. Teori dan Konsep

2.1.1. Kemiskinan

Terdapat beberapa pengertian/definisi tentang kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan. Pengertian-pengertian tersebut sangat dipengaruhi dan bergantung pada perspektif mana pengertian itu didasarkan. Menurut Chambers (1987) kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh standar hidup minimal atau suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan yang berkaitan dengan minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi dan ketidakberdayaan (h. 8 - 9). Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) merumuskan definisi kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. (BPS,1998, h. 41)

Konferensi Dunia Untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen tahun 1995, merumuskan bahwa kemiskinan dalam arti luas di negara-negara berkembang memiliki wujud yang multidimensi yaitu meliputi: (i) rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, (ii) kelaparan dan kekurangan gizi, (iii) rendahnya tingkat kesehatan, (iv) keterbatasan dan kurangnya akses pada pendidikan dan layanan pokok lainnya, (v) kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, (vi) kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak

memadai, (vii) lingkungan yang tidak aman serta, (viii) diskriminasi dan keterasingan sosial (Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2002).

Indikator kemiskinan menurut Sayogyo (1997) adalah membandingkan pengeluaran perkapita setara beras antara miskin pedesaan dengan miskin perkotaan. Untuk pedesaan seseorang dapat dikategorikan miskin apabila pengeluaran rumah tangganya kurang dari 320 kg nilai tukar beras/orang/tahun, sedangkan untuk perkotaan seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran rumah tangganya di bawah 480 kg nilai tukar beras/orang/tahun (Huraerah, 2008, h. 82).

Kemiskinan dibedakan dengan kemiskinan yang bersifat struktural dan kultural. Kemiskinan struktural dapat dilihat dari kondisi sumberdaya alam suatu wilayah yang minim, peningkatan jumlah penduduk yang cepat dan kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada yang lemah. Sedangkan kemiskinan kultural dilihat dari sikap mental atau mentalitas seseorang yang cenderung malas, tidak mau bekerja keras, hanya menggantungkan nasib kepada alam dan tidak ingin maju. (Sedarmayanti, 2003, h. 24).

Zastrow (1982) menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan dengan menggunakan perspektif dalam sosiologis yaitu perspektif fungsional, perspektif konflik dan perspektif interaksi. (i) Perspektif fungsional yaitu dimana kemiskinan terjadi karena tidak berfungsinya ekonomi atau terjadinya kekacauan ekonomi. (ii) Perspektif konflik yaitu memandang bahwa terjadinya kemiskinan disebabkan banyaknya kekayaan dalam masyarakat modern dan struktur kekuasaan menginginkan kemiskinan tetap ada. Sedangkan (iii) Perspektif interaksi melihat bahwa kemiskinan terjadi karena interaksi dalam masyarakat yang tidak sehat yang menyebabkan seseorang menjadi miskin (Wingnjosoebroto, 1995, p. 40).

Menurut Raharjo (1995) secara spesifik mengemukakan bahwa kemiskinan di Indonesia terjadi karena disebabkan oleh tingginya angka pengangguran akibat tidak tersedia lapangan kerja dan terjadinya pemutusan hubungan massal, upah gaji di bawah standar minimum, produktivitas rendah, kepemilikan asset yang rendah, diskriminasi, tekanan harga dan penjualan tanah (Jamasy, 2004, h. 37).

Dari konsep-konsep kemiskinan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu merupakan suatu keadaan serba kekurangan yang disebabkan

ketidakmampuan memperoleh standar hidup minimal, yang diakibatkan oleh terbatasnya modal, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya serta terbatasnya kesempatan untuk berperan dalam pembangunan.

Secara politik, karakteristik penduduk miskin adalah tidak adanya akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, secara system tersingkir dari institusi utama pada masyarakat, secara ekonomi kualitas sumber daya manusianya rendah dan kepemilikan asset ekonomi rendah, dan secara budaya terperangkap dalam etos kerja yang rendah, berfikiran pendek dan fatalisme. (Chambers, 1988, h. 1-17)

Karakteristik keluarga miskin oleh Blum dan Rossi (1968) di gambarkan sebagai berikut :

- Partisipasi angkatan kerja: menganggur dalam waktu lama dan/atau sementara dan bantuan pemerintah seringkali dijadikan sebagai sumber pendapatan utama.
- Partisipasi kerja: pekerja dengan keterampilan rendah seperti pembantu rumah tangga, buruh tidak terampil, buruh kasar dan buruh tani.
- Keluarga dan hubungan pribadi: tingginya kasus perkawinan yang retak, seperti perceraian, melarikan diri, berpisah dan tingginya insiden kekerasan pada perempuan.
- Partisipasi pembangunan: tinggal di wilayah yang sangat miskin dan rendahnya partisipasi.
- Hubungan dengan masyarakat luas: kurang mempunyai pengetahuan dan terasing dari masyarakat luas.
- Orientasi nilai: merasa tidak berdaya, rendah diri, mempunyai pandangan fundamentalis dalam beragama dan mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap hal yang ghaib (Wingjosoebroto, 1995, h. 51-52)

Empat karakteristik penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan oleh Emil Salim (1984) di kemukakan sebagai berikut: *Pertama*, tidak mempunyai

produksi seperti tanah, modal dan keterampilan. *Kedua*, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. *Ketiga*, tingkat pendidikan rendah. *Keempat*, kebanyakan tinggal di pedesaan (Sumodiningrat, 1999, p. 15).

Sedangkan berdasarkan karakteristik demografi menurut Tjiptoherijanto (2002, h. 12-21), kondisi kemiskinan di Indonesia adalah: semakin miskin suatu keluarga maka semakin besar jumlah anggota keluarga yang dimiliki. Dalam hal karakteristik ekonomi 66,75 persen penduduk miskin mempunyai pekerjaan sebagai petani lahan sempit, buruh tani dan nelayan bukan pemilik kapal. Dan dalam karakteristik budaya 70 persen penduduk miskin tidak pernah sekolah atau tidak menamatkan sekolah dasar dan hanya 6,8 persen penduduk miskin yang menamatkan pendidikan stingkat SLTP.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa rendahnya pendidikan merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Oleh karena itu masalah yang berkaitan dengan pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat miskin bisa mengakses layanan pendidikan dengan mudah sehingga secara perlahan taraf kehidupan mereka meningkat (hidupnya berdaya).

2.1.2. Pembangunan Sosial dan hubungannya dengan pendidikan

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang pembangunan sosial, terlebih dahulu dikemukakan pengertian pembangunan itu sendiri. Menurut Hadad (1980) ditinjau dari aspek historis, istilah “pembangunan” disamakan dengan “perubahan”. Kedua istilah ini memiliki sisi positif dan negative, tergantung kepada apa dan siapa yang akan dirubah dan bagaimana perubahan itu dilakukan (p. 4).

Pembangunan menurut Katz (1971) merupakan proses perubahan yang terencana dari suatu kondisi nasional tertentu ke kondisi nasional yang lain yang lebih tinggi (Tjokrowinoto, 1995, p. 1). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya perubahan menuju keadaan dan situasi yang lebih baik.

Menurut Korten (1981) pembangunan adalah: “Proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional

mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan untuk mendapatkan kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri” (Tjokrowinoto, 1996, p. 11).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembangunan dilaksanakan bukan hanya untuk mencapai keberhasilan yang bersifat ekonomi saja, namun termasuk juga pemenuhan terhadap kebutuhan yang sifatnya sosial, mental dan spiritual.

Menurut Hill (1996) indikator-indikator pembangunan ekonomi tidak akan berarti jika tidak memperhatikan indikator-indikator pembangunan sosial. Maksudnya adalah, pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi tidak akan banyak mendatangkan manfaat tanpa diimbangi dengan peningkatan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang sering disebut dengan pembangunan sosial (h. 27).

Midgley (1995) mendefinisikan pembangunan social sebagai:

“a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development”(h. 25). (suatu proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi).

Pembangunan sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang dimulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Dale (2004) Pembangunan, dalam hal ini pembangunan sosial, adalah suatu proses perubahan sosial yang menghasilkan keuntungan untuk masyarakat, atau suatu kondisi dimana tercapai kualitas kehidupan melalui sebuah proses. Pembangunan yang berkonsep pengembangan masyarakat (*people-focused concept*), berorientasi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan

manusia (*people-related problems*). Secara luas masalah manusia dapat di kategorikan sebagai “Kemiskinan”. Kemiskinan dapat diartikan sebagai memiliki sedikit kekayaan, pendapatan rendah, atau kekurangan makanan, atau minimnya uang kontan dan makanan (h. 21-23).

Secara singkat Dale (2004) merangkum dimensi pembangunan sebagai berikut:

- Secara ekonomi -- pendapatan atau yang berhubungan dengan pendapatan, yang di nyatakan melalui Gross Domestic Product (GDP) per kapita, penyebaran pendapatan, tingkat pengangguran, dsb.
- Secara sosial -- yaitu bermacam aspek sosial kemanusiaan, dilihat melalui tingkat kelahiran, kematian, peningkatan jumlah peserta masuk sekolah, kesehatan, jaminan sosial, dsb.
- Ketergantungan vs ketidak tergantungan -- Kebebasan dalam memilih jalan kehidupan sendiri, yaitu dilihat dari tingkat kompetisi terhadap sumberdaya yang langka, atau tingkat kesetaraan gender, etc.
- Marginalisasi vs posisi terintegrasi -- Tingkat participasi dalam kancan pasar, politik dan kehidupan sosial, dan jaminan sosial.
- Kebebasan dari kekerasan
Dimana individu atau kelompok dapat hidup tanpa takut akan adanya perlakuan yang tidak baik (*maltreatment*), baik dalam keluarga maupun lingkungannya.
- Tingkat kepuasan mental -- dimana terdapat ketenangan jiwa, sehingga mampu untuk memperkaya kehidupannya melalui stimulan yang tak terbayangkan
- Keselamatan vs sikap berorientasi pembangunan -- posisi, kemampuan dan kesempatan dalam lingkungan baik pada tingkat sosial, rumah tangga maupun individual (h. 22-23).

Lebih lanjut, Midgley (2005) mengatakan bahwa pembangunan sosial adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan

pembangunan ekonomi tidaklah bermakna (*meaningless*) kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial sebagai suatu kesatuan (h. 54).

Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Midgley (1995) mengemukakan bahwa ada tiga strategi besar yaitu :

1. Pembangunan sosial melalui individu (*Social Developmentt by individuals*), di mana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah kepada pendekatan individualis atau perusahaan (*individualist or enterprise approach*).

2. Pembangunan sosial melalui komunitas (*Social Development by Communitiies*), di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).

3. Pembangunan sosial melalui pemerintah (*Social Development by Goverments*), di mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*government agencies*) Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach* (Adi, 2008, h. 54-55).

Untuk merubah perilaku individu dan kelompok dalam suatu pembangunan sosial diperlukan adanya produk sosial yang inovatif, karena para praktisi di bidang ini dituntut untuk melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kebutuhan masyarakat yang berkesinambungan (Adi, 2003, h. 52). Produk sosial itu sendiri menurut Kotler (1981) dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :1) gagasan (*ideas*), 2) praktek (*practice*), dan 3) bentuk yang nyata (*tangible product*) (h. 47).

Menurut Adi (2003, h. 53) Upaya pembangunan sosial pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Karena menurut Shardlow (1998):

“Empowerment is centrally aboaut people taking control of their own lives and having the power to shape their own future” (Adi, 2003, p. 54). (Pemberdayaan pada intinya adalah bagaimana masyarakat mengontrol kehidupannya dan mempunyai kekuatan untuk membentuk masa depannya sendiri).

Demikian juga Jim Ife (1995) mengemukakan bahwa:

“Empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skill to increase their capacity to determine their own future and to participate in and effect the life of their community” (h. 182). (Pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan mereka, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial merupakan upaya yang terencana dan terarah baik yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas maupun pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui upaya penyiapan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Korten (1990) mengungkapkan bahwa pembangunan yang berpusat pada rakyat menyadari bahwa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non material yang penting melalui redistribusi atau kepemilikan (Adimiharja dan Hikmat, 2001, h. 10).

Pembangunan yang berpusat pada rakyat pada dasarnya merupakan pendekatan yang memandang inisiatif dan kreatifitas dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan. Konsep ini adalah sebagai kritik atas kekurangan model-model pembangunan konvensional, baik yang sosialis maupun kapitalis yang begitu memusatkan perhatian pada produk, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat (Suharto, 1997, h. 69).

Logika dominan dari pendekatan ini adalah logika mengenai suatu ekologi manusia yang seimbang, dengan sumber daya utama berupa sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang berkelanjutan, serta tujuan utamanya adalah perkembangan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia

Menurut Goulet (1995):

“ *people centered social development is ultimately to provide all humans with the opportunity to live full human lives*” (Adi, 2008, h. 72) (Pembangunan sosial yang berpusat pada manusia tujuan utamanya adalah menyediakan pada seluruh lapisan masyarakat kesempatan untuk hidup secara utuh). Hal ini juga searah dengan tujuan dasar pembangunan di Indonesia, yaitu ingin menciptakan manusia seutuhnya.

Pandangan ini pada dasarnya akan mengarah pada pendekatan pembangunan sosial yang berpusat pada manusia dan nilai-nilai dalam masyarakat (*value based people centered development*). Menurut Goulet (1995) nilai-nilai dasar yang dianggap universal dalam pendekatan *value based people centered development* adalah :

- a. Partisipasi (*participation*)
- b. Kestinambungan (*sustainability*)
- c. Integrasi sosial (*social integration*)
- d. Hak-hak dan kemerdekaan asasi manusia (*human rights and fundamental freedoms*). (Adi, 2008, h. 72-73)

2.1.3. Pendidikan

Beberapa pengertian tentang pendidikan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut (Wawan, 2010):

Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, 1889 - 1959) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya”.

John Stuart Mill (filosof Inggris, 1806-1873 M) menjabarkan bahwa Pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan.

Pendidikan, menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada vtuhan, seperti

termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

John Dewey, mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan social. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup.

Hal senada juga dikemukakan oleh Edgar Dalle bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

Thompson mengungkapkan bahwa Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.

Ditegaskan oleh M.J. Longeveled bahwa Pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Prof. Richey dalam bukunya 'Planning for teaching: An Introduction to Education' menjelaskan Istilah 'Pendidikan' berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi baru) bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

Ibnu Muqaffa (salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup tahun 106 H-143 H, pengarang Kitab Kalilah dan Daminah) mengatakan bahwa: "Pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santaan akal dan rohani."

Plato (filosof Yunani yang hidup dari tahun 429 SM-346 M) menjelaskan bahwa Pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat.

Pendidikan memberi peluang kepada setiap orang untuk dapat berbuat lebih baik bagi diri maupun lingkungannya. Pendidikan memberikan kesempatan untuk dapat meningkatkan mutu hidup dan kehidupan, meningkatkan kesejahteraan, menurunkan kemiskinan, mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan mampu memberikan dorongan kearah yang lebih kondusif untuk pencerahan masa depan.

Pendidikan dalam kontek hidup dan kehidupan manusia memiliki dimensi ekonomi dan sosial, secara ekonomi pendidikan dapat berfungsi sebagai instrument mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, secara sosial pendidikan dapat membangkitkan kebersamaan dan munculnya keinginan untuk dihormati hak dan kewajibannya sebagai bagian dari warga masyarakat (Rivai, dkk: 778). Pendidikan juga meningkatkan kemampuan warga masyarakat, dengan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Kecenderungan yang ditampilkan setiap individu selalu ditentukan oleh hasil dan proses pendidikan yang dialami atau yang dilaluinya.

2.1.3.1 Pendidikan Sekolah Umum dan Pendidikan Madrasah

Menurut Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003, pasal 15, Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi dan pendidikan tinggi. Pendidikan Madrasah merupakan jenis pendidikan keagamaan yang memiliki kurikulum yang berbeda dengan sekolah umum.

Perbedaannya terletak pada jumlah dan jenis mata pelajaran di madrasah dan di sekolah umum. Perbedaan tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

2.1.3.1.1. Pendidikan Sekolah Umum:

a. Kurikulum

- 1) Memiliki kurikulum tetap dan mengikuti perkembangan serta menyesuaikan dengan standar pendidikan Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah (Permendiknas no 22 tahun 2006).
- 2) Memiliki buku ajar yang permanent untuk proses belajar mengajar yang efektif.
- 3) Satuan Pelajaran yang sudah ditetapkan menjadi acuan dalam proses belajar-mengajar

b. Mata Pelajaran agama Islam

- 1) Jam mata pelajaran agama islam pada pendidikan sekolah umum hanya 3 Jam.
- 2) Mata pelajaran agama Islam pada sekolah umum hanya mencakup pelajaran agama islam secara umum, tidak meliputi: 1) Qur'an Hadits; 2) Fikih; 3) Akidah Akhlak; 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); dan 5) Bahasa Arab

2.1.3.1.2. Pendidikan Madrasah

a. Kurikulum

- 1). Madrasah membuat dan menentukan kurikulum dengan berdasarkan Permenag no 2 tahun 2008 ditambah dengan kurikulum yang mengikuti standar pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah (Permendiknas no 22 tahun 2006)
- 2) Komposisi pendidikan agama islam adalah 30% dan pendidikan umum 70%.

b. Mata Pelajaran agama Islam

- 1) Jam mata pelajaran agama islam pada pendidikan madrasah jumlahnya bisa mencapai 10 Jam.
- 2) Mata pelajaran agama Islam pada madrasah meliputi : 1) Qur'an Hadits; 2) Fikih; 3) Akidah Akhlak; 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); dan 5) Bahasa Arab.

2.1.4. Sarana dan Prasarana Sekolah

Menurut Mulyasa (2004) Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar, seperti gedung ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran (h. 49). Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan, Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar-mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien” (Arikunto, 1993, h. 81-82)

Menurut Ibrahim Bafadal (2008), prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah (h. 3).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum” , sebuah SD/MI sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana sebagai berikut:

1. Ruang kelas: harus sesuai ukurannya seperti yang ditetapkan dalam PermenDiknas No. 24 tahun 2007, tentang standar sarana dan prasarana sekolah/Madrasah Pendidikan umum.

Fungsi ruang kelas adalah untuk tempat kegiatan pembelajaran teori maupun praktek tidak memerlukan peralatan khusus, Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar, Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik, Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m²/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m². Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera

keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Ruang kelas dilengkapi sarana seperti kursi siswa, meja siswa, kursi guru, meja guru, lemari, Rak hasil karya siswa, papan panjang, alat peraga bila ada laboratorium IPA, papan tulis, dan perlengkapan lainnya.

2. Ruang perpustakaan:

Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana seperti Buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi, sumber belajar lainnya, serta didukung oleh adanya rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kerski kerja, lemari katalog, lemari, peralatan multi media, dan perlengkapan lainnya.

3. Laboratorium IPA

Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.

Setiap SD/MI dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti: lemari, model kerangka manusia, model tubuh manusia, globe, model tata surya, dan peralatan IPA sederhana lainnya.

4. Media Pembelajaran

Secara umum media pembelajaran adalah alat bantu *proses belajar mengajar*. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber,

lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / pelatihan. Sedangkan menurut Briggs (1977) *media pembelajaran* adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya. Kemudian menurut *National Education Assosiaton* (1969) mengungkapkan bahwa *media pembelajaran* adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras.

Beberapa jenis media pembelajaran, diantaranya :

1. *Media Visual* : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik
2. *Media Audial* : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya
3. *Projected still media* : slide; over head proyektor (OHP), in focus dan sejenisnya
4. *Projected motion media* : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer dan sejenisnya.

2.1.5. Kualitas atau Mutu Pendidikan

Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan bangsa tentu bukan hanya sekedar penyelenggaraan pendidikan, tetapi pendidikan yang berkualitas, baik dari sisi *input*, proses, *output*, maupun *outcome*. Maka dari itu, semuanya harus berjalan dengan seimbang agar kualitas pendidikan dapat terwujud sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sendiri.

Menurut Supranta (1997) kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik (h. 288). Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guetsch dan Davis (1994) menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 1995, h. 51)

Kata kualitas seringkali disamakan dengan kata mutu. Terkadang, ada juga yang membedakan antara keduanya. Sebagaimana Tim Dosen Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia bahwa "Mutu adalah gambaran dan karakteristik

menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan”.

Begitu pula orang seringkali berbicara tentang kualitas pendidikan, tetapi yang sebenarnya adalah masih dirasakan kurang jelas pengertian soal itu. Kualitas atau mutu (produk) adalah sesuatu yang dibuat secara sempurna tanpa keculi. Produk yang bermutu memiliki nilai dan prestise bagi pemiliknya. Mutu bersinonim dengan kualitas tinggi atau kualitas puncak. Kualitas ini dapat diberikan pada suatu produk atau layanan yang memiliki spesifikasi tertentu. Kualitas pendidikan menurut Suryadi, Ace dan Tilaar, H.A.R (1993, h. 159) merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.

Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, EBTA atau UAN. Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya (Umaedi, 1994, h. 4). Selain itu kualitas pendidikan merupakan

kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan factor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif.

Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul.

Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa). Hal demikian tidak dapat berhasil tanpa dukungan-dukungan dari manajemen yang terdapat di madrasah, salah satunya yaitu manajemen berbasis madrasah.

2.1.6. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan pengembangan dari konsep “*school based management*” (Manajemen Berbasis Sekolah) yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan madrasah dengan memberikan

keleluasaan otonomi kepada kepala madrasah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja madrasah yang mencakup guru, siswa, komite madrasah, orang tua siswa, dan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2010, h. 7-8)

Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah(MBM):

- Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dengan inisiatif
Prinsip pengelolaan mandiri, yaitu memberikan wewenang kepada madrasah untuk mengelola secara mandiri dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara kolaboratif. Sehingga madrasah dapat mengembangkan tujuan pengajaran, stategi manajemen, distribusi sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya, memecahkan masalah dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi masing-masing madrasah. Sedangkan prinsip inisiatif, potensi sumberdaya manusia harus selalu digali, ditemukan dan kemudian dikembangkan.
- Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat terhadap mutu madrasah
Terdapat hubungan (kerja sama) yang baik antar warga madrasah dan masyarakat dengan dibentuknya komite madrasah yang beranggotakan unsur masyarakat, diharapkan akan mendukung madrasah untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan dan keluaran pendidikan madrasah.
- Meningkatkan tanggung jawab warga madrasah terhadap madrasah
Adanya partisipasi warga madrasah yang tinggi sehingga besar pula tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap madrasah
- Meningkatkan kompetisi yang sehat antar madrasah tentang mutu pendidikan
Madrasah memiliki budaya mutu, yaitu kebutuhan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan bekerjasama antar madrasah
- Meningkatkan prestasi siswa
Iklim yang baik akan mendukung prestasi siswa, karena apabila kepala madrasah, guru, orang tua mempunyai kewenangan dalam mengambil

keputusan maka iklim sekolah akan mendukung usaha peningkatan prestasi siswa

- Meningkatkan profesionalisme guru

Pendidik memiliki kualifikasi akademik serta kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, memiliki keahlian dan pengalaman untuk memutuskan hal terbaik bagi madrasah dan siswa, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam bidang kurikulum, pedagogi pembelajaran dan proses manajemen, dan apabila terlibat dalam proses tersebut akan lebih termotivasi dan berkomitmen tinggi

- Penerapan reformasi kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum, daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan silabus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah.

Dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Madrasah (shaututtarbiyah, 2009) madrasah diharapkan dapat memenuhi standard pendidikan nasional yang telah ditetapkan yaitu dengan menerapkan:

1. Kurikulum yang kondusif

Sesuai dengan prinsip otonomi, satuan pendidikan menyusun sendiri kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) sesuai dengan kebutuhan madrasah dengan mengarus-utamakan kualitas hati, mengarus-utamakan kompetensi logika, mengarus-utamakan kompetensi estetis, menerapkan sistem kredit, jika *feasible*. menerapkan sistem penyempurnaan ktsp berkelanjutan, menerapkan praktek-praktek terbaik yang sudah terbukti dari satuan pendidikan lain

2. Proses belajar mengajar yang efektif

Proses belajar mengajar diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan, kesadaran pemanfaatan lingkungan, baik fisik maupun sosial.

3. Lingkungan madrasah yang kondusif dan islami

Pelaksanaan MBM perlu di dukung oleh iklim/lingkungan madrasah yang kondusif dan islami bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman

dan tertib sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan (enjoyable learning).

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya
 Madrasah diharapkan menciptakan kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan yang professional, sehingga mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.
5. Standarisasi dalam hal-hal tertentu, seperti monitoring evaluasi dan tes
 Melakukan monitoring terhadap hasil rencana manajemen kualitas, proses manajemen kualitas data, koordinasi penyediaan rantai informasi, perencanaan perbaikan proses, pengukuran kinerja proyek, manajemen perubahan proyek, mengumpulkan data kinerja (pengukuran) dan menganalisa, mereview dan melaporkan data tersebut
6. Memiliki otonom kewenangan, kekuasaan/kewenangan ilmu pengetahuan, informasi dan penghargaan.
 Madrasah perlu mengembangkan pembagian kekuasaan/wewenang dan tanggung jawab yang di bagi habis dan tiak tumpang tindih, secara proporsional dan profesional. .
7. Peran serta masyarakat
 Masyarakat turut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan
8. Kepemimpinan yang kuat
 Pemimpin yang memiliki kharisma, dan terdapat hubungan yang timbal balik antara segenap pendidik, dan tenaga kependidikan sehingga memberikan rasa aman, percaya diri dan saling percaya dalam bekerja.
9. Pengambilan keputusan yang demokratis
 Dalam mengambil keputusan, madrasah melibatkan semua pihak dan dilakukan secara terbuka.
10. Semua pihak harus memahami tugas dan tanggung jawabnya

Terdapat pembagian tugas dan pengaturan terhadap masing-masing tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah

11. Adanya guideline mencapai efektifitas dan efisiensi

Dalam menggunakan sumberdaya madrasah yaitu: anggaran, personil dan fasilitas dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi

12. Madrasah memiliki transparansi dalam akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas publik bagi para pengambil kebijakan di madrasah dan semua pemangku kepentingan dan pemegang saham madrasah yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, moral, administratif dan financial secara transparan dan tepat.

13. Pencapaian kinerja madrasah dan prestasi hasil belajar yang tinggi

Kinerja madrasah bukan hanya dinyatakan dengan hasil test, namun juga perubahan sikap, kemampuan peserta didik, daya saing di pasar kerja dan lain sebagainya.

Adapun indikator-indikator keberhasilan Manajemen Berbasis Madrasah (shaututtarbiyah, 2009) adalah:

1. Meningkatnya Jumlah siswa yang mendapatkan layanan
Meningkatnya siswa kurang mampu memperoleh kesempatan sekolah
2. Kualitas layanan pendidikan semakin meningkat
Jaminan mutu terhadap hasil keluaran madrasah .
3. Jumlah siswa tinggal kelas menurun dan produktifitas madrasah meningkat
Jumlah drop out dan pengulangan menurun, penerimaan murid meningkat
4. Program madrasah dibuat bersama dengan warga dan tokoh masyarakat
Program dikembangkan secara bersama akan memberi manfaat bagi semua pihak.
Ketika madrasah tidak memiliki dana, madrasah harus mampu menunjukkan kontribusi dalam bentuk lain.
5. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan

Tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

6. Meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan

Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi orangtua dan masyarakat.

7. Semakin baik iklim dan budaya madrasah sesuai dengan pengembangan ciri khas yang merupakan identitas madrasah

Adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap madrasah yang positif

8. Kesejahteraan guru meningkat

Dengan meningkatnya profesionalisme guru, akan meningkatkan pula pendapatannya

9. Demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan

Sistem yang terbentuk dimana didalamnya terdapat kesamaan hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan penyelenggaraan pendidikan madrasah dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pada dasarnya Manajemen Berbasis Madrasah dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di madrasah, yang diikuti dengan pendelegasian wewenang dan urusan pada madrasah. Tujuan yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan madrasah, kualitas pendidik (relevansi dan profesionalitas) dan kualitas lulusan madrasah. Acuan keberhasilan MBM yang digunakan adalah terakreditasinya madrasah, terakreditasinya pendidik sebanyak 80% dari jumlah pendidik, dan tingkat kelulusan siswa yang mencapai 99% sampai pada akhir 2014.

2.1.7. Evaluasi Program

2.1.7.1. Pengertian Evaluasi Program

Menurut Patton (1997) pengertian evaluasi program adalah :

“*Program evaluation is the systematic collection of information about the activities, characteristics, and outcomes of programs to make judgments about program, improve program effectiveness, and/or inform decisions about the future programming*”(h. 23). (Evaluasi program adalah pengumpulan informasi yang sistematis tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektifitas program, dan/atau menginformasikan keputusan tentang program masa depan).

Definisi tersebut di atas mengandung tiga komponen yang saling berhubungan, Patton (1997) yakni :

- a. *The systematic collection of information* (pengumpulan informasi yang sistematis)
- b. *A potentially broad range of topics* (suatu topik luas yang potensial)
- c. *For a variety of possible judgment and use* (untuk penilaian dan penggunaan yang bervariasi (h. 24).

Sedangkan Hawe (1990) mendefinisikan evaluasi program sebagai suatu proses efektifitas program atau menentukan nilai atau keberhasilan pencapaian program termasuk pengaruh yang tidak diharapkan (h. 205). Arikunto (1999) mengatakan bahwa evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (h. 290 – 291).

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan *assessment*, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Dunn, 2003, h. 608). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Lebih lanjut Dunn (2003) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) tipe evaluasi, yaitu :

1. Evaluasi Formatif yaitu evaluasi yang meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.
2. Evaluasi sumatif yaitu meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk

jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai produk-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan baik (h. 614).

Sementara Pietrzak, dkk (1990) mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan salah satu tipe yang khusus dari penelitian ilmu terapan. Sebagai sebuah penelitian, pelaksanaan evaluasi program mengikuti pola-pola aktifitas atau tugas-tugas standar. Aktifitas ini ada dalam setiap tipe evaluasi yang meliputi *input, process dan outcome* (h. 21)

Menurut definisi dari World Bank (2004) evaluasi program merupakan penilaian yang sistematis dan seobyektif mungkin suatu proyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau sudah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan dan hasilnya (h. 2).

Evaluasi program merupakan suatu metode penilaian yang sistematis dan seobyektif mungkin terhadap suatu proyek, program dan kebijakan yang sedang berjalan atau sudah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan maupun hasilnya. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efisiensi, efektifitas, dampak dan keberlanjutannya, dimana suatu evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna agar donor serta pihak penerima manfaat dapat mengambil pelajaran untuk proses pengambilan keputusan. (World Bank, 2004, h. 3)

Beberapa alasan mengapa evaluasi program perlu dilaksanakan (Pietrzak dkk., 1990) diantaranya : *Pertama*, bahwa hasil evaluasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program yang selanjutnya menjadi dasar bagi perbaikan program. *Kedua*, evaluasi berfungsi menganalisa dan efektifitas program. *Ketiga*, menilai seberapa luas sebuah keefektivan program baru dan berbagai teori tentang program yang berhasil. *Keempat*, mengembangkan pengetahuan yaitu menemukan atau menguji teori umum, preposisi dan hipotesa dalam lingkup kebijakan dan program (h. 10).

Hikmat (2004) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek (h. 3). Sementara Suharto (2008) menjelaskan evaluasi dapat mengarah pada perbaikan-perbaikan, evaluasi

juga dapat menghasilkan keputusan-keputusan untuk mengganti secara total model yang ada (h. :111).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dari suatu program secara sistematis yang bertujuan untuk mengukur atau menilai program, meningkatkan keefektifan program, dan/atau mengambil keputusan tentang program dimasa yang akan datang.

2.1.7.2. Tujuan Evaluasi Program

Secara umum tujuan evaluasi program adalah (i) menentukan pembenaran suatu intervensi dan manfaatnya, (ii) merumuskan kebijakan, (iii) pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Dehar et.al., 1993).

Secara rinci Gosling (1995) menjelaskan bahwa tujuan evaluasi program adalah:

a. Untuk menemukan dampak suatu kegiatan pada masyarakat, siapa yang mendapat manfaat, apakah kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, apakah kegiatan memiliki dampak yang tidak dirasakan oleh masyarakat, apakah perubahan pada target populasi disebabkan oleh dari luar seperti perubahan politik, kegiatan pembangunan, bencana alam dan lainnya, siapa yang menerima keuntungan kegiatan dan bagaimana keuntungan kegiatan didistribusikan pada kelompok yang berbeda.

b. Untuk mengkaji apakah dampak yang terjadi disebabkan oleh kegiatan atau lainnya, apakah maksud dan tujuan kegiatan masih relevan, apakah ini merupakan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan, apakah kegiatan berjalan dengan efisien, apa masalah dan kendala yang terjadi, apakah anggaran yang dibelanjakan sesuai konteks dan masuk akal, apakah sumber daya digunakan secara efektif dan tepat, apakah perubahan pada target populasi disebabkan oleh kegiatan yang relevan, apakah kegiatan dapat dilanjutkan dan apa yang menyebabkan kegiatan dapat dilanjutkan.

c. Merumuskan rekomendasi tentang bagaimana program dapat ditingkatkan, tentang bagaimana maksud dan tujuan dapat dimodifikasi dan direvisi, tentang

bagaimana kegiatan dapat dimonitor dan dievaluasi pada masayang akan serta tentang bagaimana kegiatan dapat dilaksanakan lebih efektif dari segi pembiayaan (*cost effective*) (h. 105-106)

Pada prinsipnya Evaluasi program dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan, *pertama* : Memilih atau menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana evaluasi perlu dilaksanakan karena pertimbangan ketersediaan dana walaupun dana yang tersedia cukup tapi dibutuhkan lebih dari sekedar uang untuk memecahkan permasalahan yang kompleks (Patton, 1997, h. 11), *kedua* : Untuk menilai atau mengukur kegiatan yang sedang ataupun yang telah selesai dilaksanakan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, memecahkan masalah yang tidak terduga dan meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan mengarah pada hasil yang diharapkan. Selanjutnya evaluasi terhadap kegiatan yang telah selesai dimaksudkan untuk mengukur/menilai efektivitas keseluruhan pelaksana program, kinerja, capaian dan hasil program, sehingga dapat dibuat keputusan mengenai kelanjutan program (Patton, 1997, h. 67 – 69)

Sedangkan Mark, Henry dan Julnes (2000) mengemukakan empat tujuan evaluasi program, yaitu :

- a. Menilai kekuatan dan kelemahan program, mengembangkan penilaian terhadap nilai suatu kebijakan program pada level individu atau masyarakat.
- b. Peningkatan organisasi dan program, upaya menggunakan informasi secara langsung untuk memodifikasi dan meningkatkan pelaksanaan program.
- c. Menilai seberapa luas sebuah program sesuai dengan undang-undang, regulasi, aturan dan mandate atau harapan
- d. Mengembangkan pengetahuan, menemukan atau menguji teori, preposisi, dan hipotesa dalam lingkup kebijakan dan program (h. 13).

Menurut Rubbin dan Babbie (2008) evaluation program mempunyai 3 tujuan utama: (1) untuk mengasses keberhasilan program, (2) untuk mengasses masalah bagaimana program dilaksanakan, dan (3) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam perencanaan program dan pengembangannya (h. 306).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk meningkatkan efektivitas kegiatan dan untuk

menilai/mengukur suatu program, kegiatan, proyek yang telah dilaksanakan dan untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang agar lebih efektif dan efisien.

2.1.7.3. Tipe Evaluasi Program

Dalam penelitian evaluasi dikenal dua tipe evaluasi, yaitu (a) evaluasi formatif dan (b) evaluasi sumatif.

a. Evaluasi formatif.

Menurut Rubin dan Babbie (2008):

“Formative evaluation, are not concerned with testing the success of a program. They focused instead on obtaining information that are helpful in planning the program and in improving its implementation and performance” (h. 306). [Evaluasi formatif tidak memperhatikan kesuksesan suatu program. Tapi berfokus pada mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan program dan meningkatkan pelaksanaan dan kinerjanya].

Evaluasi formatif berfokus pada menyediakan informasi bagi perencana dan pelaksana program tentang bagaimana meningkatkan dan memperbaiki program yang dikembangkan atau yang dijalankan). (Herman, Moris dan Gibbon, 1990): *“Formative evaluation which focus on providing information to planners and implementers on how to improve and refine a developing or on going program”* (h. 16). [Evaluasi formatif berujuan untuk memberikan masukan bagi perencana untuk peningkatan program yang sedang dilaksanakan].

Evaluasi formatif berfungsi untuk menyesuaikan dan meningkatkan intervensi. Evaluasi ini tidak digunakan untuk membuktikan apakah suatu program berhasil atau gagal, tetapi lebih untuk memandu keberlangsungan program. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengorganisir informasi penting untuk peningkatan program. Evaluasi formatif sering diterima lebih baik oleh agen pengorganisir dari pada format evaluasi lain (Royse dan Thyer, 1996, h. 51 – 52).

Evaluasi formatif menurut Patton (1991) adalah:

“Formative evaluations in contrast, focus on ways of improving and enhancing programs not only in their initial development but at any point in the

life of a program. Formative evaluations rely more heavily on site visits, direct observation of program activities, surveys, and in depth interview. Formative evaluations can also be based on information system that monitor program efforts and outcomes regularly over time to provide feedbacks for fine-tuning the program” (h. 66). [Evaluasi formatif difokuskan pada bagaimana meningkatkan program tidak hanya pada pengembangan program tapi juga pada menghidupkan sebuah program. Informasi yang diperoleh dalam evaluasi pada evaluasi formatif umumnya digunakan oleh staf dan administrator program. Evaluasi formatif bersandarkan kepada kunjungan ke lapangan, observasi, survey dan wawancara mendalam tentang pelaksanaan program. Evaluasi formatif juga dapat didasarkan pada informasi yang memonitor upaya dan outcome program secara berkala untuk perbaikan program].

Tujuan evaluasi formatif menurut Chamber (1994) adalah menyediakan umpan balik pada suatu pengembangan program yang berkelanjutan. Oleh karena itu evaluasi formatif sewajarnya diselenggarakan saat berjalannya suatu program bukan pada akhir program (h. 32).

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif menurut Rubin dan Babbie (2008) memperhatikan kesuksesan suatu program dan keberlanjutan program sangat tergantung pada hasil evaluasi tersebut (h. 306). Menurut Patton (1991):

“Summative evaluations are aimed at determining the essential effectiveness of programs and are particularly important in making decisions about continuing or terminating an experimental program or demonstration project. As such, summative evaluations are often useful to funders. Summative evaluation typically seek to draw causal inferences about the effect of a program; the preferred design is experimental and outcomes are measured statistically” (h. 65 - 66). [Evaluasi sumatif ditujukan pada penentuan keefektifan program yang essential dan untuk kepentingan pengambilan keputusan tentang kelanjutan atau diberhentikannya sebuah program atau proyek. Sebagaimana dikemukakan, evaluasi sumatif sangat berguna bagi pemberi dana. Evaluasi sumatif secara khusus menggambarkan hubungan sebab akibat tentang hasil program; mengarah pada rancangan eksperimental dan outcome yang diukur secara statistic].

Selain dua tipe evaluasi program di atas, pada penelitian evaluasi dikenal juga tipe evaluasi implementasi. Patton (1990) mengemukakan bahwa evaluasi implementasi memfokuskan pada upaya untuk mengetahui tentang apa yang program sedang lakukan. Evaluasi implementasi memfokuskan pada jawaban atas pertanyaan :”apa yang klien lakukan dalam pelaksanaan program?”, “layanan apa yang disediakan untuk klien?”, “apa yang staf kerjakan?”, dan “bagaimana program diorganisir?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa evaluasi program memperhatikan komponen input, aktivitas, proses dan struktur. Evaluasi implementasi dapat menginformasikan kepada pengambil keputusan tentang bagaimana program berjalan, bagaimana program diorganisir dan bagaimana serta mengapa program melenceng dari harapan? (h. 105).

Patton (1997) juga mengemukakan bahwa ada lima tipe evaluasi implementasi, yaitu :

a. Evaluasi upaya (*Effort Evaluation*)

Evaluasi upaya memfokuskan pada pembahasan kualitas dan kuantitas aktivitas yang terjadi, yang bertujuan untuk menentukan level aktifitas sebuah program. Hal tersebut dilakukan melalui pengamatan tentang derajat input yang tersedia dan selanjutnya dioperasionalisasikan pada derajat yang diharapkan. Pertanyaan-pertanyaan pada evaluasi ini misalnya : “apakah staf memiliki kualifikasi yang tepat?”, “Bagaimana rasio klien dan staf?”, “Berapa dan bagaimana karakteristik klien?”, “Bagaimana sarana dan prasarannya?”. Sebuah evaluasi upaya juga berkaitan dengan pembuatan inventarisasi operasional program.

b. Pengawasan Program : Informasi Manajemen Berkala (*Monitoring Program : Routin Management Information*)

Cara yang sangat penting dalam pengawasan implementasi program dan biasanya menjadi tanggung jawab internal evaluator adalah *Management Information System* (.sistem Informasi manajemen). MIS berisi data-data yang berkaitan dengan aktifitas program yang bersifat rutin. Data tersebut misalnya tentang intake klien, tingkat partisipasi, tingkat penyelesaian program, beban kasus, karakteristik klien, dan biaya program. MIS memiliki perangkat keras dan

lunak yang bereaksi dan saling memberikan pengaruh jangka panjang terhadap program.

c. Evaluasi Proses (*Proses Evaluation*)

Evaluasi proses menekankan pada dinamika internal dan aktivitas actual dari sebuah program, dan bertujuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan program. Fokus pertanyaan pada evaluasi proses adalah mengapa terjadi sesuatu, bagaimana bagian-bagian dari sebuah proses bekerja sama, dan bagaimana orang-orang merasakan manfaat program tersebut. Pendekatannya adalah bagaimana produk atau outcome tersebut dihasilkan dan bukan sekedar pada melihat produk itu sendiri (h. 137 – 142).

Beberapa penjelasan tentang evaluasi proses menurut Patton (1997) adalah :

- Berupaya untuk mencari penjelasan tentang keberhasilan kegagalan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada program, serta untuk memahami dan mendokumentasikan realitas aktifitas program sehari-hari.
- Tidak hanya melihat aktifitas formal dan outcome yang diperkirakan tapi juga menyelidiki pola-pola informal dan konsekuensi yang tidak terantisipasi dalam keseluruhan konteks implementasi dan pengembangan program.
- Biasanya meliputi persepsi orang-orang yang dekat dengan program tentang bagaimana komponen program bekerja.
- Dapat menghadirkan umpan balik (*feedback*) yang cukup berguna selama fase pengembangan program (h. 139).

d. Evaluasi Komponen (*Component Evaluation*)

Pendekatan komponen dalam evaluasi implementasi meliputi assessment formal terhadap bagian-bagian yang nyata dari sebuah program,. Program dapat dikonseptualisasikan secara terpisah yang terdiri dari bagian-bagian operasional tersendiri sehingga dapat menjadi evaluasi implementasi.

e. Spesifikasi Perlakuan (*Treatment Specification*)

Pendekatan *treatment specification* berkaitan dengan identifikasi dan pengukuran yang bersifat pasti dari sebuah program dan diharapkan memiliki

pengaruh tertentu. *Treatment specification* bersifat spesifik untuk mengukur derajat tertentu dalam suatu perlakuan.

Untuk menjamin bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan dapat bermanfaat, layak diterapkan dan dilakukan secara transparan dan etis. *Joint Commite Standard for Evaluation* dalam Patton (1997) mengemukakan standar evaluasi sebagai berikut :

- *Kegunaan/Utility*. Standar kegunaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu evaluasi akan melayani kebutuhan informasi praktis bagi para pemakai.;
- *Kelayakan/Feasibility*. Standar kelayakan dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu evaluasi akan realistis, bijaksana, diplomatis dan hemat.
- *Kebenaran/Propriety*. Standar kebenaran dimaksudkan untuk memastikan suatu evaluasi akan diselenggarakan menurut hukum, secara etis dan menghormati kesejahteraan orang oleh hasil evaluasi tersebut.
- *Ketelitian/Accuracy*. Standar ketelitian dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu evaluasi akan mengungkapkan dan menjelaskan informasi teknis yang cukup tentang corak yang menentukan manfaat atau kebaikan menyangkut program yang sedang dievaluasi (h. 17).

Selanjutnya seorang evaluator dalam melakukan evaluasi program harus mengikuti prinsip penuntun sebagai berikut :

- Pemeriksaan sistematis, artinya evaluator secara sistematis melakukan pemeriksaan pusat data program yang sedang dievaluasi.
- Kemampuan, artinya evaluator harus menyiapkan dan menunjukkan kompetensinya pada *stakeholder* yang dihadapi.
- Integritas dan kejujuran, artinya evaluator menjamin intyegritas dan kejujuran keseluruhan proses evaluasi
- Menghormati orang, artinya evaluator harus menghormati keamanan, martabat dan harga diri responden, peserta program, klien dan *stakeholder* lainnya.

- Bertanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, artinya evaluator harus mengartikualsikan dan mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai yang mungkin berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. (Patton, 1997, h. 21)

Di samping prinsip-prinsip di atas seorang evaluator harus menyertai hasil evaluasinya dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman, menyajikan kerangka kerja yang berdasarkan standard dan prinsip evaluasi, serta mengacu pada prinsip sistematis, berdasarkan data, kompetensi sikap, jujur dan mempunyai integritas. Seorang evaluator harus menghindari dominasi kekakuan metodologis berupa rancangan percobaan, data kuantitatif dan analisis statistic terhadap kegunaan evaluasi, karena yang terpenting adalah para pembuat keputusan (*stakeholder*) dapat memahami hasil evaluasi sehingga masalah dapat diselesaikan. (Patton, 1997, h. 16).

2.1.7.4. Langkah-langkah dalam Evaluasi Program

Menurut World Bank (2004) terdapat beberapa langkah-langkah yang hendaknya diikuti oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi program, yaitu :

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini seorang evaluator harus memahami hal-hal sebagai berikut :

- Memahami secara menyeluruh mengenai program, proyek atau kebijakan dengan cara menelusuri konteks yang akan dievaluasi kemudia mengembangkan model yang logis.
- Menentukan pertanyaan evaluasi dan isu-isu yang akan digunakan dengan melihat kebutuhan stakeholder.
- Mentukan metodologi evaluasi yang meliputi penentuan pertanyaan evaluasi yang spesifik, memilih desai/rancangan yang sesuai, menentukan ukuran yang akana digunakan, mengembangkan strategi pengumpulan data, termasuk sampling, mengembangkan

strategi analisis data, review dan menguji metodologi yang digunakan.

- Menyiapkan *term of reference*
- Menyiapkan rencana kerja terutama mengenai sumber daya dan waktu yang dibutuhkan.

b. Pelaksanaan

Pada tahapan ini seorang evaluator sudah memulai melaksanakan evaluasi dalam bentuk :

- Mengumpulkan data
- Menyiapkan data untuk dianalisis
- Analisa data
- Merumuskan hasil temuan

c. Pelaporan

- Mengidentifikasi temuan utama terutama mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang tidak terjadi.
- Rekomendasi yang masuk akal terutama mengenai usulan untuk melakukan tindakan dalam bentuk yang jelas dan spesifik seperti siapa yang harus melakukan apa, bukti-bukti yang mendukung rekomendasi dan hubungan yang logis diantara sejumlah rekomendasi.

d. Umpan balik

- Umpan balik dapat berupa laporan tertulis, pertemuan singkat, sumbangan dalam proses pembelajaran dan dilakukan dengan melibatkan stakeholder dalam rencana pengembangan pelaksanaan.

Lebih lanjut langkah-langkah dalam melakukan evaluasi program menurut Patton (1997) terdiri dari :

- *Search for explanation of the successes, failures, and changes in a program.* (Mencari penjelasan menyangkut kesuksesan, kegagalan dan perubahan dalam suatu program).

- *Under field conditions in the real world, people and unforeseen circumstances shape program and modify initial plans in ways that are rarely trivial. (Membentuk program dan memodifikasi rencananya)*
- *Evaluator sets out to understand and document the day to day reality of the setting or setting under study. This means unraveling what is actually happening in a program by searching for the major patterns and important nuances that give the program its character. (Memahami realitas program, mencari pola yang tepat sesuai dengan karakter program).*
- *Becoming sensitive to both qualitative and quantitative changes in program throughout their development and becoming intimately acquainted with the details of the program. Sensitif kepada perubahan baik kuantitatif maupun kualitatif dalam seluruh pengembangan program dan mengenal secara detail menyangkut program.*
- *Investigate informal pattern and anticipated consequences in the full context of program implementation and development. (Menyelidiki pola informal dan konsekuensinya dalam kaitannya dengan konteks implementasi dan pengembangan program.*
- *Collect the perception of the people close to program about how things are going. A variety perspective may be sought from people inside and outside the program. (Menghimpun persepsi dari orang-orang yang dekat dengan program tentang berbagai hal yang berjalan. Perspektif yang bervariasi mungkin dapat dicari dari orang-orang dari dalam dan diluar program).*
- *Proces data from early pilot efforts were used to inform the designs subsequent centers as the program expanded. (Memproses data dari awal yang digunakan untuk menginformasikan perancangan selanjutnya dan memperluas program) (h. 206)*

BAB 3

GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN LOKASI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Program

Seperti tercatum dalam “*Project Administration Memorandum*” (PAM), indikator keberhasilan yang diharapkan dalam program *block grant* MEDP adalah untuk meningkatkan input, proses, output, dan outcome madrasah hingga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peningkatan input berupa pemberian dana *block grant* untuk peningkatan sarana dan prasana pendidikan. Peningkatan proses berupa pengadaan dan pelatihan guru dan kepala madrasah, peningkatan output berupa peningkatan hasil belajar peserta didik, sedangkan peningkatan outcome berupa peningkatan kinerja madrasah. Secara keseluruhan indikator kinerja program Proyek MEDP adalah seperti dirangkum dalam Tabel 3.1. berikut.

Table 3.1. Indikator Kinerja Program *block grant* MEDP

	Komponen	Target/Indikator Kinerja
INPUT	Dana	<ul style="list-style-type: none">• Juknis yang dapat di fahami• Mekanisme penyaluran dana• Pengambilan dana• Alokasi dana
	SDM	Kepala Madrasah, Guru-guru dan Bendahara, berkualifikasi S1
	Sarana dan Prasarana	Ruang Kelas Baru, Rehab, Laboratorium, Perpustakaan, dan Media Pembelajaran sesuai dengan standar nasional
PROSES	Profesionalisme guru meningkat di proyek madrasah sesuai dengan standar nasional	<ul style="list-style-type: none">▪ Paling sedikit 60% dari guru di proyek madrasah mendapatkan kualifikasi S1 pada akhir tahun 2012 (50% basis)▪ Paling sedikit 25% dari guru di proyek madrasah mencapai sertifikasi profesional (0% basis)▪ Paling sedikit 70% dari proyek madrasah diakreditasi pada akhir tahun 2008▪ Paling sedikit 80% dari proyek madrasah memiliki fasilitas (ruangan kelas,

(lanjutan)

	<p>Peningkatan ketersediaan sumber daya belajar-mengajar dan fasilitas di proyek madrasah untuk memenuhi atau melebihi standar-standar nasional</p> <p>Efisiensi internal dari proyek madrasah meningkat untuk memenuhi standar-standar nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ perpustakaan (laboratorium) yang memenuhi standar nasional ▪ Paling sedikit 80% dari proyek madrasah memiliki materi belajar-mengajar dalam subjek umum yang memenuhi standar nasional ▪ Pendaftaran MT meningkat sebesar 5% ▪ Tingkat transisi dari MI ke pendidikan lanjutan pertama (MT atau SMP) meningkat 95% untuk murid lelaki dan perempuan ▪ Angka pengulangan di proyek MI dan MT menurun sebesar 1% pada tahun 2012 ▪ Angka putus sekolah (dropout) di proyek MI dan MT menurun menjadi 0 pada tahun 2012 <p>85% dari proyek sekolah mencapai rasio dari pelajar tahun 1 ke pelajar tahun akhir adalah paling sedikit 85% untuk MI</p>
	<p>Tata pemerintahan, management, dan ketahanan penguatan proyek madrasah untuk memenuhi standar nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 80% dari proyek madrasah memiliki MDP berbasis hasil ▪ Paling sedikit 80% dari kepala sekolah mendapatkan kualifikasi S1 pada akhir tahun 2012 (51% basis) ▪ Paling sedikit 80% dari kepala sekolah di proyek madrasah mencapai sertifikasi profesional (0% basis) ▪ 70% dari proyek madrasah memperlihatkan penghasilan/pengeluaran tahunan pada papan pengumuman sekolah ▪ 20% dari anggaran sekolah dialokasikan untuk peningkatan kualitas ▪ 95% dari madrasah memiliki komite madrasah yang berfungsi, dengan paling sedikit 30% anggota perempuan, bertemu sekali sebulan ▪ Paling sedikit tiga spesialis jaminan mutu bersertifikat di masing-masing MDC ▪ 100% dari proyek kabupaten meningkatkan pembiayaan untuk madrasah

Sumber: telah diolah kembali

3.1.1. Pengertian *Block Grant*

Block grant adalah sejumlah dana yang disediakan oleh pemerintah bagi institusi tertentu untuk dimanfaatkan sesuai dengan formula dan bidang-bidang garapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, *block grant* adalah bantuan dana yang diberikan kepada Madrasah secara langsung melalui

program *Madrasah Education Development Project* (MEDP) yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia (GOI) bekerjasama dengan negara donor, *Asian Development Bank* (ADB), untuk Pengembangan Madrasah agar dapat mengelola dan menyelenggarakan pendidikan bermutu, demokratis, berkeadilan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yakni membangun sumber daya manusia berkualitas dan siap menghadapi tantangan globalisasi, karena madrasah merupakan bagian terintegrasi dari sistem pendidikan nasional.

Dana *block grant* Madrasah digunakan untuk pengembangan Madrasah yang difokuskan untuk meningkatkan (i) Pengembangan profesionalisme guru, (ii) Peningkatan mutu sumber belajar dan fasilitas pembelajaran, (iii) Peningkatan efisiensi internal, dan (iv) Penguatan tata kelola, manajemen dan keberlanjutan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional. Penggunaan dana *block grant* tidak diperkenankan untuk membiayai program di luar komponen program MEDP atau membiayai program rutin yang selama ini merupakan tanggung jawab madrasah penerima *block grant*. Madrasah penerima *block grant* harus mengelola dana *block grant* yang diberikan secara transparan, mandiri dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip bebas korupsi serta dipertanggung-jawabkan kepada stakeholder, khususnya pemerintah Indonesia (GOI) dan ADB.

3.1.2. Kriteria Penentuan Wilayah dan lokasi penerima *block grant*

Propinsi, kabupaten, dan madrasah dipilih secara bertahap: pertama-tama, propinsi yang memiliki pendaftaran siswa tertinggi dan kedekatan jarak madrasah; kemudian, kabupaten berdasarkan tingkat kemiskinan, pendaftaran siswa yang tinggi, ketiadaan proyek-proyek bantuan asing lainnya, dan minat terhadap program MEDP; dan terakhir, madrasah di kabupaten berdasarkan ukuran sekolah, kemiskinan murid, kualifikasi pengajar, dan kedekatan jarak. Berdasarkan kriteria ini, sebanyak 27 kabupaten miskin terpilih di tiga propinsi (Jawa Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan). Diantara kabupaten-kabupaten tersebut, sebanyak 500 madrasah terpilih (208 MI, 23MT, dan 59 MA) dan 90% diantaranya adalah swasta.

3.1.3. Tujuan Umum Program:

Mendorong madrasah mampu melakukan perubahan secara kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran melalui pemberian layanan pendidikan berkualitas. Harapannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kesetaraan dengan lulusan sekolah lain di tingkat nasional, regional dan internasional. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat dan mempercepat terbangunnya masyarakat belajar (*learning community*) yang kondusif, sehingga proses transisi ke dunia kerja, peningkatan produktifitas, dan peningkatan pendapatan per kapita dapat terwujud.

3.1.4. Tujuan Khusus Program:

Meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas pendidikan madrasah di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Dengan indikator keberhasilan (i) peningkatan prestasi siswa pada semua tingkatan, termasuk pengurangan kesenjangan kualitas pendidikan antara sistem pendidikan di madrasah dengan sistem pendidikan umum, (ii) menurunkan tingkat kesenjangan prestasi siswa madrasah dikabupaten, khususnya prestasi siswa di madrasah sasaran MEDP, (iii) perbaikan tingkat kemajuan dan retensi dalam sistim madrasah; dan (iv) persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap kualitas pendidikan madrasah.

3.1.4.1. Komponen dan kegiatan *block grant*

- a. Peningkatan fasilitas pembelajaran, sumber belajar dan materi/bahan pembelajaran, yaitu:
 - *Block grant* pengadaan buku teks dan sarana pembelajaran (media pembelajaran dan bahan untuk praktikum sains)
 - *Block grant* pengadaan peralatan (equipment), kursi dan meja (*furniture*) dan perangkat lunak (*software*). *Furniture* untuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium sains, laboratorium komputer, dan ruang Unit Kesehatan Masyarakat (UKM).
 - *Block grant* pengadaan fasilitas pembelajaran yang mencakup pembangunan ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, laboratorium

sains, laboratorium komputer, dan ruang Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) .

b. Peningkatan profesionalisme guru, mencakup kegiatan:

- *Block grant* bagi KKG/MGMP untuk pelaksanaan pertemuan reguler
- *Block grant* bagi KKG/MGMP untuk pelatihan materi pembelajaran dan metodologi pembelajaran
- *Block grant* bagi kegiatan inovasi peningkatan kualitas pembelajaran

c. Peningkatan efisiensi kinerja internal madrasah, yaitu:

- Pelaksanaan program Transisi madrasah (dari MI ke MTs, atau dari Mts ke MA)

Program Transisi siswa madrasah adalah program untuk menanggulangi masalah siswa yang tidak mampu meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Program dan aktivitas program transisi mencakup:

1. Madrasah (MI) membiayai siswa kelas 6 yang tidak mampu dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke MTs atau SMP,
2. Madrasah & MTs) membiayai siswa kelas 9 yang tidak mampu dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke MA atau SMA,
3. Apabila MTs yang memiliki keleluasaan anggaran *Block grant* untuk (MTs) kategori ini dapat membiayai siswa kelas 6 yang akan masuk ke MTs dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh madrasah
4. Apabila MA yang memiliki keleluasaan anggaran *Block grant* untuk (MA) kategori ini dapat membiayai siswa kelas 8 yang akan masuk ke MA dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh madrasah
5. Ketentuan pelaksanaan program transisi bagi siswa miskin (orang tua siswa yang berpenghasilan rendah) ditetapkan oleh Ketua Yayasan, Komite madrasah, Kepala Madrasah dan Dewan Guru Madrasah. (Misalnya: keluarga yang beranak lebih dari 9 orang dan

penghasilan keluarganya dibawah standar UMR). Secara khusus, ketentuan tentang siswa miskin ditetapkan berdasarkan Komite Madrasah, Ketua RT/RW dan Pemerintah Desa.

6. Besarnya bantuan biaya program transisi setiap siswa ditentukan berdasarkan hasil rapat komite madrasah, dewan guru dan orang tua siswa. Melibatkan orang tua siswa dimaksud agar terjadi kesepakatan dilakukannya subsidi silang, antara orang tua yang kaya dengan orang tua yang miskin.

Biaya Program Transisi siswa Madrasah mencakup:

1. Besarnya bantuan biaya siswa disesuaikan dengan tingkat Madrasah (MI, MTs, MA) sesuai dengan kebutuhan biaya setingkat (MI, MTs, MA).
2. Spesifikasi biaya diperuntukan bagi membayar SPP dan uang pembangunan (langsung diberikan ke madrasah), uang untuk Pakaian seragam sekolah dan buku mata pelajaran diberikan kepada siswa. Madrasah penerima uang (SPP dan Uang Bangunan) dan siswa menerima uang (pakaian seragam sekolah dan buku-buku mata pelajaran) harus menyetorkan kuitansi kepada madrasah pemberi bantuan.
3. Biaya diberikan kepada siswa miskin, ketentuan miskin ditetapkan berdasarkan ditetapkan oleh Ketua Yayasan, Komite madrasah, Kepala Madrasah dan Dewan Guru Madrasah. (Misalnya: keluarga yang beranak lebih dari 9 orang dan penghasilan keluarganya dibawah standar UMR termasuk kategori miskin). Secara khusus, ketentuan tentang siswa miskin ditetapkan berdasarkan Komite Madrasah, Ketua RT/RW dan Pemerintah Desa.
4. Besarnya bantuan biaya program transisi setiap siswa ditentukan berdasarkan hasil rapat komite madrasah, dewan guru dan orang tua siswa. Melibatkan orang tua siswa dimaksud agar terjadi kesepakatan dilakukannya subsidi silang, antara orang tua yang kaya dengan orang tua yang miskin

- Block Grant bagi program remedial

Program remedial bertujuan untuk:

1. Mengani siswa yang memiliki daya serap di bawah standar/rendah dan yang prestasinya rendah (dibawah criteria ketentuan tuntas minimum/KKM yang telah di tetapkan) dengan menambah jam pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang mengalami daya serap rendah.
2. Menangani siswa yang berdaya serap tinggi dengan melakukan pengayaan sesuai minat dan potensi siswa
3. Menangani siswa bermasalah atau kesulitan dalam pelajaran disebabkan karena kekurangan fasilitas, jarak ari rumah ke sekolah cukup jauh, dan masalah social di sekeliling siswa atau maslah keluarga.
4. Program remedial tidak boleh overlap (Tumpang tindih) dengan program Bimbingan dan koseling, program remedial diarahkan kepada penanganan teknis peningkatan mutu pembelajaran dari aspek akademik dan skills.

Biaya Program remedial:

Penentuan besaran dana remedial ditentukan berdasarkan jumlah jam tatap muka (pengayaan) dan berdasarkan jumlah siswa yang mengikutinya disesuaikan dengan ketersediaan dana blkc grant untuk komponen ini dengan catatan tidak lebih dari pagu pembayaran. Biaya Program remedial mencakup:

1. Honor guru yang menyelegarakan remedial bagi siswa yang memiliki daya serap dibawah standar/rendah, dan yang prestasinya rendah (dibawah kriteria ketentuan minimum/KKM yang telah ditetapkan) dengan menambah jam pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang mengalami daya serap rendah.
2. Honor guru yang menyelenggarakan reedial pada siswa yang berdaya serap tinggi (istimewa) dangan melakukan pengayaan sesuai minat dan potensi siswa.

3. Honor dan transport bagi guru yang menyelenggarakan remedial menangani siswa yang bermasalah atau kesulitan dalam belajar disebabkan kekurangan fasilitas, jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, dan masalah sosial di sekeliling siswa atau masalah keluarga.
4. Penentuan besaran dana ditentukan berdasarkan jumlah jam pelajaran (pegayaan) dan berdasarkan jumlah siswa yang mengikuti disesuaikan dengan ketersediaan dana *lock grant* untuk komponen ini dengan catatan tidak melebihi pagu pembayaran.

d. Penguatan tata kelola, manajemen dan keberlanjutan madrasah, yaitu:

Meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen *Madrasah Development Center* (MDC)

- Meningkatkan jaringan kerjasama antar madrasah melalui Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M)
- Meningkatkan fungsi manajemen berbasis madrasah (MBM)
- Meningkatkan peran kelembagaan dan kinerja KKG dan MGMP

3.1.5. Dana *Block Grant*

MEDP dibiayai dengan dana pinjaman ADB sebesar SDR 33,6 juta (eq. Dengan USD 50.0 juta) dan dana pendamping dari Pemerintah Indonesia sebesar USD 21.4 juta yang berasal dari dana APBN. Penggunaan dana pinjaman MEDP antara pemerintah Indonesia dengan ADB diatur dalam *Loan Agreement*, yaitu Loan No. 2294-INO (SF). Besaran dana *block grant* yang diberikan kepada 500 Madrasah sasaran MEDP bervariasi, mulai dari Rp. 400,000,000 hingga Rp. 1,900,000,000 tergantung pada proposal perencanaan pengembangan madrasah (*Madrasah Development Plan* - MDP) yang dibuat oleh madrasah pada awal program, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

3.1.6. Kriteria Madrasah Penerima *Block grant*

Madrasah yang dapat mengajukan bantuan *block grant* adalah madrasah negeri ataupun swasta yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Beralokasi diseluruh kabupaten/kota yang berada di tiga propinsi yang telah dipilih sebagai madrasah penerima program *block grant* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Direktorat Pendidikan Madrasah dan disetujui oleh Pemerintah Daerah/Kanwil/Kandep
2. Memiliki komitmen untuk menunjukkan kinerja yang bermutu yang dinilai berdasarkan kelulusan siswa yang mengikuti ujian nasional dan penilaian kemampuan dalam mengelola madrasah dan melaksanakan proses pembelajaran.
3. Secara umum menunjukkan tingkat kesehatan yang memadai, ditunjukkan dengan iklim yang kondusif dan memiliki sumber belajar yang bermanfaat bagi siswa.
4. Memiliki komitmen dan perhatian yang tinggi terhadap proses pembelajaran, mau meningkatkan kualitas pendidikannya. Hal ini ditunjukkan oleh warga madrasah yang memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan dan memberikan dukungan pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif, demokratis dan berkualitas.
5. Bersedia menyusun rencana pengembangan madrasah (*Madrasah Development Plan – MDP*) yang rasional, layak, efektif dan efisien serta memuat program-program inovatif (bukan program rutin) untuk pengembangan kualitas layanan pendidikan, sebagai bagian terintegrasi dari rencana pengembangan madrasah secara menyeluruh yang tercantum dalam MDP
6. Memiliki komitmen untuk mengembangkan sisten manajemen yang transparan, dan akuntabel.

3.1.7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Menengah Nasional tahun 2004-2009 (Bagian IV Bab 27 butir C arah kebijakan Nomor 19 dan Bagian IV bab 27 butir D program-program pembangunan);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006;
6. Keputusan Presiden No. 16 tahun 1994 jo.Keppres No. 24 tahun 1955 pasal 34 ayat 1, 2, dan 5 tentang Penyelenggaraan Pembukuan
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
11. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
12. Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Asian Development Bank* (ADB) Nomor 2294-INO (SF) tanggal 15 Maret 2007 tentang *Madrasah Education Development Project* (MEDP)

3.1.8. Pengaturan Pelaksanaan MEDP

3.1.8.1. Lembaga Pelaksana dan Implementasi MEDP

Lembaga pelaksana untuk Proyek ini adalah Kementerian Agama RI (MORA), didukung oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam MORA, yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari Proyek. Sebuah komite pengendalian (PSC) dibentuk untuk memandu CPMU dalam melaksanakan

kebijakan umum, koordinasi inter-sektor, dan arahan strategis. Anggota PSC meliputi perwakilan MORA, Kementerian Keuangan (MOF), Bappenas, dan MONE. Sekretaris Jendral MORA akan memimpin PSC. Direktur Jendral Pendidikan Islam akan menjabat sebagai direktur proyek, dan Direktur Pendidikan Madrasah akan menjabat sebagai sekretaris PSC. Suatu komite teknis proyek (PTC) akan dibentuk untuk memandu CPMU dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Anggota-anggota dari PTC akan meliputi perwakilan dari MORA, MOF, dan MONE. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas adalah yang memimpin PTC.

Adapun organisasi manajemen MEDP adalah sebagai berikut:

a. Ditingkat Pusat (Jakarta)

Dibentuk *Central Project Management Unit* - CPMU yang diketuai oleh Ketua CPMU, akan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sehari-hari, perencanaan dan anggaran, pengadaan, pengeluaran, monitoring, supervisi, dan mengawasi pelaksanaan di propinsi, kabupaten dan tingkat madrasah, dan menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan kepada Pemerintah Indonesia dan ADB.

b. Ditingkat Propinsi

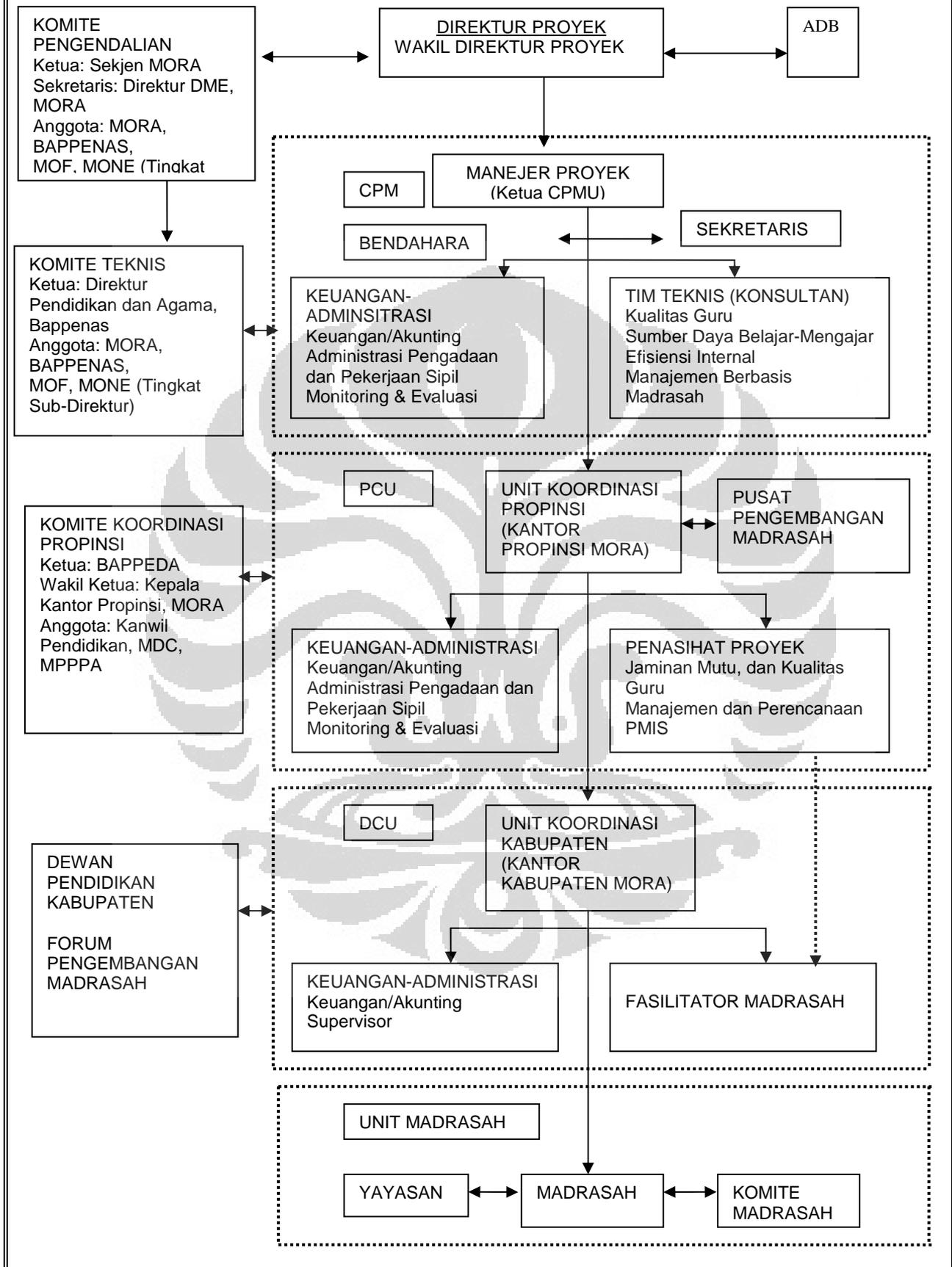
Di bentuk Unit Koordinasi Proyek (PCU) yang diketuai oleh Kanwil Kemenag, untuk mengelola, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasi aktivitas-aktivitas di propinsi-propinsi dan kabupaten-kabupaten, dibantu oleh staf keuangan dan akunting, Advisor pengadaan dan advisor monitoring dan evaluasi.

c. Ditingkat Kabupaten

Dibentuk Unit Koordinasi Kabupaten (DCU) yang diketuai oleh Kasi Mapenda untuk mengawasi pelaksanaan di tingkat madrasah, khususnya penggunaan bantuan *Block grant* Rencana Pengembangan Madrasah - MDP. Dibantu oleh Fasilitator, dan Staf Administrasi dan Keuangan.

Struktur organisasi proyek terdapat dalam bagan 3.1. dibawah ini.

Bagan 3. 1: Struktur Organisasi MEDP



3.1.8.2. Tugas dan Fungsi Institusi di lingkungan Kementerian Agama dalam Program *Block Grant*

3.1.8.2.1 Direktorat Pendidikan Madrasah

Secara umum, Direktorat Pendidikan Madrasah atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi menentukan kebijakan dan strategi pada tataran formulasi/penetapan, implementasi dan evaluasi kebijakan pada tingkat nasional, yaitu:

- a. Pada tataran formulasi dan penetapan kebijakan, Direktorat Pendidikan Madrasah mempunyai tugas dan fungsi memformulasikan/menetapkan dan penerbitan buku: Paduan Pelaksanaan, dan Panduan Monitoring & Evaluasi Program *Block Grant*;
- b. Pada tataran implementasi kebijakan, Direktorat Pendidikan Madrasah mempunyai tugas dan fungsi mensosialisasikan program *block grant* keseluruh Kanwil Kemenag serta mengkoordinasikan seluruh jajaran Kanwil/Kankemenag dalam melaksanakan program *block grant*;
- c. Pada tataran evaluasi kebijakan, Direktorat Pendidikan Madrasah mempunyai tugas dan fungsi memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan program *block grant* secara nasional;
- d. Menerbitkan secara berkala, baik secara elektronik dan atau non-elektronik tentang perkembangan konsep hasil pelaksanaan program *block grant* secara agregatif (nasional) dan secara disagregatif (wilayah/daerah)

3.1.8.2.2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi

Secara umum, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi (Kanwil Kemenag) adalah menjabarkan kebijakan, strategi dan acuan pelaksanaan pengembangan madrasah yang telah digariskan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah untuk diberlakukan di propinsi masing-masing, antara lain:

- a. Menjalankan tugas dan fungsi supervisi secara luas berkaitan dengan pelaksanaan berbagai aktivitas program *block grant* di kabupaten/kota;

- b. Menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program *block grant* di masing-masing kabupaten/kota di propinsinya;
- c. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan program *block grant* lintas kabupaten/kota untuk menghindari penyimpangan terhadap esensi pengembangan madrasah dan kesenjangan mutu;
- d. Melaporkan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah tentang hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi *block grant* lintas Kabupaten/Kota di Propinsi
- e. Menerbitkan informasi secara berkala, baik secara elektronik dan atau non-elektronik tentang perkembangan hasil pelaksanaan program *block grant* secara agregatif di wilayahnya.

3.1.8.2.3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag Kab.) menjalankan tugas dan fungsi utama mengelola satuan pendidikan di Kabupaten/Kota masing-masing melalui proses pemberdayaan madrasah dalam upaya pengembangan kualitas pendidikan, Lebih spesifiknya, Kankemenag Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Menjalankan tugas dan fungsi supervisi secara luas berkaitan dengan pelaksanaan berbagai aktivitas program *block grant* di madrasah;
- b. Menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program *block grant* di masing-masing madrasah dalam kabupaten/kotanya;
- c. Mengkoordinasikan dan menyalurkan pelaksanaan program *block grant* di kabupaten/kota untuk menghindari penyimpangan terhadap esensi pengembangan madrasah dan kesenjangan mutu. Koordinasi dan penyerasian tentang tarif/hargayang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa, honorarium, ongkos transportasi, dsb.
- d. Melaporkan kepada “Kanwil” dan “Pusat” tentang hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi *block grant* lintas kabupaten. Jika diperlukan dapat dibentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- e. Menerbitkan informasi secara berkala, baik secara elektronik dan atau non-elektronik tentang perkembangan hasil pelaksanaan program Block Grant secara agregatif di kabupaten/kota;
- f. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan MEDP di wilayahnya
- g. Melakukan review terhadap proses pengadaan di madrasah penerima *block grant*

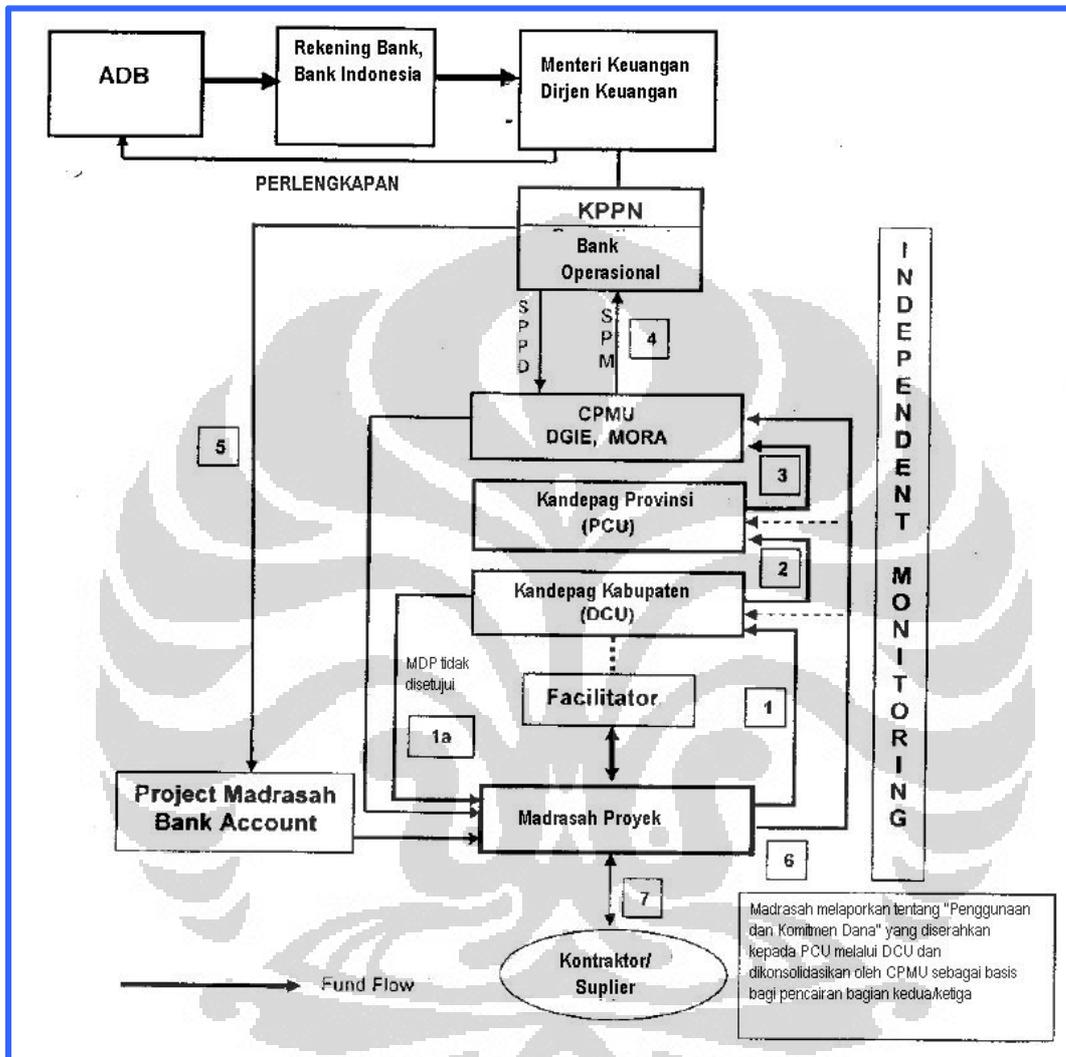
3.1.8.2.4. Madrasah sasaran Proyek MEDP

Tugas dan fungsi utama Madrasah adalah mengelola penyelenggaraan program *block grant* di madrasah masing-masing. Mengingat madrasah merupakan unit utama dan terdepan dalam penyelenggaraan program *block grant*, maka madrasah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan pelaksanaan program *block grant* dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti unsur; komite madrasah, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, tata usaha, siswa, orang tua siswa, organisasi profesi, pemerintah setempat dan tokoh masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan dan menyalurkan segala sumber daya yang ada di madrasah dan di luar madrasah untuk mencapai sasaran program *block grant* yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan program *block grant* secara efektif, efisien, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna;
- d. Melaksanakan pengawasan internal dalam pelaksanaan program *block grant*, sehingga implementasinya dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran program *block grant* yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menentukan sasaran baru program *block grant* tahun-tahun berikutnya;
- f. Menyusun laporan dan mempertanggung jawabkan hasil penyelenggaraan program *block grant* secara lengkap untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait (DCU, PCU dan CPMU)

3.1.9. Mekanisme Aliran Dana *block grant* untuk Madrasah

Secara kronologis dan menyeluruh, mekanisme penyaluran dana *block grant* untuk pelaksanaan pengembangan madrasah dapat dilihat pada bagan 3.2. berikut:



Keterangan:

ADB= Asian Development Bank; CPMU = Unit Manajemen Proyek Pusat; DCU = Unit Koordinasi kabupaten; DG = Direktur Jendral, Pendidikan Islam; KPPN = Menteri Keuangan; MDP = Rencana Pengembangan Madrasah; MOF = Menteri Keuangan; MORA = Kementerian Agama; PCU = Unit Koordinasi Propinsi; SPM = Surat Perintah Membayar; SPPD = Surat Perintah Pencairan Dana

Bagan 3.2. Mekanisme Arus Dana Untuk Block Grant

Sumber: *Project Administration Memorandum*, 2007

Mekanisme arus dana penyaluran *block grant* adalah seperti berikut.

1. Setiap madrasah menyusun rencana pengembangan madrasah – MDP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. MDP yang telah disetujui DCU (Kankemenag) akan disampaikan ke PCU (Kanwil Kemenag).
3. PCU, setelah mengkaji MDP yang disampaikan DCU, selanjutnya mengirimkannya ke CPMU (Kemenag Pusat).
4. CPMU, berdasarkan MDP yang telah disetujui oleh Kemenag Pusat, membuat dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dirjen Pendis.
5. Berdasarkan SPP dari Ketua CPMU, Bag Keuangan Setditjen Pendis akan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Dirjen Pendis dan kemudian disampaikan ke KPPN.
6. KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD atau SP2D) ke Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada CPMU.
7. Bank Indonesia kemudian mentransfer dana ke Bank Operasional di daerah dimana madrasah membuka rekening.
8. Madrasah mencairkan dana *block grant* dan menguonakannya untuk membayar kepada kontraktor / pemasok dari pihak ketiga lainnya dalam rangka melaksanakan MDP.
9. Setiap madrasah mengirimkan laporan realisasi keuangan dan realisasi program ke CPMU melalui DCU. PCU akan memantau kemajuan pencapaian target dan kegiatan-kegiatan.
10. Dalam waktu 3 bulan dari setiap transfer dari KPPN ke rekening madrasah, CPMU akan menyiapkan rencana pengeluaran (statement of expenditures (SOEs) yang merupakan ringkasan status dari pengeluaran *block grant*. Guna pengisian kembali rekening khusus.
11. Departemen Keuangan menyampaikan SOE ke ADB, untuk pengisian kembali rekening khusus.

3.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di dua Madrasah Ibtidaiyah yang berada di kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kedungmegarih, Kembangbahu, dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulu, Wudi, Sambeng.

Untuk mengetahui karakteristik lokasi penelitian berikut ini akan digambarkan secara umum beberapa keadaan yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

3.2.1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu, Lamongan

3.2.1.1 Identitas Madrasah

1. Nama Madrasah : MI ISLAMİYAH
Alamat Madrasah : Dusun Kedungmegarih,
Kec.Kembangbahu,
Kab.Lamongan
2. NSM : 112 352 405 118
3. Terakreditasi : A Tahun 2007
4. Tahun didirikan : 1954
5. Tahun Beroperasi : 1954
6. a. Status Tanah : Hak Milik
b. Luas Tanah yang dimiliki : 4.320 M2
c. Yang ditempati MI : 1.305 M2
7. a. Status Bangunan : Milik Sendiri
b. Luas Bangunan : 588 M2

3.2.1.2. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah didirikan pada tanggal 02 Januari 1954 yang terdaftar di jawatan kementerian RI pada tgl 01 April 1960 dengan nama Madrasah Ibtida'iyah Islam, dan selanjutnya terdaftar menjadi binaan LP.ma'arif NU pada tanggal 20 Maret 1970 dengan nama Madrasah Ibtida'iyah Islam. Pada tanggal 23 April 1993 nama Madrasah Ibtida'iyah Islam berubah menjadi Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah dengan status akreditasi terdaftar, dan terdaftar pada

LP.Ma'arif NU dengan nama Madrasah ibtida'iyah islamiyah pada tanggal 12 Pebruari 1994.

Sejalan dengan kemajuan zaman dan untuk pertama kalinya madrasah ini mengikuti akreditasi pada tanggal 13 pebruari 1996 status akreditasi meningkat menjadi Diakui dan pada tanggal 07 Desember 2001 Status akreditasi meningkat lagi menjadi Disamakan dan pada tanggal 23 Maret 2007 status akriditasi dengan peringkat A. Dengan dukungan masyarakat dan tenaga yang mayoritas masih muda madrasah ini mulai terus berbenah diri dengan melakukan stady banding keberbagai lembaga pendidikan mulai dari lembaga disekitarnya yang dianggap lebih maju sampai pada lembaga pendidikan yang dikelola secara modern termasuk ke SD Al-Hikmah Surabaya. Dengan binaan dari PC.LP Ma'arif NU yang bekerjasama dengan KPI, dan juga dari departemen agama kala itu yang bekerjasama dengan DBE. Sekaligus menjadi sasaran MEDP, MI Islamiyah yang pada tahun 2000-an banyak melakukan stady banding kini MI Islamiyah menjadi lembaga percontohan bagi lembaga pendidikan disekitarnya bahkan tidak sedikit dari kecamatan lain yang melakukan stady banding ke lembaga ini.

Adapun Tujuan Madrasah (1) Meningkatkan pengetahuan siswa sebagai bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi (2) Meningkatkan pengetahuan seluruh warga madrasah untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan kesenian yang dijiwai oleh ajaran agama islam. (3) Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan ketrampilan siswa sebagai bekal hidup di lingkungan masyarakat

3.2.1.3. Visi dan Misi Madrasah.

1. VISI madrasah

”Terwujudnya Generasi Yang Berakhlakul Karimah Dan Berprestasi ” dan yang menjadikan visi tersebut sampai pada tujuannya ada beberapa indicator yakni (a) Bertutur kata, berperilaku dan bersikap serta beribadah sehari-hari berdasarkan ajaran agama islam ahlusunnah wal jama'ah. (b) Mampu meraih prestasi / kejuaraan dalam berbagai even lomba baik bidang akademis maupun non

akademis. (c) Memiliki daya saing yang tinggi untuk memasuki SMP / MTs favorit di Lamongan dan sekitarnya.

2. MISI madrasah

(1) Menjadikan MI Islamiyah sebagai lembaga pendidikan percontohan, (2) Menjadikan MI Islamiyah sebagai lembaga pendidikan berbasis da'wah, sedangkan yang menjadikan visi tersebut menjadi apa yang sesuai harapan adalah indicator-indicator pendukungnya yakni (a) Berprilaku berakhlakul karimah di sekolah, di keluarga dan di masyarakat.(b) Melaksanakan shalat dengan kesadaran dan membiasakan membaca Al-Qur'an (c) Melaksanakan Pembelajaran yang Aktif, Inofatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan.(d) Memberikan wadah pembinaan kepada siswa guna mengenali potensi diri sejak dini untuk dikembangkan secara optimal sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian (e) Mengembangkan potensi akademik dan kualitas tenaga pendidikan .

Dalam proses belajar mengajar madrasah memiliki kiat khusus dalam menjalankan proses tersebut dengan memiliki Strategi-strategi sebagai berikut: (a) Menerapkan model pendidikan berbasis Jaminan Mutu (*Quality Assurance*), (b) Menggunakan standarisasi manajemen yang meliputi standar aturan, standar organisasi sekolah dan standar SDM sehingga menjamin kenyamanan produktifitas, (c) Menerapkan perilaku yang islami disemua sisi kehidupan anak, (d) Meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, (e) Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan semua warga Madrasah

Bukan hanya Strategi akan tetapi madrasah memiliki suatu jaminan yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai nilai jual yang berbeda dari madrasah lainnya yakni JAMINAN KUALITAS siswa yang mana dapat diukur nilainya yakni (1). Menjalankan sholat dengan kesadaran, (2). Berbakti kepada orang tua, (3). Lulusan hafal Juz 'Amma, (4). Gemar membaca, (5). Berbudaya hidup bersih dan sehat, (6). Unggul dalam pembelajaran

3. Tujuan Madrasah.

Adapun Tujuan dari madrasah yang tersebut diatas memiliki sub dari tujuan utamanya yakni jika di perinci adalah sebagai berikut : (a) *Tujuan Jangka Pendek* : (1) Pada tahun pelajaran 2010/2011 sikap dan amaliyah warga Madrasah terjadi peningkatan kualitas dari pada sebelumnya. (2) Pada tahun 2010/2011 terjadi peningkatan kepedulian warga Madrasah terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Madrasah dari pada sebelumnya.(3) Pada tahun pelajaran 2010/2011, terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung, peningkatan prestasi akademik dan non akademik. Dan *Tujuan Jangka Menengah* (1) Pada tahun pelajaran 2011/2012, para siswa yang memiliki minat, bakat, dan kemampuan terhadap Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa semakin meningkat dari sebelumnya, dan mampu menjadi MC/ berpidato dimuka umum, serta untuk kelas IV, V dan VI pembelajaran dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan bahasa inggris (bilingual), (2) Pada tahun pelajaran 2011/2012, memiliki tim olah raga, minimal empat cabang yang mampu menjadi finalis tingkat Kabupaten. (3) Pada tahun pelajaran 2010/2011, memiliki tim LMP dan olympiade yang mampu menghantarkan siswa masuk menjadi finalis LMP tingkat Kabupaten. (4) Pada tahun pelajaran 2012/2013, memiliki tim kesenian yang mampu tampil minimal pada acara setingkat Kabupaten. Serta *Tujuan Jangka Panjang* (1) 70 % lulusan MI Islamiyah Kedungmegaroh dapat diterima di SMP / MTs / Pondok Pesantren favorit di wilayah Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. (2) Berprestasi dalam even berbagai lomba akademis maupun non akademis di tingkat kecamatan dan kabupaten. (3) Madrasah mampu memberikan layanan penunjang pendidikan Perpustakaan Laboratorium Komputer, Koperasi, UKS, Bimbingan dan konseling, kantin, Mushola secara maksimal.(4) 80 % siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban ibadah dan bertindak/prilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama islam ahlusunnah wal jama'ah. (5) Pada tahun pelajaran 2016/2017 proses pembelajaran mulai kelas I – VI bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa inggris (bilingual)

3. 2.1.4. Data Siswa Dan Guru

1. Siswa

Table 3. 2. Daftar siswa MI Islamiyah Kedungmegaroh

No	Kelas	Jumlah Siswa											
		2008-2009			2009-2010			2010-2011			2011-2012		
		L	P		L	P		L	P		L	P	
1	I	25	25	50	18	11	29	21	19	40	22	18	40
2	II	27	21	49	23	26	49	18	10	28	20	21	41
3	III	26	26	52	27	20	47	23	27	50	18	10	28
4	IV	21	19	40	26	25	51	27	19	46	23	28	51
5	V	28	17	45	20	19	39	26	25	51	20	27	47
6	VI	18	22	40	26	16	42	20	18	38	25	23	48
Jumlah		145	130	276	140	117	257	135	118	253	128	127	255

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, 2012

2. Guru

Table 3. 3. Jumlah Guru MI Islamiyah Kedungmegaroh
Tahun Pelajaran 2010/2011

No.	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
1	S1	14	2 Guru sudah tersertifikasi
2	D2	2	Proses S1 program MEDP
Total Guru		16	

Sumber: telah diolah kembali

3. Perkembangan Capaian Akademis Madrasah

Tabel 3.4. Hasil Nilai Rata-rata Ujian Nasional MI Islamiyah
Tiga Tahun Terakhir

Tahun Pelajaran	Rata-rata Pelajaran			Jumlah
	BIN	Matematika	I P A	
2008 / 2009	7,93	5,98	7,72	21,6
2009 / 2010	7,62	7,40	7,16	22,2
2010 / 2011	9,12	9,01	9,14	27,3

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, 2012

Tabel 3.5. Hasil Nilai Rata-rata Ujian Madrasah
Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Rata-rata Pelajaran							Jml
	A.Akhlak	Fiqih	Qur'dits	SKI	B.Arab	PKn	IPS	
2008 / 2009	7,60	7,12	6,87	6,46	5,98	7,04	6,17	47,24
2009 / 2010	8,17	7,98	7,80	7,84	6,58	7,10	6,53	52,00
2010 / 2011	8,92	7,36	7,87	7,31	7,15	8,36	8,11	55,08

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, 2012

3.2.1.5. Sarana dan Prasarana

Table 3.6. Sarana Fisik

NO	Sarana	Jumlah				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Ruang Kelas	6	6	6	8	9
2	Ruang Perpustakaan	-	-	-	1	1
3	Ruang Laboratorium Komputer	-	-	-	-	1
4	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	-	1
5	WC	1	1	1	5	9
6	Ruang Ibadah (Musholah)	1	1	1	1	1
7	Ruang Kantor Guru	1	1	1	1	1
8	Ruang Kepala	1	1	1	1	1

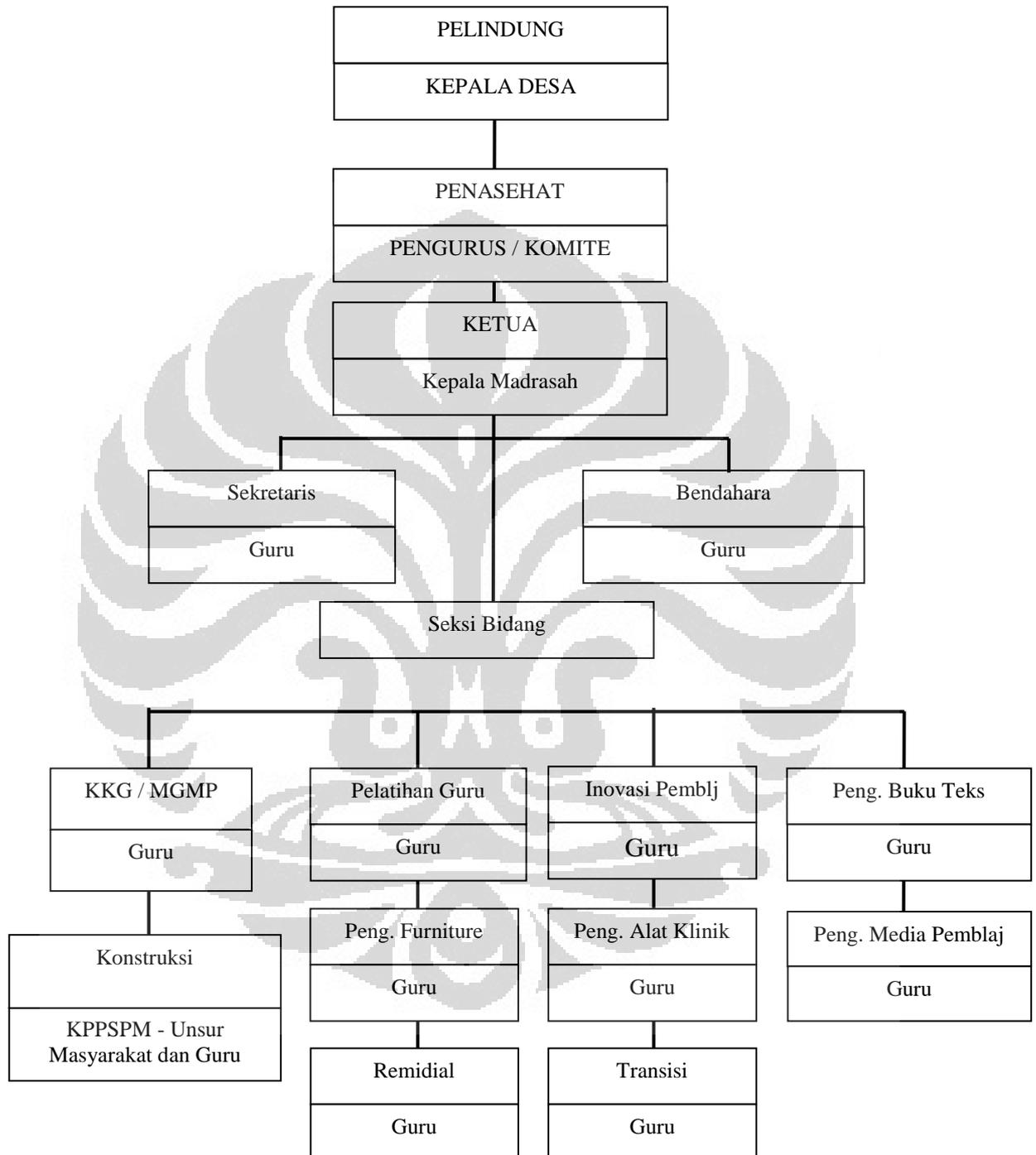
Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, 2012

Table 3.7. Prasarana Fisik

NO	Prasarana	Jumlah				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Perpustakaan					
	a. Buku Pengayaan	-	15	15	75	75
	b. Buku Referensi	-	8	720	1.725	1.725
	c. Buku Panduan Pendidik	-	12	16	36	36
2	Komputer	1	2	3	6	6

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, 2012

3.2.1.6. Struktur organisasi pengurus MEDP di MI Islamiyah



Bagan 3.3. Struktur Kepengurusan MEDP MI Islamiyah Kedungmegarih

Sumber: telah diolah kembali

3.2. 2. Profil Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Sambeng, Lamongan

3.2.2.1 Identitas Madarrasah

1. Nama Madrasah : MI Darul Ulum
- Alamat Madrasah : Dusun Wudi, Kec.Sambeng,
Kab.Lamongan
2. NSM : 112352403157
3. Terakreditasi : B Tahun 2007
4. Tahun didirikan : 1953
5. Tahun Beroperasi : 1953
6. a. Status Tanah : Milik
- b. Luas Tanah yang dimiliki : 10.456 M2
- c. Yang ditempati MI : 456 M2
7. a. Status Bangunan : Milik
- b. Luas Bangunan : 456 M2

3.2.2.2. Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum

Jalan berkelok-kelok, naik turun serta terbatas untuk persimpangan menuju lokasi Madrasah ini adalah sedikit gambaran dimana masih ada perjuangan meski di tengah hamparan hutan dan himpitan pegunungan. Sekitar 35km dari arah kota Lamongan yang dikenal dengan kota soto ini dengan melewati pedesaan, persawahan dan hutan lantas disambut dengan pengunungan kita akan sampai di lokasi Madrasah Darul Ulum Wudi yang terletak di Desa Wudi kecamatan Sambeng ini. Kentalnya suasana pedesaan dapat kita rasakan ketika kita melewati jalanan yang penuh dengan terjal sekitar 15km dari jalan raya, waaaaw hebat bukan. Tapi inilah misi yang sebenarnya dari kegiatan MEDP (Madrasah Education Development Project) yakni untuk menjadikan madrasah sasaran yang disekitar lingkungannya adalah masyarakat yang nota bene dengan nilai pendapatannya dibawah rata-rata untuk menjadi madrasah yang dapat membawa anak didiknya menjadi anak didik yang berkualitas dan tidak kalah dengan madrasah yang ada di kota-kota besar.

MI darul ulum wudi, Sambeng telah berdiri sejak tahun 1953 pada awal pendirian madrasah ini mengadopsi kurikulum pesantren (diniyah), madrasah ini

didirikan oleh seorang ulama' yang bernama H.Nurhadi berikut dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Dengan modal keinginan yang kuat untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat mengajarkan ke-islaman di desanya. Terbentuklah sebuah lembaga diniyah yang beliau beri nama "DARUL ULUM" yang secara bahasa bisa dimaknai sebagai Rumah Ilmu. Berbasis swadaya madrasah ini didirikan dari sebuah gubuk sederhana yang mana bahan-bahannya sebagian besar adalah dari hasil hutan disekeliling daerah tersebut dan dibangun dengan gotong royong untuk dapat mewujudkan Rumah Ilmu yang mereka harapkan untuk generasi mereka yang akan datang.

Diatas sebidang tanah kurang lebih 456m² madrasah ini didirikan, hampir kurun waktu 20 tahun madrasah ini menghidupi dirinya dengan mengandalkan partisipasi masyarakat sekitar, namun dengan kehendak dan rahmat Tuhan YME pada tanggal 20 Maret 1978 madrasah ini mendapatkan ruang public dimata Departemen Agama setempat ditandai dengan diterbitkannya SK pendirian dan piagam madrasah oleh Departement Agama kabupaten Lamongan.

Semenjak diterbitkannya SK Departemen agama di lingkungan Kabupaten lamongan, lembaga ini barulah dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan kehendak amanah Undang-undang dasar, bantuan demi bantuan pun tak lepas dalam pembangunan yang ada dilembaga Darul Ulum Wudi. Pada tahun 1989 lembaga mendapatkan rehabilitasi 4 gedung ruang kelas. Bukan hanya bantuan fisik itu saja, Yayasan Darul Ulum melengkapinya dengan sarana dan parasarana lainnya agar dapat menjadi lembaga yang sebagaimana mestinya, begitu pula Guru sebagai tenaga pengajar yang pada awal pendiriannya hanya sebagai guru yang tanpa gaji akan tetapi semenjak itu guru-guru tersebut mendapatkan sedikit rejeki dari apa yang mereka lakukan sebagai tenaga pengajar di lembaga Darul Ulum Wudi ini.

Pada tahun 2009 - 2012 madrasah Darul Ulum Wudi diberikan kepercayaan oleh Departement Agama yang sekarang disebut dengan Kementrian Agama untuk mengelolah dan memanfaatkan anggaran Hibah (Loan) yang berasal dari ADB (*Asian Development Bank*) sebesar Rp. 449.629.000,- adapun anggaran tersebut diberikan secara Cuma-Cuma dan bertanggungjawab oleh kementrian

Agama untuk dimanfaatkan dalam beberapa kegiatan yakni : (a) Kegiatan Peningkatan Mutu Madrasah (KKG/MGMP), (b) Sarana Prasarana, (c) Ketenagaan, (d) serta Peserta didik. Pada tahun 2009 madrasah mendapatkan persetujuan untuk membangun 3 (tiga) lokal ruang kelas baru yang mana dengan adanya pembangunan ruang kelas ini madrasah dapat menampung lebih banyak lagi siswa-siswi di tahun depan. Dari tahun 2007 sampai tahun 2009 madrasah mendapatkan pengakuan dari badan akreditasi yakni berkreditasi B oleh karena itu diharapkan dengan adanya penambahan 3 lokal gedung yang sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia) maka madrasah akan mendapatkan status Akreditasi tertinggi dalam penilaian badan tersebut.

3.2.2.3. Visi dan Misi Madrasah.

Dengan Visi “Terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah dan berprestasi ” dan Misi “1. Menjadikan MI Darul Ulum sebagai lembaga pendidikan percontohan, 2. Menjadikan MI Darul Ulum sebagai lembaga pendidikan berbasis da’wah.” Madrasah diharapkan dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki ciri khas sebagai lulusan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum wudi ini.

3. 2.2.4. Data Siswa Dan Guru

1. Siswa

Table 3.8.

Jumlah siswa Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum

KELAS	JUMLAH SISWA			
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
I	13	13	15	18
II	23	13	13	15
III	17	23	13	13
IV	15	17	23	13
V	21	15	17	23
VI	14	21	15	17
JUMLAH	103	102	97	99

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, 2012

2. Guru

Table 3. 9.
Daftar Guru Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum
Tahun Pelajaran 2010/2011

No.	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
1	S2	1	-
2	S1	9	-
3	D2	1	-
4	SMA	2	Proses S1 program MEDP
Total Guru		13	

Sumber: Telah diolah kembali

3. Perkembangan Capaian Akademis Madrasah

a. Hasil Ujian Nasional

Tabel 3.10.
Hasil Ujian Nasional MI Darul Ulum

Tahun Pelajaran	Rata-rata Pelajaran			Jumlah
	BIN	Matematika	I P A	
2008 / 2009	7,43	7,63	7,38	22.44
2009 / 2010	7,43	7,63	7,75	22.81
2010 / 2011	7,45	7,64	8,22	23.21

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, 2012

b. Nilai rata-rata Ujian Madrasah

Tabel 3.11.

Hasil Ujian Madrasah

Tahun	Rata-rata Pelajaran							Jml
	A.Akhlak	Fiqih	Qur'dits	SKI	B.Arab	PKn	IPS	
2008 / 2009	7,56	8,06	7,88	8,02	7,60	8,0	7,52	54,64
2009 / 2010	7,64	8,11	7,68	8,00	7,82	7,8	7,20	54,25
2010 / 2011	7,78	8,56	8,00	8,10	7,60	8,0	7,67	55,71

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, 2012

3.2.2.5. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.12. Sarana Fisik

NO	Sarana	Jumlah				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Ruang Kelas	6	6	6	6	6
7	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	-	1
8	WC	1	1	1	1	4
9	Ruang Ibadah	-	-	-	-	1
10	Ruang Kantor Guru	1	1	1	1	1

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, 2012

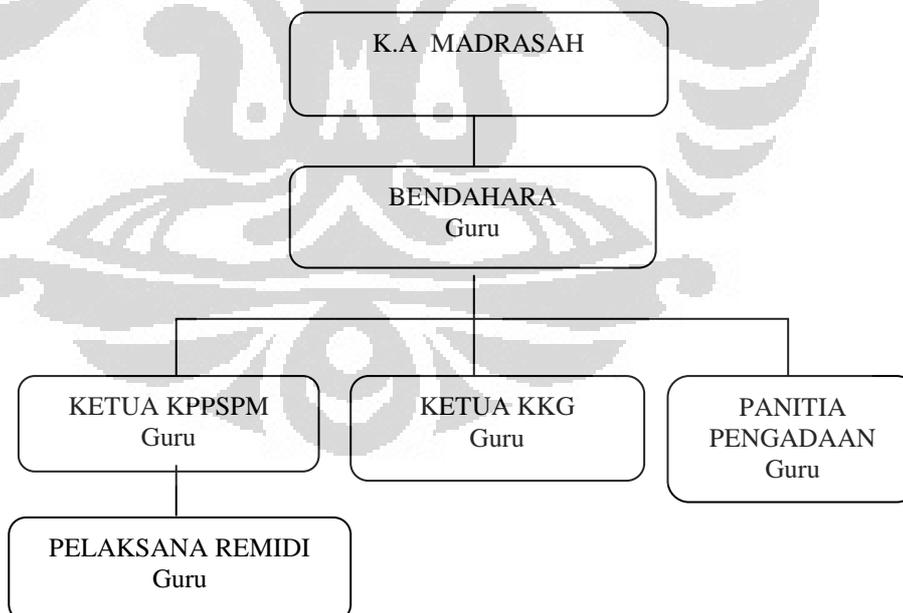
2. Prasarana Fisik

Tabel 3.13. Prasarana Fisik

NO	Prasarana	Jumlah			
		2007	2008	2009	2010
1	Perpustakaan				
	Buku Pengayaan	3200ex	3200ex	3400ex	3400ex
	Buku Referensi	10	10	15	15
	Buku Panduan Pendidik	20	20	20	20
2	Komputer	1	1	1	1
	Laptop	1	1	2	4

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, 2012

3.2.2.6. Struktur organisasi pengurus MEDP di MI Darul Ulum



Bagan 3. 4. Struktur Organisasi MEDP Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Wudi

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, 2012

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara, dan dari kajian terhadap data-data yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah, Kedungmegarih, Kembangbahu, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum, Wudi, Sambeng, diperoleh beberapa informasi dan fakta-fakta yang secara umum data-data tersebut dikumpulkan dan diolah serta diorganisasikan untuk kepentingan menjawab rumusan masalah yang tercantum pada bab pendahuluan.

Penelitian evaluasi ini dibagi menjadi dua bagian besar yang meliputi: *Pertama*, Penelitian untuk menjawab tentang proses pelaksanaan program bantuan *block grant* MEDP. *Kedua*, Penelitian untuk mencari faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program.

Dengan mengacu pada indikator kinerja program *block grant* MEDP yang telah ditetapkan oleh pengelola program, penelitian evaluasi pelaksanaan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kedungmagarih, Kembangbahu dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Wudi Sambeng, mencakup beberapa aspek, yaitu : *Input*, proses, dan capaian. Masing-masing aspek ini memiliki komponen yang mendukung konsep atau kerangka berfikir penelitian. Penelitian ini dibatasi hanya sampai pada komponen pelaksanaan saja (tidak sampai mengevaluasi *impact*) dikarenakan *impact* merupakan hasil yang diharapkan dalam jangka panjang. Sedangkan program yang dievaluasi adalah program yang berjalan dimulai dari tahun 2007 namun proses pencairan dana tahap pertamanya baru terealisasi pada akhir tahun 2009 dan program direncanakan selesai pada bulan Desember 2012, sehingga belum dapat dilihat *impact* yang diharapkan.

4.1. Pelaksanaan Program *block grant* MEDP di MI Islamiyah, Kedungmegarih, Kembangbahu, dan MI Darul Ulum, Wudi. Sambeng, Lamongan, Jawa Timur

Hasil penelitian tentang pelaksanaan program *block grant* di MI Darul Ulum, Wudi, Sambeng dan MI Islamiyah, Kedungmegarih, Kembangbahu, adalah sebagai berikut :

4.1.1. Aspek *Input* (Masukan)

Merujuk kepada indikator kinerja program MEDP bahwa aspek *input* dalam pelaksanaan program bantuan *block grant* meliputi/mencakup dana yang di dapat oleh madrasah, sumberdaya manusia (SDM) yang melaksanakan program, serta sarana dan prasarana fisik seperti ruangkelas baru, rehab, laboratorium, perpustakaan, buku-buku, dan media pembelajaran yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program *block grant* MEDP. Oleh karena itu evaluasi *input* pada penelitian ini akan terfokus pada tiga komponen tersebut.

4.1.1.1. Dana

Dana *block grant* diberikan kepada Madrasah secara langsung ke rekening masing-masing madrasah sesuai dengan Rencana Pengembangan Madrasah (MDP) yang telah di buat oleh madrasah pada awal program dan disetujui Kementerian Agama Pusat. Jumlah dana yang diterima oleh madrasah telah sesuai dengan MDP yang telah dibuat seperti yang di ungkapkan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah sebagai berikut:

“Dana Block grant yang di terima berjumlah: Rp. 536.971.500” (A.H.M, Juni 2012)

Dan demikian juga konfirmasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum :

“Dana Block grant yang di dapat totalnya: Rp. 449.620.000 sesuai dengan MDP yang sudah disetujui” (SN, Juni 2012)

Untuk memanfaatkan atau menggunakan dana *block grant* yang telah di transfer ke rekening madrasah tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Agama Pusat dan ADB. Karena dana *block grant* yang disalurkan kepada madrasah tersebut telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, yang sumber dananya dari pinjaman ADB, maka dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana tersebut madrasah harus mengikuti ketentuan dan prosedur pelaksanaan penggunaan dana sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Pemerintah Indonesia dan ADB. Oleh karena itu, CPMU MEDP sebagai tim pengelola Block grant di pusat, membuat petunjuk teknis

pengelolaan *block grant* bagi Madrasah dengan tujuan umum untuk menyamakan pola pikir, pengertian, langkah, dan memberikan pedoman teknis dan administratif yang jelas sehingga memudahkan semua pihak dalam melaksanakan proses pembangunan sarana fisik dan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya. Dan tujuan khususnya adalah untuk menjadi rujukan para pelaksana program MEDP dalam merencanakan program *block grant*, menjadi rujukan para pelaksana program MEDP, khususnya madrasah dalam melaksanakan program *block grant* untuk semua kegiatan, dan menjadi rujukan para pelaksana program MEDP mulai dari CPMU, PCU, DCU dan Madrasah dalam memberikan penilaian kinerja pelaksanaan, baik yang berkaitan dengan waktu, program atau kegiatan dan biayanya.

Pedoman/Petunjuk teknis pengelolaan *block grant* tersebut diberikan kepada madrasah pada awal sosialisasi *block grant* pada rapat koordinasi tingkat nasional yang dihadiri oleh Tim CPMU Pusat, Koordinator PCU, Koordinator DCU, para Fasilitator, dan para Kepala Madrasah. Pedoman/Petunjuk teknis tersebut mencakup semua yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program *block grant*, termasuk penetapan madrasah penerima *block grant*, Tugas dan Fungsi Institusi di lingkungan Kementerian Agama dalam program *block grant*, penyaluran, pencairan dan mekanisme *block grant*, Penggunaan dan pembukuan *block grant* madrasah, Pelaporan *block grant*, dan Spesifikasi *Block grant*.

Berdasarkan hasil penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, didapat informasi bahwa para madrasah menerima buku panduan /juknis pengelolaan program *block grant* saat mengikuti sosialisasi program. Dalam perjalanan pelaksanaannya, panduan/juknis tersebut selalu berubah sehingga membingungkan para pelaksana program di daerah / madrasah yang terkait. Informasi ini disampaikan oleh pihak bendahara untuk MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Darul ulum dengan ungkapan:

“ Juknis kami dapat tapi karena selalu berubah-berubah membuat bingung. Pada perjalanan tidak sama dengan yang awal di ditetapkan. Kalo dari ketentuan yang selama ini sudah sesuai juknisnya. Sebenarnya juknis cukup membantu. Dan sekarang sudah dapat di mengerti.” (AKM, Juni 2012)

Ketika hal serupa kami tanyakan kepada pihak Bendahara untuk MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, didapatkan informasi yang kurang lebih sama dengan yang dikatakan Bendahara MEDP di MI Darul Ulum:

“Juknis di diberikan saat sosialisasi, pada awalnya sulit untuk memahami apalagi selalu berubah juknisnya sehingga membuat bingung . tapi sekarang ini sudah mulai lebih faham .”(AM, Juni 2012)

Hal tersebut diatas di konfirmasikan lagi oleh Staff Admin dan staf MONEV di DCU sebagai hambatan dalam pelaksanaan program block grant ini di dapat dilihat dari dua ungkapan di bawah ini:

“Pedoman atau juknis yang selalu berubah mengambat proses pelaporan madrasah karena bingung bagaimana seharusnya pelaporannya.” (SM, Juni 2012)

“Pedoman yang berubah-ubah membuat bingung para pelaksana di lapangan.” (A.K, Juni 2012)

Terkait dengan Mekanisme penyaluran dana, pengambilan dana dan alokasi dana, telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam buku panduan/juknis yang telah diberikan, hal ini dapat dilihat dari ungkapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum sebagai berikut:

“Mekanisme penyaluran dana ke madrasah. Dari pusat dana masuk ke BRI, dana di cairkan setelah mendapat rekomendasi dari Koordinator DCU bersama dengan Kepala sekolah dan Ketua Komite., dana untuk 1 kegiatan dikeluarkan berdasarkan 3 termyn, Kegiatan, pembangunan, pengadaan (furniture kelas) untuk semua kegiatan perlu persetujuan DCU. Untuk pengalokasian dananya sudah Sesuai dengan MDP yang sudah diajukan dulu, sudah terplot semua, jadi dilaksanakan sesuai dengan revisi MDP yang ada.”(SN, Juni 2012)

Demikian juga ungkapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah mengenai mekanisme penyaluran dana, pengambilan dana dan alokasi dana sebagai berikut:

“Dana di transfer dari pusat ke rekening Madrasah, untuk pencairan, madrasah mengajukan proposal yang di tanda-tangani oleh Kepala Madrasah dan Komite sekolah, lalu setelah disetujui oleh Koordinator DCU, dana di cairkan dari rekening madrasah. Pengalokasian dana: sesuai dengan rencana MDP yang sudah di revisi. “ (MR, Juni 2012)

Dan hal ini juga telah di konfirmasikan oleh salah satu Project Technical Committe MEDP yaitu Kasubdit Kelembagaan Kementerian Agama yang pernah menjabat sebagai ketua CPMU/project Manajer sebagai berikut:

“Penyaluran Block Grant itu sebenarnya berbasis perencanaan yaitu perencanaan pengembangan madrasah (MDP) yang dibuat oleh madrasah dan disetujui oleh Kementerian Agama pusat, lalu di usulkan ke ADB, dan setelah keluar approval ADB, pencairan dilakukan. Pencairan langsung ke rekening Madrasah. Dan dulu...ada kebijakan yang saya usulkan, bahwa untuk madrasah dalam mencairkan dana, harus ada endorsement /persetujuan dari Koordinator DCU, sebagai kontrol kementerian agama di kabupaten terhadap pelaksanaan block grant di madrasah. karena madrasah2 yang menerima block grant ini kan 90 %nya swasta. Yang tidak begitu paham dengan ketentuan-ketentuan pengolahan dana yang berasal dari APBN, walaupun diluncurkannya dalam bentuk block grant ke madrasah langsung.” (RM, Juni 2012)

4.1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen *input* pada indikator kinerja program yang menjadi target program *block grant* MEDP yaitu: Kepala Madrasah, Bendahara dan Guru-guru madrasah berkualifikasi S1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai akan sangat menentukan efektifitas pelaksanaan program. Dari hasil penelitian di lapangan terdapat struktur organisasi yang berbeda untuk mengelola program bantuan *block grant* MEDP.

Pada Struktur organisasi pengelola bantuan *block grant* MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum tidak terlihat adanya keterlibatan tokoh masyarakat di

dalamnya. (Bagan 3.4. h. 94). Sedangkan pada struktur organisasi pengelola bantuan *block grant* MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah terlihat melibatkan tokoh masyarakat dan Komite Madrasah. Dan terlihat juga bahwa pengelola *block grant* di MI Islamiyah lebih terorganisir dengan ikut sertanya guru-guru madrasah sebagai pelaksana program tersebut dan masing-masing personil mempunyai tanggung jawab terhadap bidang yang di bawahinya. (Bagan 3.3 h. 88).

Setelah ditelusuri, dalam panduan/juknis pengelolaan bantuan *block grant*, ataupun dokumen lainnya, ternyata pembentukan bagan organisasi ataupun pembagian tugas untuk pengelola bantuan *block grant* di Madrasah tidaklah di tetapkan atau tidak ada ketentuannya. Hanya sebaiknya untuk menjalankan suatu aktivitas, memang perlu penugasan yang jelas agar, tidak terdapat tumpang tindih terhadap satu pekerjaan.

Koordinator DCU Lamongan, Kementerian Agama RI, mengungkapkan bahwa sumber daya manusia pelaksana program bantuan *block grant*, memang masih kurang, baik dari jumlahnya maupun dari kemampuannya seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Di madrasah di swasta rata-rata SDMnya kurang, baik jumlah maupun kemampuannya. Hanya karena kerja keras dan kemauan saja sehingga dapat berjalan sesuai dengan yg diinginkan dan dianjurkan. pelatihan memang perlu terutama perubahan terhadap mind set. Dan Karena memang sasaran MEDP dari kelas menengah ke bawah baik dari sisi geografisnya, dari sisi kemampuan madrasahny, termasuk dari sisi sdmnya. Alhamdulillah setelah berjalan 3 – 6 bulan sudah bisa menyesuaikan diri, kemudian menjalankan tugasnya dengan baik. walaupun masih banyak kekurangan.”(MR, Juni 2012)

Dan menurut beberapa informan, SDM Pelaksana program *block grant* MEDP sudah lebih baik dari pada awal program, ini dapat terlihat dari ungkapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum sebagai berikut:

“Kualitas SDM pelaksana program MEDP, pada awalnya memang kurang mampu, tapi sekarang sudah cukup mampu seperti bendahara, kppspm

(panitia yang membangun sekolah) yang mungkin anggotanya ada di komite madrasah.” (SN, Juni 2012)

Demikian juga menurut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah:

“SDM sudah bagus, karena dari nol, diajak berunding terus, dan baca buku-buku dari MEDP, maka sudah sampai bisa melaksanakan, kan sudah bagus. Seandainya tidak ada MEDP, maka tidak mengerti sama sekali.” (AHM, Juni 2012)

Dan ini di konfirmasi oleh Staf Admin dan Procurement di DCU:

“Untuk MI Islamiyah insyaAllah lebih memahami, lebih baik koordinasinya, lebih baik, dan banyak fahamnya. Kalo MI Darul Ulum, memang agak harus lebih di arahkan pemahamannya. Karena agak lambat untuk menerima masukan.” (SM, Juni 2012)

Staf MONEV di DCU pun mengungkapkan sebagai berikut:

“Keadaan SDM, sebenarnya dengan guru-guru yang bertitel S.Pd. S.Ag, maka untuk melaporkan anggaran seperti yang diinginkan oleh project, itu kan tidak sepenuhnya bisa berjalan langsung, artinya di tahun pertama mereka harus banyak bimbingan banyak perlu di beri pelatihan terkait dengan pelaporan itu sendiri, tapi di tahun ke2 dan ke 3 itu semua sudah berjalan lancar terkait dengan SDM.”(informan: A.K, 2012)

4.1.1.3. Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja program pada aspek input komponen Sarana dan Prasarana, mencakup Ruang Kelas Baru, Rehab, Laboratorium, Perpustakaan, dan Media Pembelajaran sesuai dengan standar nasional, yaitu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.”

Dari hasil pengamatan langsung ke lapangan dan berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, Sarana dan prasarana yang dibiayai oleh dana block

grant MEDP telah sesuai dengan standar nasional dan sangat membantu dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran di madrasah. Kesesuaian tersebut adalah karena telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Misalnya ruang kelas, ukuran ruang kelas harus sesuai dengan jumlah peserta didik. Kapasitas maksimum 28 peserta didik per ruang kelas, dengan rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m²/peserta didik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah berikut adalah ungkapan-ungkannya:

“Ketentuan mencakup ruang kelas misalnya, meskipun ada yang tidak sesuai dengan kondisi, misalnya gedung harus ukuran sekian, tapi sekarang tidak, jadi 1 siswa 2 mtr.” (AHM, Juni 2012)

“Jelas terlihat bu, kalo dulu sering di datangi wali muid di kompalin, karean ada 1 kelas 56 siswa dengan ukuran kelas 6 x 6, sekarang alhamdulillah, sudah ada tambahan ruang kelas. Bangunan sudah memenuhi standar nasional, tapi masih kurang kelas karena kelas II sudah lebih dari 40 orang per kelas. Untuk buku pelajaran yang dahulu bergantian memakainya, kini sudah bisa satu orang satu buku. Dengan adanya bangunan yang bagus, siswa jadi betah sekolah dan rajin ke sekolah.” (AHM, Juni 2012)

Demikian juga halnya dengan perpustakaan, kedua madrasah ibtidaiyah mempunyai ruang perpustakaan yang telah dilengkapi dengan buku-buku teks, buku-buku referensi, buku-buku pengayaan sehingga siswa pun senang pergi keperpustakaan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum berikut:

“Untuk perpustakaan buku-buku pelajaran dan buku bacaan ada. Siswa jadi rajin ke perpustakaan. Dulu bukunya kurang, sekarang siswa sudah dapat satu buku satu siswa, guru pun sudah bertambah wawasannya.” (SN, Juni 2012)

Hal ini juga dirasakan oleh siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, terhadap fasilitas perpustakaan di sekolahnya seperti terungkap berikut ini:

“Waktu dulu belum di tingkat, sekarang sudah, dulu ada perpustakaan tapi berbeda, karena dulu perpus kecil, sekarang besar dan untuk bukunya lebih banyak sekarang. Jadi enak belajarnya.”(ANL, Juni 2012)

Dan Media pembelajarannya pun telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan, yaitu dengan adanya salah satu jenis media pembelajaran yaitu : projected still media (LCD) yang dipakai oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah dibawah ini:

“Membantu : kalo pelajaran Haji, guru saja belum haji, jadi tidak bisa membayangkan bagaimana pelaksanaan haji, tapi dengan adanya proyektor maka anak-anak dapat melihat pelaksanaan haji dari tayangan video yang ada.” (UT, Juni 2012)

Menurut informasi Komite Madrasah di MI Darul Ulum:

“Dengan adanya dana MEDP, otomatis sarana dan prasarannya semakin meningkat, dan telah sesuai dengan standar nasional.”(S. Juni 2012)

Demikian juga menurut salah satu Guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum:

“Membantu dalam proses pembelajaran karena untuk sarana phisik, kita sudah sedikit banyak terbantu, lebih rapi dan siswa dalam belajar menjadi lebih kerasan.” (DH, Juni 2012)

Sedangkan menurut salah satu Orang tua siswa yang merangkap Komite Madrasah di Madrasah Islamiyah Islamiyah :

“Menurut laporan yang sudah di berikan saat rapat wali murid, sangat menunjang, jika menurut anak2 saja dulu lantainya masih tekel yg dulu sekarang sudah keramik, kalo dulu wali murid banyak yang komplain, karena rata2 siswa 1 kelas itu 40an, dan sekarang sudah ada kelas yg di paralelkan, maka ada kelas yg sudah paralel.” (AF, Juni 2012)

Demikian juga menurut Kepala Madrasah MI Darul Ulum bahwa Sarana dan prasarana sangat membantu meningkatkan pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari ungkapan sebagai berikut:

“Prasarana dan sarana, alhamdulillah sudah bagus.. banyak sekali perbedaan, pada awalnya kurang ruang kelas, tapi sekarang sudah bertambah (3 ruang baru), yang rusak dapat di perbaiki. Fasilitas pembelajaran lebih baik karena sudah bisa mengakses IT walau pake modem Fasilitas pembelajaran meningkat sekali. Dapat ibu bandingkan dengan SD negeri disekitar sini, keadaannya sangat jauh berbeda. Untuk perpustakaan buku2 pelajaran dan buku bacaan ada. Dulu bukunya kurang, sekarang siswa sudah dapat satu buku satu siswa, guru pun sudah bertambah wawasannya. “ (SN, Juni 2012)

4.I. 2. Aspek Proses (Pelaksanaan)

Berdasarkan indikator kinerja program bantuan *block grant*, aspek proses mencakup pelaksanaan peningkatan komponen profesionalisme guru, peningkatan ketersediaan sumber daya belajar-mengajar sesuai dengan standar nasional, dan efisiensi internal madrasah serta terpenuhinya tata kelola/management madrasah sesuai dengan standar nasional. Hasil penelitian pada aspek proses akan diuraikan sebagai berikut:

4.1.2.1. Profesionalisme guru meningkat sesuai dengan standar nasional.

Indikator kinerja terhadap komponen ini dapat dilihat dari kualifikasi guru yang telah bergelar S1 dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan Bab VI pasal 28 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bahwa: seorang pendidik dapat dikatakan Profesionalisme jika memiliki kualifikasi akademik (S1) dan berkompotensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial

Berdasarkan penelusuran dokumentasi terhadap data guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum tidak ada guru yang telah tersertifikasi sedangkan di madrasah Ibtidaiyah Islamiyah terdapat 2 guru yang telah tersertifikasi. Data tersebut dapat lihat pada Tabel 4.1. berikut:

Table 4. 1. Data guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	
	MI Darul Ulum	MI Islamiyah
SMA	2 (Proses S1)	0
D2	1	2 (proses S1)
D3	0	0
S1	9	12
S2	1	0
Sertifikasi	1 (dalam proses)	2
Total Guru	13	16

Sumber: Telah diolah Kembali

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa informan, pada komponen peningkatan profesionalisme guru. Bahwa sebagian besar guru-guru di madrasah ibtidaiyah Darul ulum dan madrasah ibtidaiyah Islamiyah sudah berkualifikasi S1 dan ada 2 orang guru MI Darul Ulum dan 2 orang guru dari MI Islamiyah yang sedang mengikuti program beasiswa S1 dari dana MEDP sedangkan 1 orang guru MI Islamiyah yang sedang mengikuti pendidikan S1 dengan biaya sendiri. Berikut adalah ungkapan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum:

“Peningkatan SDM (guru) hampir seluruhnya S1 tinggal 2 orang yang sedang process S1 ya itu..yang ikut program beasiswa S1 MEDP, sebelum dapat MEDP masih ada yang D2, karena tuntutan dari sekolah, jadi mereka dengan biaya sendiri mengambil S1.” (SN, Juni 2012)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah tentang pendidikan guru-guru di madrasahnya sebagai berikut:

“Guru2 sudah S1 semua, dan masih 2 orang yg sedang pendidikan S1 melalui program MEDP. Kepala Sekolah - Sudah tersertifikasi .” (AHM, Juni 2012)

Dari ungkapan bendahara untuk MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, terlihat bahwa profesionalisme lebih meningkat karena adanya pelatihan-pelatihan dari dana block grant sebagai berikut:

“Dengan adanya dana *block grant*, maka ada dana untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, studi banding ke sekolah lain, agar wawasan guru bertambah.” (AM: juni 2012)

Demikian juga pendapat bendahara untuk MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum tentang peningkatan profesionalisme guru dan suasana pembelajaran di sekolah seperti ungkapan berikut:

“Profesionalisme guru meningkat dengan adanya dana MEDP, karena sarannya meningkat, jadi betah untuk di sekolah. Dan adanya pelatihan², seperti KKG MGMP dan pelatihan yang di dapat dari pusat seperti subject content .”(AKM: juni 2012)

Hal ini juga di konfirmasi oleh salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum sebagai berikut:

“Yang jelas dengan adanya peningkatan fisik dan non fisik, sangat menungjang sekali ada alokasi khusus untuk peningkatan guru, seperti pelatihan, KKG, terbantu dengan pelatihan tersebut.”(DH: juni 2012)

Demikian juga pendapat salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah berikut ini:

“Dengan adanya pelatihan-pelatihan yg di danai oleh *block grant* MEDP sangat membantu meningkatkan profesionalisme guru.”(UT: juni 2012)

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah juga mengkonfirmasikan hal ini:

“Untuk meningkatkan profesionalisme guru: Sering mengadakan pelatihan, studi banding ke sekolah SBI dan KKG. Banyak yang sudah studi banding ke MI ini juga.”(AHM: juni 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu project technical committee MEDP yaitu Kasubdit Kelembagaan Kementerian Agama yang pernah menjabat sebagai ketua CPMU/project Manajer menyatakan bahwa peningkatan Qualifikasi atau strata pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan sertifikasi dapat meningkatkan profesionalisme guru, hal ini seperti yang diungkapkan sebagai berikut :

“Yang pertama kita harus selalu melakukan upaya yang namanya kualifikasi, kualifikasi itu adalah program peningkatan starta pendidikan misalnya dari Diploma menjadi S1, dari S1 menjadi S2 , itu adalah program yang secara sistematis bisa meningkatkan profesionalisme guru, ... yg kedua, melalui training, jadi itu short course, training yg sifatnya tidak terlalu lama tetapi mencakup banyak peserta...training itu bisa pre- service atau in-service training, pre-service itu ya..kuliah itu ...untuk menyiapkan guru...,tapi kalo in-service itu adalah pelatihan dalam jabatan misalkan guru matematika kurang menguasai isi, kita training bagaimana agar guru tersebut bisa menguasai materi tersebut, itu namanya in-service training , yang ketiga ya memang melalui program yg rame sekarang itu ...sertifikasi....itu sebenarnya suatu paradigma yg dibangun bahwa guru itu bisa profesional, kalau tidak memikirkan sisi ekonominya....gitu ... yang merasa kurang terus, kalo mereka mulai merasa sejahtera kan akan lebih professional... itu sebenarnya sangat logic...meskipun sekarang masih saya tidak berkeyakinan bahwa naiknya gaji guru melalui sertifikasi dengans serta merta guru itu menjadi lebih professional, malahan yang lebih terkait dengan tingkat kesejahteraan guru bukan profesionalisme merekaatau bukan dampaknya mereka terhadap peningkatan mutu dan kinerja pada waktu ngajar tapi justru pengaruh dari sertifikasi itu berkaitan atau berhubungan signifikan dengan hutang guru di bank... karena mereka pada ngambil mobil... mobil mewah..., karena memang penghasilannya meningkat ... jadi anggungan untuk pinjamnya itu lebih besar lagi.” (RM, Juni 2012)

4.1.2.2. Peningkatan ketersediaan sumber daya balajar-mengajar sesuai dengan standar nasional

Berdasarkan hasil penelusuran dokumentasi dan observasi lapangan terhadap fasilitas/ prasarana di madrasah ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtaiyah Islamiyah, bahwa sumber daya belajar-mengajar telah sesuai dengan standar nasional yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah seperti misalnya memiliki fasilitas ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, Jamban, gudang dan ruang sirkulasi, dan tempat bermain olahraga, serta memiliki materi belajar-mengajar dalam subject umum yang memenuhi standar nasional.

Berdasarkan penelusuran data, terdapat Sarana dan prasarana Perpustakaan dikedua madrasah Ibtidaiyah sebagai berikut:

Table 4.2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

NO	Sarana	Jumlah	
		MI Darul Ulum	MI Islamiyah
1	Ruang Perpustakaan	1	1
2	Buku Pengayaan	3.400 ex	1.725 ex
3	Buku Referensi	15ex	75 ex
4	Buku Panduan Pendidik	20 ex	36 ex

Sumber: Telah diolah kembali

Untuk prasarana Laboratorium IPA hanya terdapat di MI Islamiyah, sedangkan di MI Darul Ulum tidak ada. Hal ini karena pada awal penyusunan rencana pengembangan madrasah (MDP) ruang laboratorium IPA tidak diusulkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum.

Terkait dengan Peningkatan ketersediaan sumber daya belajar-mengajar sesuai dengan standar nasional, berikut kami sampaikan ungkapan salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah:

“Bangunan sudah memenuhi standar nasional, tapi masih kurang kelas karena kelas II sudah lebih dari 40 orang per kelas.”(UT, 2012)

Begitu jug dengan salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum yang menyatakan sebagai berikut:

“Sarana dan prasarana sudah memenuhi standar nasional, karena bangunan yang di bangun menggunakan dana MEDP, harus sesuai dengan spesifikasi yang sesuai dengan standar nasional,”(DH, 2012)

Hal ini juga di konfirmasi oleh Project Technical Committee di Kementerian Agama Pusat sebagai berikut:

“Setelah dapat bantuan MEDP 100% sarana dan prasarana dari dana block grant madrasah sudah memenuhi standar nasional.”(RM, juni 2012)

4.1.2.3. Efisiensi internal madrasah

Menurut salah satu project technical committee MEDP yaitu Kasubdit Kelembagaan Kementerian Agama yang pernah menjabat sebagai ketua CPMU/project Manajer tentang peningkatan efisiensi internal madrasah belum tercapai 100% hal ini dapat dilihat dari ungkapan beliau sebagai berikut :

“Efisiensi internal madrasah tidak begitu yakin, mungkin hanya 40% karena program transisi itu berat, karena kalo transisi itu tarik menariknya dengan sekolah lain, kalo remedial itu dapat dilaksanakan, jadi harus dijadikan catatan bahwa bukan berarti gagal program ini. Tapi karena persaingannya yg sangat ketat.”(RM, 2012)

Dan hal ini juga diperkuat dengan adanya ungkapan-ungkapan serupa dari salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, seperti tercantum di bawah ini:

“Transisi tidak ada, karena sulit melakukan kontrolnya. Remedial : bagi siswa yg tidak mencapai kkm di beri remedial 1 x tapi jika ternyata belum ada

perbaikan, maka akan di beri 1 kali lagi. Tapi biasanya tidak lebih dari 2 kali.”(DH, Juni 2012)

Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, internal efisiensi madrasah telah terpenuhi sesuai dengan ungkapan salah satu guru sebagai berikut:

“Transisi ada 22 orang anak, dari MI ke MTs di pantau dan di sudah tamat Mts. Tahun ini. Tapi untuk melaksakannya lagi, perlu waktu yang tepat, karena transisi hanya ada pada awal tahun ajar.”(UT, Juni 2012)

Angka pengulangan dan angka drop out merupakan salah satu target kinerja program bantuan *block grant* pada komponen internal efisiensi dan berdasarkan wawancara dan kajian dokumentasi yang telah dikumpulkan peneliti, terdapat kesesuaian capaian, yaitu tidak ada pengulangan dan tidak ada yang drop out. Hal ini dapat kita lihat sesuai dengan ungkapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum berikut:

“Drop out tidak ada. 2 – 3 tahun ini belum ada. Dulu pernah ada karena ikut orang tua.” (SN, Juni 2012)

“Siswa yang mengulang juga tidak ada. Dulu pernah ada, tapi karena faktor orang tua → diminta untuk tidak naik kelas dulu karena usianya belum cukup, padahal sekolah sudah menetapkan lulus.” (SN, 2012)

Demikian juga halnya dengan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah yang di sampaikan oleh Kepala Madrasah dengan ungkapan berikut:

“Drop out : tidak ada, kecuali dibawa orang tua karena mutasi terbawa orang tua.”(AHM, Juni 2012)

“Pengulangan : tidak ada, karena sudah ada ketetapan KKM, jadi kalau masih dibawah KKM diadakan less tambahan di rumah guru dari murid sendiri bukan dari sekolah.”(AHM, Juni 2012)

Pendaftaran masuk MI, juga merupakan salah satu indikator kinerja program pada komponen efisiensi internal, dan berdasarkan hasil wawancara

dengan kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah terdapat peningkatan pendaftaran siswa pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 2 yaitu 255 siswa dibanding dengan pendaftaran pada tahun ajaran 2010/2011 yaitu 253 siswa seperti terungkap dibawah ini:

“Pendaftaran siswa: meningkat pada tahun 2011/2012 dibanding pada tahun 2010/2011 yaitu sebanyak 2 orang, untuk tahun 2012/ 2013 ini insya Allah akan bertambah meningkat. Penurunan siswa pada tahun tahun sebelumnya karena angka kelahiran berkurang karena sudah ada KB.”(AHM, Juni 2012)

4.1.2.4. Tata kelola/management madrasah sesuai dengan standar nasional

Dalam menganalisa terlaksananya komponen Tata kelola management madrasah sesuai dengan standard nasional sesuai indikator kinerja program sebagai berikut: madrasah memiliki MDP berbasis hasil, Kepala sekolah mempunyai kualifikasi S1, Kepala Sekolah mencapai sertifikasi profesional, madrasah memperlihatkan penghasilan/pengeluaran tahunan pada papan pengumuman sekolah, adanya anggaran sekolah dialokasikan untuk peningkatan kualitas, madrasah memiliki komite madrasah yang berfungsi, dengan paling sedikit 30% anggota perempuan, bertemu sekali sebulan, paling sedikit tiga spesialis jaminan mutu bersertifikat di masing-masing MDC, proyek kabupaten meningkatkan pembiayaan untuk madrasah, penulis melakukan triangulasi data. Yaitu dengan melihat penerapan implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di kedua Madrasah Ibtidaiyah.

Dari hasil wawancara terhadap guru-guru, komite sekolah, orang tua siswa dan terhadap Kepala Madrasah itu sendiri, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah menunjukkan indikasi penggunaan tata kelola manajemen berbasis madrasah sesuai dengan beberapa indikasi tersebut yaitu:

- a. Terjadinya proses belajar mengajar yang efektif, dimana keefektifan tersebut dapat meningkatkan kinerja siswa karena suasana belajar yang menyenangkan, tempat belajar yang mendukung, guru yang memberi pelajaran dengan baik dan fasilitas pembelajaran yang ini visual yaitu dengan menggunakan LCD Proyektor dalam proses pembelajarannya hal

ini terlihat pada hasil wawancara dengan beberapa murid kelas V di MI Islamiyah yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembelajaran di kelas, menyenangkan, waktu belajar ada bebandanya tidak terlalu serius. Waktu dulu belum di tingkat, sekarang sudah, dulu ada perpustakaan tapi berbeda, karena dulu perpustakaan kecil, sekarang besar dan untuk bukunya lebih banyak sekarang. Guru memberi pelajaran dengan menyenangkan. Di kelas lebih enak sekarang, ada kipasnya, dulu ngak ada, sekarang mengajarkannya pakai layar (proyektor) karena ada gambar. Untuk pelajaran lebih mengerti sekarang.” (ANL, Juni 2012)

“Di kelas belajarnya enak, karena mudah di terima. Karena ngajarnya tidak pakai kekerasan, tidak pakai menyentak. Enak sekarang karena dulu lantainya belum begini(bagus). Ada pake proyektor ngajarnya.” (MN, Juni 2012)

“Menyenangkan karena ada proyekturnya. Pake Kipas angin. Guru guru mengajar dengan menyenangkan.”(US, Juni 2012)

- b. Adanya peningkatan dan pengoptimalisasian sumber daya, hal ini terlihat pada kemampuan Kepala Madrasah untuk menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap guru-guru dan masyarakat, hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh para guru sebagai berikut:

“Alhamdulillah, semua kegiatan MEDP berjalan, karena adanya keterbukaan sekolah, semua guru dan orang tua siswa mengetahui. Kepala sekolah yang profesional dan terbuka.”(UT, Juni 2012)

“Management madrasah sudah berjalan baik, karena tanpa kepala madrasahpun (kamad sedang tugas luar) maka sekolah tetap berjalan. karena sudah adan SOPnya sendiri.”(AM, Juni 2012)

- c. Pengambilan keputusan yang demokratis. Dalam mengambil keputusan, madrasah melibatkan semua pihak dan dilakukan secara terbuka.

Hal ini di dapat terlihat dari ungkapan salah satu guru berikut:

“Program MEDP selalu di sosialisasikan kepada masyarakat dan orangtua siswa misalnya pada saat ambil raport dan rapat2 lainnya demikian juga dengan hal-hal lainnya, jika diperlukan, akan kami musyawarahkan bersama.” (AM, Juni 2012)

Dan ungkapan ketua komite madrasah berikut:

“Informasi tentang BG, pernah, karena dilembaga kami setiap bulan ada pertemuan rapat komite, biasanya bergantian dari rumah ke rumah. Jadi insyaallah komite tau semuanya.” (AF, Juni 2012)

- d. Semua pihak harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Maksudnya adalah terdapat pembagian tugas dan pengaturan terhadap masing-masing tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Hal ini terlihat dari ungkapan salah satu guru berikut ini:

“Management madrasah sudah berjalan baik, karena tanpa kepala madrasahpun (kamad sedang tugas luar) maka sekolah tetap berjalan. karena sudah adan SOPnya sendiri.” (AM, Juni 2012)

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah seperti terungkap sebagai berikut:

“Iya jelas lebih baik bu, management sekolah, jadi tanpa saya hadir di sekolah, karena adanya SOPnya sendiri, maka sekolah tetap berjalan. Jam 7 masuk, tanpa ada saya, tidak ada guru yg terlambat.”(AHM, 2012)

- e. Peran serta masyarakat. Masyarakat turut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini dapat terlihat dari keterlibatan

masyarakat sebagai komite madrasah yang selalu berpartisipasi dalam semua kegiatan madrasah. hal ini terlihat dari ungkapan komite madrasah berikut:

“Untuk alokasi dana, selalu ada pertemuan bulanan dan pertemuan moment2 tertentu, kami juga dilibatkan untuk diajak musyawarah.” (AF, Juni 2012)

“Partisipasi masyarakat sangat peduli, misalnya ketika mereka diberi informasi ada pertemuan minimal 2 kali setahun, masyarakat sangat peduli, dan untuk kekurang dana, masyarakat membantu baik dalam bentuk tenaga, ataupun bahan2 lain.”(AF, Juni 2012)

Demikian juga hal nya dengan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, yang juga mengindikasikan adanya penggunaan Manajemen Berbasis Madrasah, yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab, serta rencana kerja madrasah, dan memiliki transparansi dalam akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang kuat seperti yang diungkapkan dari Kepala Madrasah, berikut:

“Tata kelola manajemen madrasah, terdapat peningkatan, yaitu dengan adanya pembagian tugas. Selama ada MEDP ada MDP dan setelah MEDP tidak ada, ada RKM, Rencana Kerja Madrasah yaitu rencana mau di apakan sekolah ini. Agar sekolah tetap dapat meningkat dan tambah bagus.”(SN, 2012)

Terlihat juga dari ungkapan komite madrasah di bawah ini, bahwa akuntabilitas yaitu dengan adanya pengalokasian dana yang transparan yaitu dengan diikutsertakannya komite madrasah dalam perencanaan pengalokasian dana.

“Untuk pengalokasian dana BG selalu diajak, kalo soal itu, melihat rencananya saja, dan setelah persetujuan dari semua pihak, maka pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk pengalokasian cukup puas.”(S, Juni 2012)

“Partisipasi masyarakat, disini sangat baik sekali, sebagai penyambung lidah, dari komite kepada masyarakat, sehingga sosialisasi menjadi lebih mudah. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan lebih mudah. Anggotanya saja banyak sekitar 18 orang, agar dari desa ke desa dapat menyambung.”(S, Juni 2012)

Namun untuk target sertifikasi terhadap kepala sekolah maupun guru-guru lainnya, belum dapat mencapai indikator capaian yang diharapkan program, karena banyak sekali persyaratan yang harus di penuhi, dan itu dapat dilihat dari ungkapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum berikut:

“Guru2 lainnya sudah ada yang tersertifikasi, ada yang masih dalam proses. Tapi susah untuk mendapat sertifikasi, selalu mengajukan tapi tidak pernah lolos. Termasuk yang diadakan oleh MEDP. Namun sejak tahun 2010 sertifikasi dari MEDP tidak ada. Karena sudah dibawah Kemenag langsung.”(SN, 2012)

Dan di perkuat oleh salah satu guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum berikut ini:

“Sudah S2 tapi belum sertifikasi, karena sulit untuk mendapat quotanya.”
(DH, Juni 2012)

Untuk indikator peningkatan pembiayaan untuk madrasah di kabupaten, belum ada alokasi dananya, namun ada pelatihan-pelatihan yang dikoordinasikan oleh kabupaten yang dananya berasal dari urunan bersama para madrasah, seperti diungkapkan oleh salah satu guru Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah berikut:

“Dari propinsi tidak ada, kalau dari kabupaten ada pelatihan-pelatihan.”(UT, Juni 2012)

Hal ini di konfirmasi oleh staf MONEV di DCU sebagai berikut:

“Pelatihan dari kabupaten ada, sering... diawal implementasi, seperti pelatihan KPPSPM, yakni KPPSPM itu Komite Pelaksana Pembangunan dan Pengadaan Madrasah itu dilatihkan secara khusus selama dua hari bertempat di MTsN Babat, terus juga ada juga pelatihan bendahara sebelum

kedatangan BPKP sebagai bahan evaluasi pencatatan keadaan anggaran di madrasah, baik itu anggaran yang diturunkan dari pusat ataupun juga bunga2 atau pajak dan lain sebagainya. dan Juga pelatihan tentang penindakan subject content, kenapa?...karena yg diundang oleh CPMU untuk guru yg subject content itu tidak semuanya sehingga yang diundang itu kami harap bisa menyebarkan luaskan ilmunya kepada yang tidak diundang. Itu beberapa pelatihan yang diadakan di kabupaten. Dananya itu urudan, jadi karena madrasah itu kan ada anggaran pelatihan, hanya karena inisiatif diri, disatupadukan sesuai dengan keinginan madrasah. Misalnya madrasah A B C ini kok ingin melaksanakan pelatihan ini, harus ada pesertanya nih pak, sehingga dijadikan satu, karena ketika dilaksanakan di satu madrasah saja kan kurang maksimal karena terbatasnya peserta. Sehingga dilaksanakan di kabupaten.”(AK, Juni 2012)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengalokasian anggaran madrasah untuk peningkatan kualitas, ternyata, di masing-masing madrasah terdapat ketentuan tersendiri, misalnya untuk MI Darul Ulum, anggaran madrasah untuk peningkatan kualitas dianggarkan sebesar 10% dari total anggaran madrasah. sedangkan di MI Islamiyah, anggaran untuk peningkatan kualitas madrasah ada 30% dari total anggaran. Hal ini berdasarkan informasi dari kepala madrasah ibtidaiyah Darul Ulum seperti terungkap sebagai berikut:

“Ada alokasi dana dari yayasan untuk pengembangan madrasah sebesar 10% dari anggaran, tapi setiap tahun berbeda, tergantung kebutuhan.”(SN, Juni 2012)

Dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah mengungkapkan sebagai berikut:

“Sekolah mengalokasikan dana untuk peningkatan RAPBM rencana Anggaran Peningkatan Mutu Madrasah 30% dari anggaran.” (AHM, Juni 2012)

Indikator Komite madrasah yang berfungsi dengan beranggotakan paling sedikit 30% anggota perempuan dan bertemu sekali sebulan. Dari hasil

pemantauan di kedua madrasah ibtidaiyah, komite madrasah di dominasi oleh anggota pria, para wanita hanya sebatas untuk menyeduaikan konsumsi saja, dengan alasan bahwa, ketika rapat dilaksanakan, biasanya dilakukan pada malam hari, sehingga untuk ibu-ibu mereka tidak bisa ikut dalam rapat tersebut. Perihal pertemuan komite, di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, pertemuan rutin diadakan 3 bulan 1 kali, atau jika perlu seperti diungkapkan oleh Kepala Madrasah sebagai berikut:

“Untuk komite madrasah ada 18 orang. Lknya 10, perempuan 8 orang. Pertemuan rutin 3 bulan sekali, tapi bisa juga sewaktu2 kala diperlukan.”(SN, Juni 2012)

Sedangkan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, sudah terjadwal pertemuan 1 x per bulan. Seperti diungkapkan oleh kepala madrasah berikut:

“Komite yg aktif 7 : 5 lk-lk 2 perempuan. Perempuan biasanya mengurus konsumsi. Pertemuan rutin sebulan sekali.”(AHM, Juni 2012)

Untuk Indikator paling sedikit tiga spesialis jaminan mutu bersertifikat dimasing-masing MDC, tidak tercapai, karena pada kenyataannya MDC tersebut tidak jalan. Ini karena tidak adanya alokasi anggaran untuk para anggota MDC tersebut.

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Program *block grant* MEDP di kedua Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Lamongan

4.2.1. Faktor Pendukung

Menurut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, faktor yang turut mendukung berjalannya program MEDP adalah dengan adanya keterlibatan komite, masyarakat, apratur daerah, dan para staf kontraktual di Lamongan hal ini terlihat dari ungkapan Kepala Madrasah sebagai berikut:

“Keterlibatan komite, masyarakat, guru2, perangkat2 desa (pejabat daerah) yang turut mendukung. Koordinasi dengan DCU melalui fasilitator. Dapat

dengan email dan telephon, sehingga lebih cepat informasi yang ada.” (SN, Juni 2012).

Demikian juga menurut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, bahwa tanpa kerjasama dari semua pihak, program tidak akan dapat berjalan lancar, seperti ungkapan sebagai berikut:

“Karena kerja sama yg baik dari DCU, komite, elemen masyakat, guru, Kepala desa, serta tenaga muda yg masih berpotensi.”(AHM, Juni 2012)

Dan hal ini di konfirmasi oleh guru MI Islamiyah dengan ungkapan berikut:

“Alhamdulillah semua kegiatan MEDP berjalan, karena adanya keterbukaan sekolah, semua guru dan orang tua siswa mengetahui. Kepala sekolah yang profesional dan terbuka.”(UT, Juni 2012)

Menurut Koordinator DCU Lamongan, faktor pendukung program ini terletak pada kepedulian yayasan dimana madrasah bernaung. Hal ini seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Kuncinya juga ada di Yayasan, kami lihat yayasan 2 yg peduli bu ...insya Allah bagus sekali...kami lihat ada yayasan yg bukan tidak peduli...tapi cara berfikirnya tidak fokus...mereka tidak fokus untuk mensukseskan program itu..sehingga kadang2 berjalan tidak nya program itu hanya sepenuhnya kepada kepala madrasah....padahal.. kepala madrasah tidak ikut disituhanya sebagai manajer....pelaksananya mestinya yayasan, dan komite madrasah...jadi insyaAllah peran keberhasilan itu berada pada yayasan disamping kepala madrasah. Biasaya madrasah yg peduli insyaallah swadaya masyarakatnya juga tinggi.”(MR, Juni 2012)

Berbeda dengan pendapat MONEV Specialist yang berada di DCU, menurut beliau, faktor pendukung yang sangat berperan penting adalah kebijakan-kebijakan Pusat, dan Kebijakan Propinsi serta kebijakan Kabupaten harus di samakan persepsinya, dan hal ini di perkuat oleh pihak Stakeholder agar terdapat keberlanjutan program. Hal ini seperti terungkap sebagai berikut:

“Faktor Pendukung yang sangat ...apa namanya...sangat berperan penting yakni kebijakan2 CPMU Pusat, dan kebijakan Propinsi serta kebijakan DCU itu harus dipegang, itu yang utama dan ini harus sama dan juga harus diperkuat oleh stakeholder supaya keberlanjutan program ini tidak hanya sebatas selesai project itu sendiri, ketika tidak terjadi kewenangan stakeholder maka seolah2 program ini hanya milik madrasah.” (AK, Juni 2012)

4.2.2. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat yang sangat signifikan berpengaruh terhadap implementasi program block grant MEDP adalah pendistribusian dana ke madrasah yang sering terlambat penyalurannya, serta pedoman/juknis yang selalu berubah, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pada beberapa informan seperti yang di ungkapkan oleh Staf Admin dan Procurement di DCU sebagai berikut:

“Dana nyampe ke madrasah terlambat sehingga pelaksanaannya telat. Pedoman atau juknis yang selalu berubah menghambat proses pelaporan madrasah karena bingung bagaimana seharusnya pelaporannya.” (SM, Juni 2012)

Setelah di recheck dengan staf MONEV di DCU, di ungkapkan sebagai berikut:

“Pedoman yang berubah-ubah membuat bingung para pelaksana di lapangan, sehingga menghambat dalam pelaporannya.” (AK, Juni 2012)

Demikian juga setelah di konfirmasi dengan Kementerian Agama Pusat, melalui Project Technical Committee yang pernah menjabat sebagai Ketua Proyek CPMU berikut ungkapannya:

“Sisi realiasi anggaran sering kali kecepatan kita berfikir tentang program itu tidak diimbangi dengan cairnya dana, sehingga kurang sinkron, kemudian hal lain, kita harus bersabar dengan kondisi SDM kita yang belum begitu bagus, karena untuk memahami program harus lama untuk memahaminya.” (RM, Juni 2012)

“Kemudian dari sisi lender, yg bikin saya marah dulu, karena lender itu memikirkan semakin lambat semakin bagus, yg membuat mereka harus memakai dana kita untuk membayar konsultan mereka, adanya perspektif peminjam dan yg di pinjamkan, dari bergabai hasil review mission, yg bisa menghadang proses lebih lanjut.” (RM, Juni 2012).

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah pun mengkonfirmasi sebagai berikut:

“Dana turun ke madrasah terlalu lama yaitu sekitar bulan Oktober-november sedangkan waktu pelaksanaan harus selesai Desember, jadi agak kesulitan dalam pelaksanaannya yang serba mepet itu. Sehingga hasil pelaksanaan kurang maksimal.” (AHM, Juni 2012)

Hasil Wawancara yang telah di kumpulkan dan datanya telah di gabungkan dan di reduksi serta di interpretasikan dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini.

Table 4.3.

Ringkasan Temuan Lapangan di MI Darul Ulum dan MI Islamiyah

Informasi	MI Darul Ulum	MI Islamiyah
INPUT - Dana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah total dana : Rp. 449.629.000 - Juknis awalnya di fahami, karena berubah-ubah dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah total dana: Rp. 536.971.500 - Juknis dibagikan waktu sosialisasi, dapat difahami,
	<ul style="list-style-type: none"> membingungkan, tapi cukup membantu - Bantuan untuk menunjang sarana fisik (bangunan) dan non fisik (peningkatan kualitas) - Sosialisasi block grant ke masyarakat dan komite sekolah pada awal program 	<ul style="list-style-type: none"> jika ada kesulitan tanya ke fasilitator, tapi juga mbingungkan karena juknis tidak sesuai dengan keadaan di lapangan - Dana block grant untuk meningkatkan kualitas madrasah secara fisik dan non fisik - Sosialisasi block grant untuk orang tua siswa dan masyarakat diawal program
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran dana ke madrasah. Dari pusat dana masuk ke BRI madrasah, dana di cairkan setelah mendapat rekomendasi dari Koordinator DCU bersama dengan Kepala sekolah dan Ketua Komite 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana di transfer dari pusat ke rekening Madrasah, untuk pencairan, madrasah mengajukan proposal yg di ttd oleh Kepala Madrasah dan Komite sekolah, lalu setelah disetujui oleh Koordinator DCU, dana di cairkan dari rekening

(lanjutan)

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalokasian dananya sudah Sesuai dengan revisi MDP - Dana lain tidak boleh dapat, kecuali dana BOS - 	<ul style="list-style-type: none"> madrasah - Pengalokasian dana: sesuai dengan rencana revisi MDP - Dana lain tidak dapat, hanya dana BOS
- SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas guru lebih baik dari yang tidak mendapat program MEDP, karena mendapat pelatihan2 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM meningkat, dgn membaca buku-buku dari MEDP - Guru2 yang mengikuti pelatihan membagikan pengetahuannya kepada guru-guru di dalam konsorsium guru
- Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana dan sarana, sudah bagus. banyak perbedaan, awalnya kurang ruang kelas, tapi sekarang sudah bertambah 3 ruangkelas baru - Fasilitas pembelajaran lebih baik (LCD, buku perpustakaan) siswa senang belajar dan rajin ke perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan sudah memenuhi standar nasional, tapi masih kurang kelas karena kelas II sudah lebih dari 40 orang per kelas. - Dulu buku pelajaran dipakai bergantian, kini sudah bisa satu orang satu buku. - Menggunakan LCD untuk pembelajaran di kelas
PROSES - Profesionalisme guru meningkat di proyek madrasah sesuai dengan standar nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi S1, Sertifikasi, Pelatihan-pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi S1, Sertifikasi, pelatihan-pelatihan dan study banging
- Peningkatan ketersediaan sumber daya belajar-mengajar dan fasilitas di proyek madrasah untuk memenuhi atau melebihi standar-standar nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Akreditasi masih B, tahun 2007, akan diakreditasi Juli 2012 - Fasilitas pembelajaran meningkat jauh di banding SD negeri - buku2 pelajaran dan buku bacaan sudah sesuai standar nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Akreditasi A – 2007, akan di akreditasi lagi 12 Juli 2012 - Bangunan sudah memenuhi standar nasional, sesuai ketentuan yang sudah di tetapkan - buku pelajaran sudah sesuai standar nasional .
- Efisiensi internal dari proyek madrasah meningkat untuk memenuhi standar-standar nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Remedial dana MEDP, dana bos tidak dipakai untuk remedial tapi untuk operasional sekolah - Transisi, dari medp tidak ada, dari bos juga tidak ada - Drop out tidak ada. - Mengulang juga tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Remedial untuk siswa yang tidak mencapai KKM, - Pengulangan : tidak ada - Transisi : sudah berjalan 3 tahun yg lalu, waktu diawal saja - Drop out : tidak ada - Pengulangan : tidak ada

(lanjutan)

<ul style="list-style-type: none"> - Tata pemerintahan, management, dan ketahanan penguatan proyek madrasah untuk memenuhi standar nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola manajemen madrasah, meningkat ada MDP dan setelah MEDP tidak ada, ada RKM, (Rencana Kerja Madrasah) - Alokasi dana untuk pengembangan madrasah : 10% dari anggaran, - Komite madrasah 18 orang. Lknya 10, perempuan 8 orang. Pertemuan rutin 3 bulan sekali, tapi bisa juga sewaktu2 kala diperlukan - Dari propinsi tidak ada pelatihan, kalau dari kabupaten ada pelatihan2 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Kelapa sekolah, sudah profesional, pengelolaannya sudah bagus - Sekolah mengalokasikan dana untuk peningkatan mutu madrasah 30% dari anggaran - Komite 7 orang : 5 lk-lk 2 perempuan, pertemuan 1 bulan 1 x - Dari propinsi tidak ada pelatihan, kalau dari kabupaten ada pelatihan2
<p>Faktor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan komite, masyarakat, guru2, perangkat2 desa (pejabat daerah) dan pihak kabupaten 	<p>Karena kerja sama yg baik dari DCU, komite, elemen masyarakat, guru, Kepala desa, serta tenaga muda yg masih berpotensi</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Penghambat 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena lokasi di lembah gunung kapur, Jika pembangunan di lakukan musim hujan, material tertahan di atas gunung, maka menghambat pelaksanaannya. Jika musim/kemarau : susah mendapat air. - KKG dilakukan sering kurang peserta, karena jaraknya 40 km dari kecamatan, peserta KKG - Juknis yang berubah-ubah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana turun ke madrasah terlalu lama (Oktober-November) pelaksanaan harus selesai Desember, sulit dalam pelaksanaannya karena waktu yang sempit Sehingga hasil pelaksanaan kurang maksimal. - Juknis yang beubah-ubah

Sumber: Telah diolah kembali

BAB 5

ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dideskripsikan tentang analisa hasil penelitian terhadap pelaksanaan program bantuan *block grant* di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Kerangka analisa yang di gunakan mengacu kepada indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Nota Administrasi Proyek (PAM).

Program ini merupakan langkah konkrit pemerintah Indonesia dalam rangka mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan memiliki wujud yang majemuk yang salah satunya adalah keterbatasan dan kekurangan akses terhadap pendidikan (Konferensi Dunia Untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen 1995 dalam Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2002). Pada awalnya madrasah berdiri atas dana swadaya masyarakat, sehingga mutu ataupun kualitas pendidikan yang dihasilkan sangat terbatas. Kehadiran Madrasah sangat membantu upaya pemerintah dalam menjangkau dan mempertahankan angka partisipasi pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan di daerah yang sulit dijangkau. Namun, karena sebagian besar masyarakat pendukung Madrasah adalah keluarga berpenghasilan rendah, Madrasah tidak mampu untuk meningkatkan fasilitas belajar yang baik atau untuk membeli bahan pelajaran/ buku atau untuk menarik guru yang berkualitas. Sekitar 40% - 60% dari guru Madrasah yang baik tidak memenuhi kualifikasi akademik S1, dan tidak memiliki kesesuaian antara pelajaran yang mereka ajarkan dan subyek dari kualifikasi mereka. Seringkali, personil Yayasan Madrasah serta Kepala Madrasah kurang memiliki visi kepemimpinan dan keterampilan dalam manajemen Madrasah yang efektif.

Program ini berbentuk bantuan *block grant* yang diberikan langsung kepada Madrasah dengan jumlah dana yang diberikan berdasarkan perencanaan pengembangan madrasah (MDP) yang dibuat oleh Madrasah sesuai dengan kebutuhan masing-masing madrasah di awal program. Bantuan *block grant* ini digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah agar masyarakat yang kurang mampu bisa/dapat mengakses/mengenyam pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Karena diharapkan bantuan block grant ini akan meningkatkan bukan hanya sarana dan prasarana pendidikan

madrasah, tapi juga meningkatkan profesionalisme guru, agar dengan meningkatnya kemampuan guru untuk memberikan pelajaran, maka akan meningkat pula kemampuan siswa, sehingga pada masa yang akan datang, siswa dengan kemampuannya yang lebih kompeten akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya, dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program bantuan *block grant* ini merupakan upaya pemerintah dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Midgley (Bab 2, h. 34).

Analisa hasil penelitian terhadap pelaksanaan program bantuan block grant di dua madrasah ibtidaiyah kabupaten lamongan dideskripsikan sebagai berikut:

5.1. Pelaksanaan Program *Block Grant* MEDP di MI Islamiyah, Kedungmegarih, Kembangbahu, dan MI Darul Ulum, Wudi. Sambeng, Lamongan, Jawa Timur

5.1.1. Aspek *input* (masukan)

Pada indikator kinerja program penelitian ini aspek *input* terdiri dari komponen dana, sumberdaya manusia (SDM), sarana dan prasarana (Tabel 3.1., h. 64). Setiap komponen terdapat target yang harus dipenuhi untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program. Analisa tentang *input* program bantuan *block grant* MEDP akan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan

5.1.1.1. Dana

Dana yang dimaksud adalah sejumlah uang dalam bentuk Block grant yang di terima Madrasah untuk peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan di madrasah yang bersangkutan sesuai dengan rencana pengembangan madrasah (MDP) yang dibuat sebelum dana di distribusikan. Jumlah dana yang diterima masing-masing madrasah telah sesuai dengan yang di rencanakan dan di setujui oleh Kementerian Agama RI. Dalam penggunaan dana tersebut tidak lepas dari mekanisme penyaluran, pengelolaan, pengalokasian dan pelaporan dana agar tidak

menyimpang dari yang sudah ditentukan. Untuk memberikan panduan terhadap pengelolaan dana block grant MEDP bagi madrasah, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI menerbitkan buku petunjuk teknis pengelolaan block grant bagi madrasah. Dengan buku petunjuk teknis tersebut, diharapkan seluruh pengelola program, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan madrasah dapat memahami dan melaksanakan pedoman tersebut dengan sebaik-baiknya.

Cakupan dan isi petunjuk teknis pengelolaan *block grant* bagi madrasah ini mencakup 8 Bab, yaitu Bab 1. Pendahuluan, Bab II. Penetapan Madrasah Penerima Block grant, Bab III. Tugas dan Fungsi Institusi di lingkungan Dep. Agama dalam program *block grant*. Bab IV. Penyaluran, Pencairan dan Mekanisme *Block grant*, Bab V. Penggunaan dan Pembukuan *Block grant* Madrasah, Bab VI. Pelaporan *Block grant*, Bab VII Spesifikasi *Block grant*, dan Bab VIII Penutup. Fokus perhatian dan pemahaman pengelolaan program *block grant* ini lebih menekankan kepada panduan penggunaan dan pembukuan *block grant* madrasah serta pelaporan dan spesifikasi *block grant*. Dengan memahami keempat bab dalam panduan teknis ini akan sangat membantu pada kelancaran pelaksanaan program. Namun dari hasil penelitian di lapangan pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah pada awal tahun program, para pelaksana program di kedua madrasah ibtidaiyah belum memahami panduan/petunjuk teknis tersebut, karena telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap panduan /juknis tersebut. Perubahan-perubahan terhadap panduan/juknis ini disebabkan adanya usaha pihak pusat untuk memberikan panduan yang detail terhadap pengelolaan dana, namun karena pihak konsultan yang membantu di tingkat pusat dalam membuat pedoman/panduan tersebut tidak memahami kondisi dilapangan, maka panduan cenderung tidak sinkron dengan keadaan di lapangan. Sehingga terjadi ketidakfahaman terhadap panduan/juknis yang telah dibuat.

Karena kerja keras dan kemauan yang kuat dari madrasah untuk mensukseskan program ini dan juga atas kerjasama pemerintah daerah dalam hal ini Koordinator DCU dan para staff kontraktual di DCU dan PCU, serta dukungan kantor propinsi dan kantor pusat, pada akhirnya panduan/juknis pengelolaan Block grant dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai harapan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator kinerja program yang telah ditetapkan (Tabel 3.1., h. 64-65) telah terpenuhi pada indikator kinerja program yaitu indikator pemahaman terhadap juknis yang telah di berikan, walaupun mengalami berbagai kendala pada awalnya, namun pada hakekatnya panduan/juknis tersebut sangat berguna dan pada akhirnya dapat dipahami.

5.1.1.2.Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai dengan indikator kinerja bahwa target dari SDM adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, yaitu Kepala Madrasah, guru-guru, dan bendahara yang telah berkualifikasi S1 ataupun telah tersertifikasi.

Dari hasil penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah terhadap SDM madrasah, ternyata 98% guru di madrasah ibtidaiyah tersebut sudah berkualifikasi S1. Namun dengan titel S1 bidang pendidikan (S.Pd) ataupun S1 bidang Agama (S.Ag.) tidak serta merta membuat mereka mampu untuk melaksanakan pengelolaan terhadap dana bantuan *block grant*, karena program bantuan dana *block grant* ini tidaklah seperti bantuan dana lainnya, yang biasanya setelah dana diberikan, tidak ada pertanggung-jawabannya, sedangkan untuk dana bantuan *block grant* ini diharuskan untuk membuat laporan realisasi maupun laporan keuangan dan pembukuan terhadap aktifitas maupun pengeluaran dari dana *block grant*. Diharapkan dengan adanya pelaporan tersebut, transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana dapat terealisasi. Seperti yang diharapkan dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah (Bab 2, h. 48 butir 12) and melaksanakan komitmen madrasah sebagai penerima *block grant* untuk mengembangkan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel (Bab 3, h. 72 butir 6). Walaupun pada awal program, SDM pelaksana ditingkat madrasah kurang memahami panduan yang telah diberikan, namun setelah beberapa bulan berjalan dan telah beberapa kali diberi pelatihan, akhirnya juknis tersebut dapat dipahami. Dapat terlihat bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualifikasi dan kompeten sangat menentukan efektifitas pelaksanaan program. Ketidakhahaman SDM dalam pelaksanaan pengelolaan dana *block grant*, khususnya perihal pelaporan keuangan dan pelaporan realisasi terhadap pelaksanaan dilapangan, dapat mengakibatkan keterlambat pelaporannya kepada

para *Stakeholders* yaitu, Kementerian Keuangan RI, BAPPENAS, ADB dan Kementerian Agama sendiri sebagai pengelola dana di pusat.

Dengan demikian, indikator kinerja program tentang kualifikasi S1 pada komponen SDM telah terpenuhi.

5.1.1.3. Sarana dan Prasarana

Mengacu kepada indikator kinerja program, bahwa peningkatan sarana dan prasarana harus sesuai dengan standar nasional yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah .

Dari hasil penelusuran dokumentasi terhadap hasil laporan verifikasi tim civil work engineer yang telah melakukan verifikasi terhadap semua bangunan yang didanai oleh dana *block grant* di semua madrasah sasaran MEDP. Hasil verifikasi terhadap bangunan di kabupaten Lamongan, khususnya Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di kabupaten Lamongan, terhadap sarana dan prasarana yang didapat dari dana *block grant*, ternyata semua sudah memenuhi atau sesuai dengan standar nasional. Dan hal tersebut juga telah di konfirmasi oleh berbagai pihak.

Dengan demikian, indikator kinerja program untuk komponen sarana dan prasarana telah terpenuhi.

5.1.2. Aspek Proses

Untuk menganalisa aspek proses, peneliti akan mengacu pada indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Aspek proses ini mencakup komponen peningkatan Profesionalisme guru sesuai dengan standar nasional, Peningkatan sumber daya belajar mengajar dan fasilitas di madrasah sasaran MEDP memenuhi atau melebihi standar nasional, Efisiensi internal madrasah meningkat, dan tata kelola manajemen madrasah memenuhi standar nasional.

5.1.2.1. Peningkatan Profesionalisme guru sesuai dengan standar nasional

Seorang guru dapat disebut profesional, jika telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 mengenai Standar Pendidik dan Kependidikan

Dari pengamatan terhadap data guru dan hasil wawancara di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah terhadap Profesionalisme guru di madrasah, ternyata hanya 11,11% guru di madrasah ibtidaiyah Islamiyah yang sudah tersertifikasi. Hal ini terjadi karena sulitnya untuk bisa mendapatkan quota untuk di sertifikasi. Dan juga karena syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 mengenai Standar Pendidik dan Kependidikan, belum terpenuhi oleh guru-guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Dengan demikian, indikator kinerja program pada komponen profesionalisme guru belum terpenuhi.

5.1.2.2. Peningkatan ketersediaan sumber daya belajar mengajar dan fasilitas di madrasah sasaran MEDP memenuhi atau melebihi standar nasional,

Dari hasil penelusuran terhadap dokumentasi dan observasi di lapangan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah terhadap ketersediaan sumber daya belajar mengajar dan fasilitas di madrasah, ternyata 100% fasilitas yang dibiayai dana block grant MEDP sudah sesuai dengan standar nasional. Misalnya untuk Ruangkelas, sudah tersedia 6 kelas di MI Darul Salam dan sudah 9 Kelas di MI Islamiyah. Dan ketersediaan sumber belajar buku teks pun sudah terpenuhi (Tabel 4.2, h. 115). Dengan demikian, indikator kinerja program pada komponen peningkatan sumber daya belajar mengajar dan fasilitas di madrasah terpenuhi

5.1.2.3. Efisiensi internal madrasah meningkat,

Program remedial tidak diartikan sekedar program mengulang materi pelajaran bagi siswa yang “kurang” mampu saja, tetapi dikembangkan menjadi lebih luas yakni usaha penganggulan para siswa yang mengalami keistimewaan (baik istimewa karena sangat lemahnya kemampuan akademik mereka, maupun istimewa karena banyaknya kelebihan).

Dari hasil penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah terhadap efisiensi internal madrasah, yaitu program Remedial, kedua Madrasah Ibtidaiyah tersebut melaksanakan program remedial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang nilai KKMnya belum cukup. Biasanya setelah 1 x remedial, nilai tersebut terpenuhi, namun apabila ternyata setelah remedi dilakukan, dan siswa tetap tidak mencapai nilai KKM, maka akan diadakan remedi yang kedua kali.

Dengan demikian, MI Darul Ulum dan MI Islamiyah telah melaksanakan indikator kinerja efisiensi internal madrasah pada program remedial telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian, di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum tidak ada program Transisi, karena memang tidak mengalokasikan dana untuk Program transisi di MDP yang telah disepakati. Sedangkan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, pernah melakukannya 1 x untuk 22 orang siswa. Dengan demikian, indikator kinerja program pada komponen Efisiensi internal madrasah dengan target Transisi tidak sepenuhnya terpenuhi 100% karena kendala waktu pelaksanaan transisi yang hanya bisa dilakukan pada awal tahun ajaran baru dan memang madrasah ibtidaiyah tidak melaksanakan transisi karena merasa sulit untuk memantaunya karena lintas lembaga.

Angka *drop out* dan pengulangan tidak ada, maksudnya tidak ada siswa yang *drop out* maupun mengulang. Sehingga target angka *drop out* dan siswa mengulang tercapai yaitu 0%.

5.1.2.4. Tata kelola manajemen madrasah memenuhi standar nasional.

Dari hasil penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah terhadap Tata kelola manajemen madrasah, ternyata di kedua Madrasah Ibtidaiyah, Kepala madrasah telah menjalankan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Indikator kinerja peningkatan tata kelola manajemen madrasah dapat terlihat dari proses belajar mengajar yang efektif sehingga menghasilkan nilai akademik siswa yang cukup baik yaitu nilai rata-rata UN

siswa kelas VI tahun ajaran 2010/2011 sebesar 8 untuk MI Darul Ulum dan MI Islamiyah rata-rata 9.

Adanya peningkatan dan optimalisasi sumber daya yaitu dengan terstrukturnya bagan organisasi untuk program MEDP, seperti terlihat pada bagan 3.3. Struktur organisasi MEDP di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kedungmegarih dan Bagan 3.4. Struktur organisasi MEDP di Madrasah Darul Ulum Wudi. Walaupun terdapat perbedaan jumlah personil antara MI Islamiyah dan MI Darul Ulum, namun pada hakekatnya keduanya menjalankan manajemen berbasis Madrasah.

Selain itu juga, meningkatnya kepedulian warga madrasah dan masyarakat terhadap mutu madrasah yaitu dengan adanya kerjasama yang baik antar warga madrasah dengan masyarakat sekitar dengan terbukti adanya komite madrasah yang beranggotakan unsur masyarakat. Meningkatnya profesionalisme guru dan prestasi siswa di madrasah yang di pimpin oleh kepala madrasah yang kompeten dan menerapkan reformasi kurikulum. Serta adanya usaha kepala madrasah dalam meningkatkan peran kelembagaan dan kinerja KKG dan MGMP di madrasahny.

Dengan demikian, indikator kinerja program pada komponen Tata kelola manajemen madrasah terpenuhi. Secara keseluruhan, hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 5.1. di bawah ini.

Tabel 5.1.
Perbandingan hasil penelitian di MI Darul Ulum dan MI Islamiyah

Komponen	Target/Indikator Kinerja	Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum	Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah
<i>INPUT</i> Dana	Jumlah	Tercapai Sesuai revisi MDP Rp. 449.629.000,-	Tercapai Sesuai revisi MDP Rp. 536.971.5000,-
	Juknis yang dapat di fahami	Tercapai	Tercapai
	Mekanisme penyaluran dana	Sesuai dengan panduan	Sesuai dengan panduan
	Pengambilan dana	Sesuai dengan panduan	Sesuai dengan panduan
	Alokasi dana	Sesuai dengan MDP madrasah	Sesuai dengan MDP madrasah

(lanjutan)

SDM berkualifikasi S1	Kepala Madrasah	Tercapai	Tercapai
	Bendahara,	Tercapai	Tercapai
	Guru-guru	Ada 2 (dua) guru masih dalam pendidikan S1	Ada 2 (dua) guru masih dalam pendidikan S1
Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional	Ruang Kelas Baru	Tercapai	Tercapai
	Rehab. Ruang kelas	Tercapai	Tercapai
	Laboratorium IPA	Tidak Tercapai karena tidak ada rencana alokasi	Tercapai
	Perpustakaan,	Tercapai	Tercapai
	Media Pembelajaran (Buku Teks, Buku referensi, LCD, dll)	Tercapai	Tercapai
PROSES Profesionalisme guru meningkat di proyek madrasah sesuai dengan standar nasional	Semua Guru madrasah berkualifikasi S1 pada akhir tahun 2012	Akan tecapai karena 2 guru sedang dalam pendidikan S1	Akan tecapai karena 2 guru sedang dalam pendidikan S1
	Paling sedikit 25% dari guru di madrasah mencapai sertifikasi profesional	Tidak Tercapai karena belum ada yang tersertifikasi	Hanya tercapai 11.11% karena ada 2 guru tersertifikasi
Peningkatan ketersediaan sumber daya belajar- mengajar dan fasilitas di madrasah sesuai atau melebihi standar-standar nasional	madrasah memiliki materi belajar- mengajar dalam subjek umum yang memenuhi standar nasional	Tercapai	Tercapai
Efisiensi internal dari proyek madrasah meningkat untuk memenuhi standar-standar nasional	Akreditasi meningkat pada akhir tahun 2012	Belum tercapai karena akreditasi bulan Juli 2012	Belum tercapai karena akreditasi bulan Juli 2012
	Pendaftaran MT meningkat sebesar	Tercapai pada tahun 2010/2011	Tercapai pada tahun 2010/2011
	Tingkat transisi dari MI ke pendidikan lanjutan pertama (MT atau SMP)	Tercapai	Tercapai
	Angka pengulangan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Islamiyah "0"	Tercapai	Tercapai
	Angka putus sekolah (dropout) di MI Darul Ulum dan MI Islamiyah menjadi "0"	Tercapai	Tercapai

(Lanjutan)

	Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Islamiyah mencapai rasio dari pelajar tahun 1 ke pelajar tahun akhir adalah paling sedikit 85%	Tercapai	Tercapai
Tata pemerintahan management, dan ketahanan penguatan proyek madrasah untuk memenuhi standar nasional	Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah memiliki MDP berbasis hasil	Tercapai	Tercapai
	Kepala sekolah mendapatkan kualifikasi S1 pada akhir tahun 2012	Tercapai	Tercapai
	Kepala sekolah di madrasah mencapai sertifikasi profesional	Tidak Tercapai	Tercapai
	madrasah memperlihatkan penghasilan/pengeluaran tahunan pada papan pengumuman sekolah	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
	Madrasah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas 20%	Tercapai Anggaran hanya 10%	Tercapai Anggaran 30%
	madrasah memiliki komite madrasah yang berfungsi, 30% anggota perempuan, bertemu sekali sebulan	Tercapai, tetapi untuk anggota perempuan hanya sebatas penyedia konsumsi	Tercapai, tetapi untuk anggota perempuan hanya sebatas penyedia konsumsi
	Paling sedikit tiga spesialis jaminan mutu bersertifikat di masing-masing MDC	Tidak Tercapai Karena MDC tidak berfungsi	Tidak Tercapai Karena MDC tidak berfungsi
	kabupaten meningkatkan pembiayaan untuk madrasah	Tidak Tercapai Karena tidak ada anggarannya	Tidak Tercapai Karena tidak ada anggarannya

Sumber: Telah diolah kembali

5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

5.2.1. Faktor Pendukung

Seperti telah di jabarkan pada gambaran umum program pada bab 3 bahwa tujuan umum program *block grant* MEDP adalah untuk mendorong madrasah untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan berkualitas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kesetaraan dengan sekolah lain di tingkat nasional, regional dan internasional. Dengan harapan dapat mempercepat tumbuhnya masyarakat belajar yang kondusif, sehingga proses transisi ke dunia kerja, peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan per kapita dapat terwujud. Dan tujuan khusus program dalam meningkatkan pendidikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, dengan indikator-indikator keberhasilan program yang di tuangkan dalam aspek input dan proses dapat tercapai sehingga dapat di prediksi bahwa program effective dalam pelaksanaannya.

Input adalah sumber-sumber yang di investasikan dalam sebuah program. Aspek Input program bantuan *block grant* MEDP tidak lepas dari komponen dana (yang termasuk didalamnya juknis), sumber daya manusia dan sarana dan prasarana telah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ketersediaan Juknis yang baik, sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keinginan tinggi dan komitmen yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang tersedia, merupakan faktor pendukung dalam menunjang efektifitas pelaksanaan program.

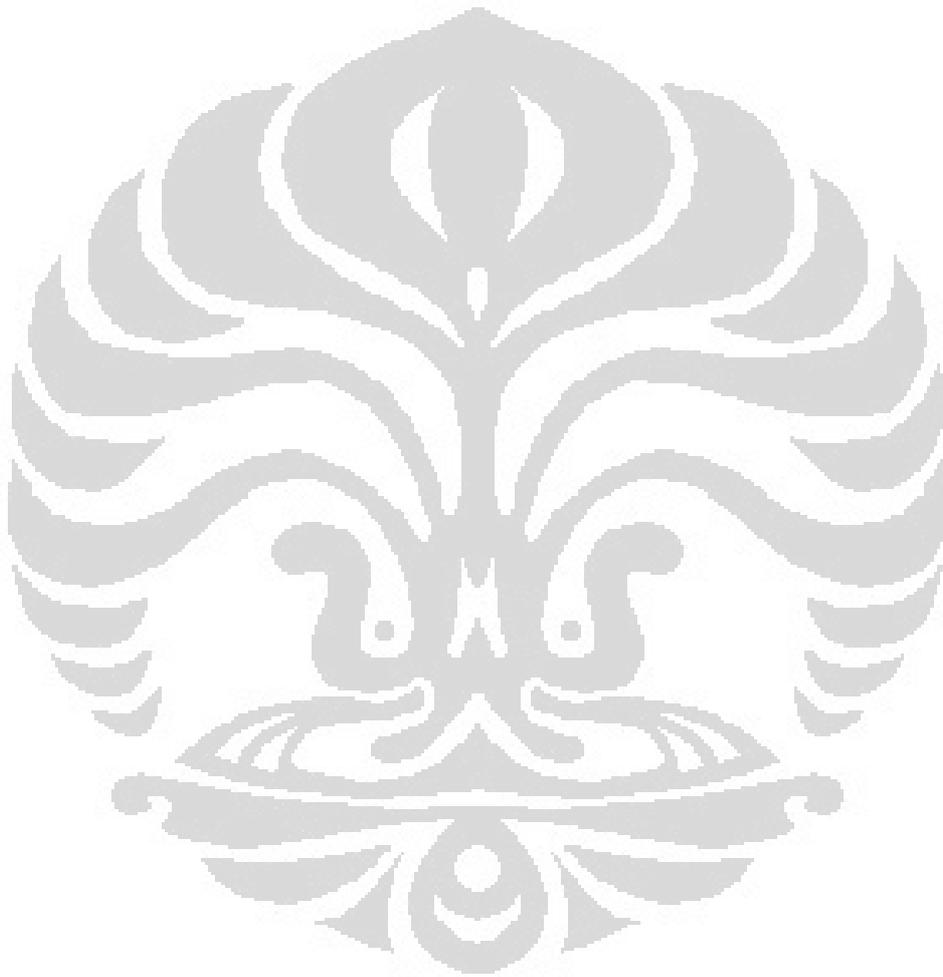
Tidak lepas dari itu, partisipasi masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta dukungan dari *stakeholder*, juga merupakan faktor pendukung keberhasilan program.

5.2.2. Faktor Penghambat

Keterbatasan dana operasional di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten turut menjadi faktor penghambat terlaksananya program bantuan *block grant* MEDP ini, salah satunya adalah dalam memberikan pendampingan ke pada madrasah, karena tidak tersedianya dana operasional untuk pendampingan terhadap madrasah dari tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten, maka madrasah harus berusaha memahami tugas-tugas ataupun kewajiban yang di bebankan untuk mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana *block grant* secara

mandiri. Sehingga pemahaman terhadap juknis, tidak langsung tetapi dapat dijalankan, sehingga efektifitas program masih di rasakan kurang.

Juknis yang berubah-ubah pun dirasakan sebagai penghambat efektifitas program, Serta kurangnya komunikasi juga merupakan faktor penghambat efektifitas program.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan tesis yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan *Block Grant Madrasah Education Development Project* (MEDP), studi kasus di dua Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan yang meliputi pelaksanaan program, faktor pendukung serta penghambat program. Selain kesimpulan juga dikemukakan saran dan rekomendasi yang disusun berdasarkan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang diketahui dari data sekunder dan data primer terhadap aspek *input* dan proses yang telah di analisis peneliti, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

Aspek *Input* yang terdiri dari komponen dana, sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana memiliki indikator kinerja masing-masing. Komponen dana dengan indikator keberhasilan terhadap ketersediaan juknis yang dapat difahami serta mencakup mekanisme penyaluran dana, pengelolaan dana dan pelaporan dana serta pedoman lain yang di perlukan untuk keberhasilan program telah terpenuhi walau pada awal program juknis membingungkan, namun pada akhirnya juknis dapat di fahami dan di laksanakan. Demikian juga Komponen sumberdaya manusia (SDM) indikator kinerjanya telah terpenuhi, walaupun diperlukan waktu untuk SDM dalam memahami apa yang diharapkan oleh program. Komponen sarana dan prasarana indikator kinerja program untuk komponen sarana dan prasarana telah terpenuhi, karena telah sesuai dengan standar nasional yang di tetapkan,

Dengan demikian aspek Input pada kedua madrasah ibtidaiyah yang menjadi sasaran penelitian, secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan tujuan program.

Aspek Proses yang mencakup pelaksanaan komponen peningkatan Profesionalisme guru sesuai dengan standar nasional, komponen Peningkatan

sumber daya belajar mengajar dan fasilitas di madrasah sasaran MEDP memenuhi atau melebihi standar nasional, komponen Efisiensi internal madrasah meningkat, dan komponen tata kelola manajemen madrasah memenuhi standar nasional memiliki indikator kinerja masing-masing.

Pada komponen peningkatan Profesionalisme guru untuk Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah mengalami peningkatan ini terlihat dengan adanya 2 guru yang telah tersertifikasi dan hampir semua guru telah berkualifikasi S1. Sedangkan pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, komponen Profesionalisme guru belum tercapai, ini dilihat dari belum adanya guru-guru di MI Darul Ulum ini yang tersertifikasi, walaupun guru-guru di MI Darul Ulum hampir semuanya berkualifikasi S1. Karena berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 mengenai standar Pendidik dan Kependidikan, bahwa seorang guru dapat disebut profesional jika telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut. Maka dari hasil penelitian disimpulkan bahwa indikator kinerja program pada komponen profesionalisme guru belum terpenuhi sepenuhnya terutama pada indikator guru mencapai sertifikasi profesional.

Komponen peningkatan ketersediaan sumber daya belajar mengajar dan fasilitas di madrasah sasaran MEDP telah terpenuhi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan ruang kelas baru, perpustakaan beserta buku-bukunya, dan ketersediaan akan Media pembelajaran lainnya. Dengan demikian komponen peningkatan ketersediaan sumber daya belajar mengajar dan fasilitas di madrasah terpenuhi.

Komponen efisiensi internal madrasah meningkat, Indikator kinerja pada komponen ini adalah meningkatnya pendaftaran MI, adanya program transisi, menurunnya angka pengulangan dan siswa drop out (putus sekolah), Untuk kedua Madrasah Ibtidaiyah, berdasarkan data sekunder, terlihat bahwa angka pengulangan dan siswa putus sekolah (*drop out*) adalah 0. Untuk angka pendaftaran siswa meningkat 2 orang pada tahun 2010/2011 di MI Islamiyah. Dan untuk Transisi, MI Darul Ulum tidak melakukan transisi, sedangkan MI Islamiyah pernah 1 kali mengadakan transisi, yaitu pada awal program. Dengan demikian komponen efisiensi internal tidak terpenuhi.

Demikian juga dengan komponen Tata kelola manajemen madrasah memenuhi standar nasional, untuk Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, indikator kinerja seperti memiliki MDP berbasis hasil, Kepala Madrasah berkualifikasi S1 serta tersertifikasi, adanya anggaran madrasah untuk peningkatan kualitas, memiliki komite madrasah yang berfungsi, telah terpenuhi. Demikian juga dengan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Kepala Madrasah sudah bekualifikasi S1, namun belum tersertifikasi, Namun untuk indikator paling sedikit tiga spesialis jaminan mutu bersertifikasi di masing-masing MDC tidak berjalan. Namun pada hakekatnya Tata kelola manajemen madrasah telah terpenuhi dengan adanya reformasi pengelolaan manajemen madrasah oleh kepala madrasah.

Dengan demikian Aspek Proses/pelaksanaan di pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum masih belum 100% terpenuhi karena pada komponen Profesionalisme guru dan komponen internal efisiensi tidak tercapai sesuai dengan tujuan program, sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, semua komponen proses telah dijalankan sesuai dengan tujuan program.

6.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Input adalah sumber-sumber yang di investasikan dalam sebuah program. Aspek Input program bantuan *block grant* MEDP terdiri dari dana (yang termasuk didalamnya juknis), sumber daya manusia dan sarana dan prasarana telah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Aspek *input* yang efektif merupakan dasar kekuatan dan faktor pendukung dalam menunjang efektifitas pelaksanaan program. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta dukungan dari *stakeholder*, juga merupakan faktor pendukung keberhasilan program.

Keterbatasan dana operasional di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten menjadi salah satu faktor penghambat terlaksanaan program. Dan juknis yang berubah-ubah pun merupakan penghambat efektifitas program, Serta kurangnya komunikasi juga merupakan faktor penghambat efektifitas program.

6.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran utama untuk para akademisi dan untuk pemerintah, madrasah dan pihak lainnya sebagai berikut:

6.3.1. Untuk para akademisi:

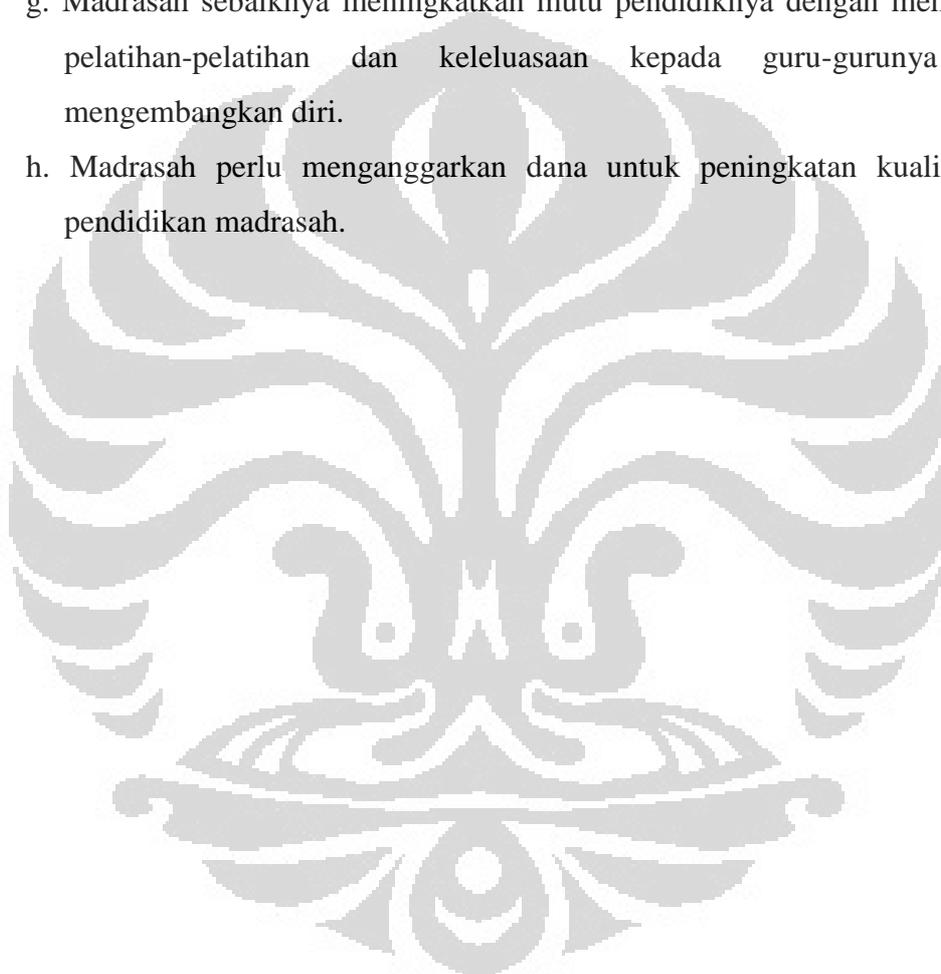
- a. Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan melakukan perluasan daerah kajian yang tidak terbatas pada dua madrasah ibtidaiyah saja, tetapi terhadap madrasah lainnya termasuk madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah, karena sifat penelitian kualitatif hasil penelitiannya tidak dapat digeneralisasi untuk semua daerah.
- b. Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan suatu penelitian yang mengarah kepada evaluasi hasil terhadap program *block grant*. Diharapkan dengan tindak lanjut penelitian itu dapat diketahui sejauhmana tujuan program dapat tercapai dan seberapa besar tingkat kepuasan penerima program.

6.3.2. Untuk pemerintah, madrasah dan pihak lainnya:

- a. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam program *block grant* MEDP, misalnya perbaikan pendistribusian dana agar tepat waktu, pembuat Pedoman/Juknis pengelolaan program yang tidak berubah-ubah dan perlu dibuat oleh pakar/ahli dalam bidangnya serta memiliki pengalaman di lapangan agar lebih sistematis, simple dan mudah difahami dan realisasikan para pelaksana program
- b. Untuk program selanjutnya, Pemerintah diharapkan memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan program.
- c. Harus ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Propinsi) Madrasah dan Masyarakat dan pihak lainnya dalam bidang pendidikan agar dapat menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas.
- d. Perlu adanya monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap program/kegiatan yang digulirkan oleh pemerintah agar dapat diketahui rintangan/hambatan

yang timbul dan dicari penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap program agar sesuai dengan tujuan program.

- e. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap instrumen evaluasi yang lembaga lakukan untuk impact study terhadap program block grant ini dan untuk program selanjutnya bila ada.
- f. Madrasah sebaiknya mengadakan program Transisi, karena program ini dapat membantu siswa kurang mampu untuk melanjutkan sekolah.
- g. Madrasah sebaiknya meningkatkan mutu pendidikannya dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan keleluasaan kepada guru-gurunya untuk mengembangkan diri.
- h. Madrasah perlu menganggarkan dana untuk peningkatan kualitas/mutu pendidikan madrasah.



Daftar Pustaka

I. Buku-Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Adi, Islandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. (Edisi Revisi). Jakarta: LP-FEUI.
- Adimihardja, Kusnaka., & Hikmat, Harry. (2001). *Participatory Research Appraisal, Dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Alston, dan Bowles. (1998). *Research For Social Worker*. Australia: Allen dan Unwin.
- Arikunto, Suharaimi. (1993). *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (1999). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (ed. Rev. IV), Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Australia Indonesia Partnership. (2008). *Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-13*, Canberra: Australia Agency for International Development (AusAID)
- Bafadal, Ibrahim. (2008). *Manajemen perlengkapan sekolah: teori dan aplikasinya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Briggs, L.J. (1977). *Instructional Design: Principles and Applications*, Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
- Chambers, Robert. (1988). *Sustainable rural livelihoods: a key strategy for people, environment and development*, In *The greening of AIDS*, edited by C. Conroy & M. Lituinoff. London: Earthscan.
- Chambers, Robert. (1987). *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Chambers, Robert. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm*, Brighton, UK: Intitute of Development Studies.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. (Edisi dua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Dale, Reidar. (2004). *Evaluating development programmes and projects*, (2nd ed.). New Delhi: Sage Publication.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Yogyakarta: Gajahmada University press.
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Gosling, L. (1995). *Toolkits: A Practical Guide to Assessment, Monitoring, Review and Evaluation*. London: Save the Children.
- Hikmat, Harry. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Herman, J.L., Morris, L.L., dan Fitz-Gibon, C.T. (1987). *Evaluators Handbook*. The Regents of the University Of California, USA: Sage Publication.
- Hadad, Ismid. (1980). *Persoalan dan Perkembangan Pemikiran dalam Teori Pembangunan*. Jakarta: Prisma.
- Hawe, P., dan Degeling, D., dan Hall. J. (1990). *Evaluating Health Promoting: A Health Workers Guide*. Sydney, Australia: Mac Lennan % Petty Pty Limited.
- Hill, Michael (1996). *Social Policy: Comparative Analysis*. London: Prentice-Hall.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Model dan Strategi Pembangunan*. Bandung: Humaniora..
- Ife, Jim. (1995) *Community Development: Creating Community Alternatives - Version, Analysis and Practic.*, N.J.: Prentice-Hall,
- Isaac, Stephen., and Michael, William B. (1981). *Handbook in Research and Evaluation For Educational and the behavioral Science*, (2nd ed.) San Diego, EDITS
- Jalal, F., dan Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Jamasy, Owin. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.

- Joint Commission on Standards for Educational Evaluation. (1981). *Standards for Evaluation of Educational Programs, Projects, and Materials*. United State of America, Library of Congress Catalogig in Publication Data
- Kotler, Peter R. T. (1981). *Marketing Management*, N.J.: Prentice – Hall,
- Mark, M., Henry, G., and Julnes, G. (2000). *Evaluation: An Integrated Framework for Understanding Guiding and Improving Policies and Programs*. San Francisco: JosseyBass.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mikkelsen, Britha. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Midgley, James. (1995) *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication Inc.
- Midgley, James. (2005) *Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Departemen Agama RI
- Mulyasa, E. (2004). *Implementasi Kurikulum 2004: Panduan Pembelajaran KBK*, (Cet.3). Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Nitimiharjo, C., dan Iskandar, J. (1993). *Dinamika Kelompok*, Bandung: Kopma STKS.
- Patton, Michael Quinn. (1990). *Qualitative Research dan Evaluation Methods*. London: Sage Publications.
- Patton, Michael Quinn. (1991). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*, Beverly Hills: Sage Publications.
- Patton, Michael Quinn. (1997). *Utilization Focused Evaluation*. London: Sage Publications.
- Patton, Michael Quinn. (2002). *Qualitative Research dan Evaluation Methods*. (3rd Ed.). London:Sage Publications.

- Pfiffner, John M., and Presthus, Robert V. (1960). *Public Administration*, New York: The Ronald Press Company.
- Pietrzak, Jeanne et al. (1990). *Practical Program Evaluation. Examples From Child Abuse Prevention*. United States of America: Sage Publications, Inc.
- Pietrzak, Mark, Hendy dan Julnes. (2000). *Practical Program Evaluation. Examples From Child Abuse Prevention*. United States of America. Sage Publications, Inc.
- Rivai, dkk. (2009). *Education Management Analisis Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Royse, David Daniel dan Thyer Bruce A.(1996) *Program evaluation: An introduction*. (3rd ed.).United State of America, Sage Publication
- Rubin dan Babbie. (2008). *Research Methods for Social Work*. (6th ed). USA: Thomson Brooks/Cole,
- Sangadji, E.M., dan Sopiah (2010). *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Schultz, T.W. (1971). *Investment in Human Capital*. New York: The Free Press
- Sedarmayanti. (2003). *Good Government (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Cv. Mandar Maju.
- Smith, Adam. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan dan T Cadell
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi/ (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, Edi. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. (Cet.4). Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia.
- Supranta, J. (1997). *Metode Riset*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryadi, A., dan Tilaar, H.A.R. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tjiptoherijanto, P., dan Remi, S.S. (2002). *Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia: suatu analisis awa*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Tjiptono, Fandy. (1995). *Manajemen Jasa*. (Ed.1 Cet. II). Yogyakarta: Andi Offcet.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1995). *Politik. Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strateg*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1996). *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umaedi. (1994). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta. Kemendiknas.
- Wingjosoebroto, Sritomo. (1995). *Ergonomi Studi Gerak dan Waktu*. Surabaya: Guna Widya.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. (Ed.I). Jakarta: Rajawali Pers.

2. Laporan Penelitian dan Dokumen

- Anonim, (2006). *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. WIPRESS
- Anonim, (2006). *Rencana Startegis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Asian Development Bank. (2006). *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan and Technical Assistance Grant to Republic of Indonesia: Madrasah Education Development Project 2007-2012*.
- Asian Development Bank. (2007). *Project Administration Memorandum*. Loan No. 2994-INO(SF).
- Bank Dunia. (2003). *Policy Brief: Supporting Small and Medium-Sized Enterprises*. International Association for Evaluation of Education Achievement.
- Bappenas. (2009). *Pencapaian Sebuah Perubahan, Evaluasi Pelaksanaan 4 Tahun RPJMN 2004-2009*
- BPS. (1984). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta.

- Dehar et al (1993). *Formative and process evaluation of health promotion and disease prevention programs. Evaluation Review*, 17, 204-220.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas, Jakarta
- Hikmat, Harry. (2004). *Panduan Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial*. Makalah tidak dipublikasikan. Jakarta.
- Hikmat, Harry. (2004). *Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Sosial*. Jakarta. Makalah Lokakarya Nasional Monev Penanggulangan Kemiskinan – Bappenas.
- Hutahayan, Riana M. (2003). *Analisis efektifitas Bantuan Hibah UNDP bagi Indonesia, Studi kasus Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat*, Lembaga Penelitian SMERU. (2006). *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Lansung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota*.
- Lembaga Penelitian SMERU. (2006). *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Lansung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Propinsi DKI Jakarta*.
- Modul Pelatihan. (2010). *Manajemen Berbasis Kinerja Madrasah*, Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan Bab VI pasal 28 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.
- Petunjuk Teknis. (2010). *Pengelolaan Block Grant bagi Madrasah*. Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Project Administration Memorandum*. (2007). INO: Madrasah Education Development Project. Asian Development Bank.
- Riyanti, Ervina. (2008). *Evaluasi Pelaksanaan Program P2DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Duren Sait Jakarta Timur Tahun 2007*, FKM UI, Depok

- Sinring, Bahar. (2009). *Pemanfaatan dana BOS di SD/MI di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur*. Makassar,
- Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-2013*. (2008). Canberra: Australian Agency for International Development (AusAID).
- Solihat, Kadar. (2007). Tesis: *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Madrasah Tsanawiyah (Mts) Muhammadiyah Beji, Depok*, FISIP UI
- World Bank. (2004). *Modul Evaluasi Pembangunan*. Depok: Program Magister Konsentrasi Pembangunan Sosial PPs-Fisip-UI.

Artikel jurnal di website

<http://nasional.kontan.co.id/news/bps-mengklaim-angka-kemiskinan-periode-maret-2011-turun-32--1>

<http://badruznucultural.wordpress.com/2010/01/21/dana-alokasi-khusus-pendidikan-berlimpah/>

<http://www.lamongan.go.id> Gambaran Umum Daerah, KPDE, Juni 2008 di unduh tanggal Januari 2012, jam 9.00 am

<http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-manajemen-berbasis-sekolahmadrasah-ed-21-2009/> di unduh 29 Maret 2012 jam 1.16 am

www.adb.org/documents/books/2011/ado2111-ino.pdf Perkiraan Perkembangan Ekonomi Asia, di unduh tanggal 3 Januari 2012 jam 10.30 am

www.adb.org/Publications/Depositories/ino.asp Perpustakaan yang Menyimpan Publikasi ADB, di unduh tanggal 31 Januari 2012 jam 11.15 am

<http://www.authorstream.com/Presentation/cibiru46-1415799-kemiskinan-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 24 April 2012 jam 1.10 am

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/> di unduh tanggal 20 Juni 2012 jam 2.06 am

<http://wawan-satu.blogspot.com/2010/11/pengertian-pendidikan.html> diunduh tanggal 31 Jnauari 2012 jam 11.00 am

Lampiran 1.1. Penelitian Tentang Pemanfaatan Dana BOS

Penelitian pemanfaatan dana BOS ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis (Bahar Sinring) terhadap tidak adanya pedoman yang jelas tentang penggunaan dana program BOS sehingga pemanfaatan dana ini tidak proporsional dan tidak tepat target sehingga berkontribusi program ini dalam peningkatan prestasi sekolah masih minimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian pemanfaatan dana BOS di jenjang SD/MI di Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, dana BOS bermanfaat untuk meningkatkan prestasi sekolah. Yang masuk dalam prestasi sekolah yang dikaji adalah tingkat enrolmen atau pendaftaran, angka putus sekolah, tingkat kelulusan, dan prestasi akademis peserta didik. Tetapi pola dan penggunaan dana BOS tiap provinsi tidak sama dalam urutan peruntukannya. Kondisi itu karena tidak ada proporsi peruntukan dan penggunaan dana BOS. Akibatnya, dana BOS tidak tepat sasaran penggunaan. Itu diketahui sekolah saat pemeriksaan BPK.

Dari penggunaan dana BOS di tiap provinsi terlihat bahwa pemanfaatan untuk gaji guru atau tenaga administrasi honorer mengambil porsi yang cukup besar sekitar 20-40 persen. Akibatnya, dana BOS yang dapat dinikmati siswa, seperti membeli buku referensi, buku teks, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta untuk bantuan siswa miskin termasuk untuk membantu siswa miskin masih minimal. Disamping itu, banyak sekolah yang langsung menggunakan dana BOS untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, atau meubelair sekolah. Padahal, menurut buku panduan BOS bahwa biaya untuk komponen tersebut bisa dilakukan jika 13 komponen lainnya telah terpenuhi. Salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa program BOS diharapkan bukan hanya berperan dalam mempertahankan angka partisipasi kasar (APK), namun juga harus berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar.

Lampiran 1.2. Penelitian tentang Bantuan Tunai Langsung.

Berdasarkan hasil penelitian : Lembaga Penelitian SMERU, dengan judul penelitian : Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia : Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota, Januari 2006, terdapat temuan penting penelitian, yaitu :

a. Bahwa terbatasnya waktu membuat pelaksanaan BLT terkesan ”dipaksakan” dan turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program.

b. Dalam penargetan, ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima BLT (*leakage*) dan rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (*undercoverage*).

c. Timbul berbagai permasalahan dalam pendistribusian KKB, dalam pencairan dana BLT, serta berbagai permasalahan tentang penargetan dan penyaluran muncul terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan.

d. Secara umum tingkat kepuasan penerima terhadap pelaksanaan BLT adalah paling tinggi dibanding tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan dan kabupaten/kota. Baik penerima maupun aparat/tokoh di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota menilai sosialisasi merupakan aspek yang paling tidak memuaskan. Sedangkan cara pencairan dana dan pembagian KKB merupakan aspek yang paling memuaskan.

Lampiran 1.3. Penelitian tentang Bantuan Tunai Langsung.

Berdasarkan hasil penelitian : Lembaga Penelitian SMERU, dengan judul penelitian : Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia : Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta, Desember 2006, terdapat temuan penting penelitian, yaitu :

a. Dalam pelaksanaan program ini tidak ditemukan adanya acuan atau pedoman umum yang berisi penjelasan menyeluruh tentang program bagi semua pihak yang berkepentingan. Acuan yang tersedia hanya berupa buku petunjuk parsial seperti petunjuk pendataan rumah tangga miskin dan petunjuk pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB) yang persebarannya cenderung terbatas di kalangan internal BPS. Akibatnya, terdapat perbedaan pemahaman antarpihak terkait tentang pelaksanaan program.

b. Di DKI Jakarta, kegiatan sosialisasi program secara formal dan menyeluruh bagi pihak terkait di luar lembaga pelaksana nyaris tidak pernah dilakukan. Sosialisasi formal hanya terbatas tentang rencana kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang dalam praktiknya merupakan pendataan keluarga/rumah tangga miskin. Sosialisasi formal untuk masyarakat luas pun tidak dilakukan.

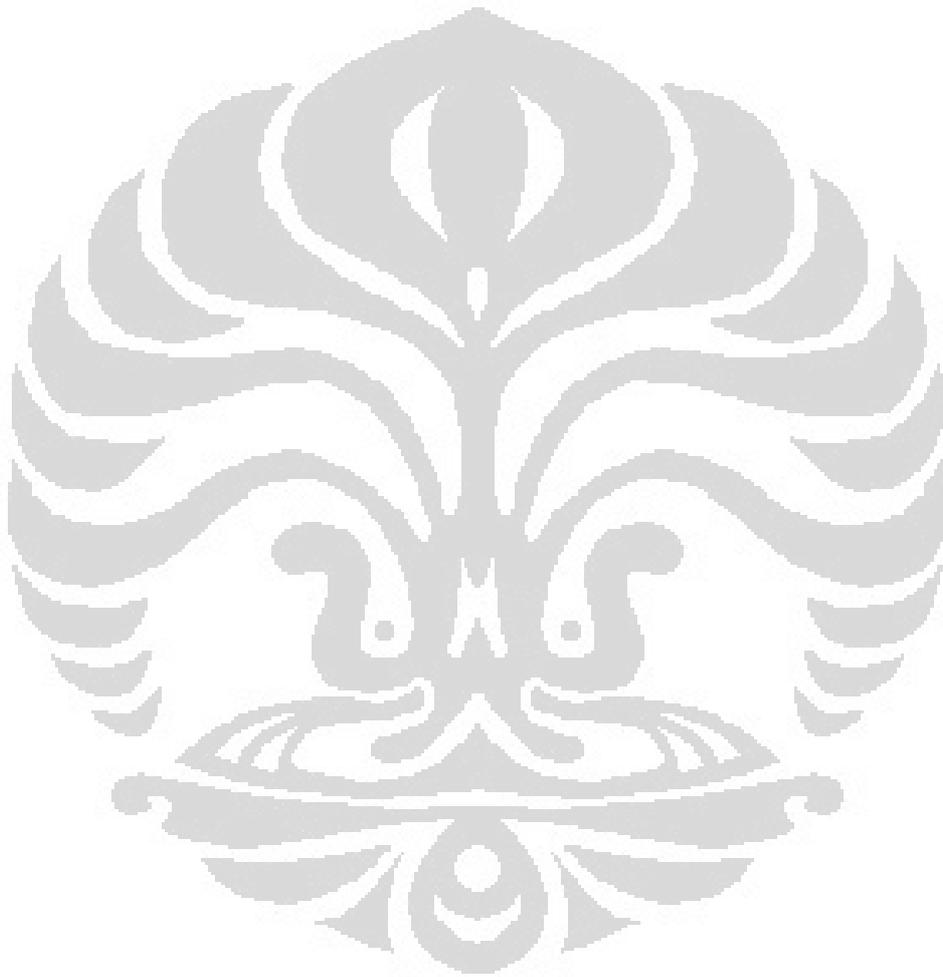
c. Setelah pembagian KKB dan pencairan dana, banyak anggota masyarakat mengajukan keberatan karena tidak memperoleh BLT. Padahal mereka telah didata atau selama ini termasuk keluarga/rumah tangga miskin dalam program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Lampiran 1.4. Penelitian tentang effectivitas Bantuan Hibah

Berdasarkan hasil penelitian: Riana M. Hutahayan: dengan judul penelitian : Analisis Efektifitas Bantuan Hibah UNDP bagi Indonesia : Studi Kasus Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat, 2003, terdapat temuan penting penelitian, yaitu :

- a. Tingkat kinerja pelaksanaan proyek PKM tergolong rendah (kurang lebih 40%) akibat dari keterbatasan tenaga, kapasitas pelaksana yang tidak merata, instrumen yang belum memadai, sistem dan manajemen yang belum stabil untuk menganalisis tingkat kesesuaian program di lapangan.
- b. Sebesar 52,09% pelaksanaan dana hibah untuk program PKM berhasil, 39,58% kurang berhasil dan 8,33% tidak berhasil.
- c. Untuk meningkatkan dampak positif program PKM, sebaiknya dilakukan analisis yang lebih strategis terutama dalam menentukan fokus dan

dominasi kategori usaha yang dibantu, peningkatan kinerja staf baik di pusat, maupun wilayah, peningkatan kapasitas LSM/KSM yang menjadi mitra kerja masyarakat penerima manfaat serta sesegera mungkin melimpahkan tugas-tugas teknis proyek kepada Tim Mitra Kerja Teknis PKM di daerah.



1. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Stakeholder/ Manajer Proyek MEDP / Ketua CPMU MEDP

A. Identitas Informan

1. N a m a : _____
2. J a b a t a n : _____

B. Daftar Pertanyaan

1. Berapa dana block grant yang di berikan kepada madrasah ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Darul Ulum, Sambeng
2. Bagaimana juklak dan juknis program Bantuan Block grant bagi madrasah?
3. SDM bagaimana yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program bantuan Block grant yang baik agar dapat meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas madrasah?
4. Bagaimana sarana dan prasana yang dapat menunjang pembelajaran yang baik?
5. Bagaimana meningkatkan profesionalisme guru di madrasah agar sesuai dengan standar nasional?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran dana block grant ke madrasah?
7. Bagaimana mekanisme pengambilan dana block grant oleh madrasah?
8. Faktor apa saja yang dapat menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program?
9. Bagaimana saran bapak agar untuk kedepannya jika ada program Block grant lainnya dapat berjalan lancar dn sesuai dengan harapan?

2. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Koordinator PCU dan Kontraktual staff di PCU

A. Identitas Informan

1. N a m a :
2. J a b a t a n : Koordinator PCU /kontraktual staff

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana proses pelaksanaan program bantuan block grant di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Darul Ulum, Sambeng?
2. Bagaimana keadaan SDM pelaksana di kedua madrasah ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Darul Ulum, Sambeng?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran dana block grant ke madrasah?
4. Bagaimana mekanisme pengambilan dana block grant oleh madrasah?
5. Bagaimana pengelolaan dana bantuan block grant di kedua madrasah ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Darul Ulum, Sambeng?
6. Bagaimana keadaan SDM pelaksana di tingkat propinsi?
7. Apakah propinsi memberikan program-program khusus untuk peningkatan SDM madrasah.

3. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Koordinator DCU dan Kontraktual Staff di DCU

A. Identitas Informan

1. N a m a : _____
2. J a b a t a n : Koordinator DCU / Kontraktual staff

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana proses pelaksanaan program bantuan block grant di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Darul Ulum, Sambeng?
2. Bagaimana keadaan SDM pelaksan di kedua madrasah ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Darul Ulum, Sambeng?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran dana block grant ke madrasah?
4. Bagaimana mekanisme pengambilan dana block grant oleh madrasah?
5. Bagaimana pengelolaan dana bantuan block grant di kedua madrasah ibtidaiyah Islamiyah, Kembangbahu dan Darul Ulum, Sambeng?
6. Bagaimana keadaan SDM pelaksana di tingkat propinsi?
7. Apakah propinsi memberikan program-program khusus untuk peningkatan SDM madrasah.

4. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Kepala MI Islamiyah, Kembangbahu dan MI Darul Ulum, Sambeng?

A. Identitas Informan

1. N a m a : _____
2. Pendidikan terakhir : _____
3. J a b a t a n : Kepala Madrasah Ibtidaiyah

B. Daftar Pertanyaan

I. Input : Dana, Juklak/Juknis, SDM, Sarana dan Prasarana dan Tata kelola Madrasah

1. Berapa Dana bantuan block grat yang madrasah bapak/ibu terima?
2. Apakah bapak/ibu mendapatkan juklak/juknis tentang program Bantuan Block Grant MEDP?
3. Apakah Ada dana bantuan lain selain block grant MEDP? (dana BOS, sumbangan Masyarakat, atau dana lainnya)
4. Jika Ya, apa sajakah peruntukan dana tersebut?
5. Jika mendapatkan, apakah juklak/juknis tersebut dapat dipahami?
6. Menurut bapak/ibu bagaimana isi juklak/juknis tersebut? Apakah sudah mencakup hal-hal yang diperlukan?
7. Apakah dengan juklak/juknis tersebut bapak/ibu merasa terbantu?
8. Bagaimana kualitas SDM pelaksana program bantuan block grant di madrasah bapak/ibu terutama pada aspek latar belakang pendidikannya, pengalaman kerjanya dan komitmen kerjanya.
9. Apakah bapak/ibu dan atau SDM pelaksana program bantuan block grant di Madrasah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan Tim pelaksana MEDP dari tingkat Pusat atau Propinsi atau Kabupaten?

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana pemahaman SDM pelaksana program bantuan Block grant di madrasah bapak/ibu terhadap program dan juklak/juknis program?
11. Apakah Bapak/ibu ataupun SDM di Madrasah Ibtidaiyah ini pernah mensosialisasikan kembali ke masyarakat (orang tua siswa) tentang program Bantuan block grant ini?
12. Bagaimana bentuk organisasi pelaksana program Bantuan Block grant di madrasah bapak/ibu terutama yang terkait dengan struktur organisasi, pembagian tugas dan pelaksanaan tugas?
13. Bagaimana sarana dan prasarananya, khususnya bangunan, furniture sekolah, dan fasilitas lainnya?

II. Proses:

1. Bagaimana mekanisme peyaluran dana bantuan block grant ke madrasah?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan dana bantuan block grant oleh madrasah?
3. Bagaimana mekanisme pengalokasian dana block grant di madrasah bapak/ibu?
4. Bagaimana respon dari masyarakat dalam hal ini orang tua siswa terhadap bantuan block grant tersebut?
5. Bagaimana respon dari komite madrasah terhadap bantuan block grant tersebut?
6. Bagaimana pelaksanaan administrasi program bantuan block grant?
7. Bagaimana meningkatkan SDM di Madrasah yang bapak/ibu pimpin?
8. Program apa sajakah yang di adakan oleh Madrasah untuk meningkatkan SDM madrasah?

III. Output

1. Apakah terdapat peningkatan akademis untuk siswa kelas 6 MI di madrasah Bapak/ibu?

2. Bagaimana hasil ujian akhir nasional (UAN) di madrasah ini terutama prosentase kelulusannya dan rata-rata nilainya?
3. Apakah ada peningkatan jumlah dalam hal pendaftaran dan penerimaan?
4. Seberapa besar transisi/siswa yang melanjutkan dari MTs ke SLTA?
5. Seberapa banyak jumlah siswa pengulang?
6. Seberapa besar angka drop out?
7. Apa sajakan pemanfaatan dari dana bantuan block grant MEDP?
8. Apakah program bantuan block grant telah meningkatkan status akreditasi madrasah yang bapak/ibu pimpin?
9. Apakah menurut bapak/ibu peningkatan akademis siswa dan peningkatan akreditasi dikarenakan adanya dana bantuan block grant MEDP? Mengapa?
10. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakatnya dan seberapa besar partisipasi yang diberikan masyarakat?
11. Apakah menurut bapak/ibu persepsi masyarakat terhadap kualitas pendidikan lebih positif?
Jelaskan / deskripsikan mengapa demikian?.

IV. Faktor pendukung dan penghambat

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor pendukung program bantuan dana block grant di madrasah bapak/ibu?
2. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor penghambat program bantuan dana block grant di madrasah bapak/ibu?

5. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Bendahara Madrasah

A. Identitas Responden

1. N a m a :
2. J a b a t a n : Bendahara Madrasah Ibtidaiyah

B. Daftar Pertanyaan

I. Input : Dana, Juklak/Juknis, SDM, Sarana dan Prasarana dan Tata kelola Madrasah

1. Berapa Dana bantuan block grat yang madrasah bapak/ibu terima?
2. Apakah ada dana bantuan lain selain block grant MEDP? (dana BOS, sumbangan Masyarakat, atau dana lainnya)
3. Jika Ya, apa sajakah peruntukan dana tersebut?
4. Apakah bapak/ibu mendapatkan juklak/juknis tentang program Bantuan Block Grant MEDP?
5. Jika mendapatkan, apakah juklak/juknis tersebut dapat dipahami?
6. Menurut bapak/ibu bagaimana isi juklak/juknis tersebut? Apakah sudah mencakup hal-hal yang diperlukan?
7. Apakah dengan juklak/juknis tersebut bapak/ibu merasa terbantu?
8. Bagaimana kualitas SDM pelaksana program bantuan block grant di madrasah bapak/ibu terutama pada aspek latar belakang pendidikannya, pengalaman kerjanya dan komitmen kerjanya.
9. Apakah bapak/ibu dan atau SDM pelaksana program bantuan block grant di Madrasah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan Tim pelaksana MEDP dari tingkat Pusat atau Propinsi atau Kabupaten?
10. Menurut bapak/ibu, bagaimana pemahaman SDM pelaksana program bantuan Block grant di madrasah bapak/ibu terhadap program dan juklak/juknis program?

11. Apakah Bapak/ibu ataupun SDM di Madrasah Ibtidaiyah ini pernah mensosialisasikan kembali ke masyarakat (orang tua siswa) tentang program Bantuan block grant ini?
12. Bagaimana bentuk organisasi pelaksana program Bantuan Block grant di madrasah bapak/ibu terutama yang terkait dengan struktur organisasi, pembagian tugas dan pelaksanaan tugas?
13. Bagaimana sarana dan prasarananya, khususnya bangunan, furniture sekolah, dan fasilitas lainnya?

II. Proses:

1. Bagaimana mekanisme peyaluran dana bantuan block grant ke madrasah?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan dana bantuan block grant oleh madrasah?
3. Bagaimana mekanisme pengalokasian dana block grant di madrasah bapak/ibu?
4. Bagaimana respon dari masyarakat dalam hal ini orang tua siswa terhadap bantuan block grant tersebut?
5. Bagaimana respon dari komite madrasah terhadap bantuan block grant tersebut?
6. Bagaimana pelaksanaan administrasi program bantuan block grant?
7. Bagaimana meningkatkan SDM di Madrasah yang bapak/ibu pimpin?
8. Program apa sajakah yang di adakan oleh Madrasah untuk meningkatkan SDM madrasah?

III. Output

12. Apakah terdapat peningkatan akademis untuk siswa kelas 6 MI di madrasah Bapak/ibu?
13. Bagaimana hasil ujian akhir nasional (UAN) di madrasah ini terutama prosentase kelulusannya dan rata-rata nilainya?
14. Apakah ada peningkatan jumlah dalam hal pendaftaran dan penerimaan?

15. Seberapa besar transisi/siswa yang melanjutkan dari MTs ke SLTA?
16. Seberapa banyak jumlah siswa pengulang?
17. Seberapa besar angka drop out?
18. Apa sajakan pemanfaatan dari dana bantuan block grant MEDP?
19. Apakah program bantuan block grant telah meningkatkan status akreditasi madrasah yang bapak/ibu pimpin?
20. Apakah menurut bapak/ibu peningkatan akademis siswa dan peningkatan akreditasi dikarenakan adanya dana bantuan block geant MEDP? Mengapa?
21. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakatnya dan seberapa besar partisipasi yang diberikan masyarakat?
22. Apakah menurut bapak/ibu persepsi masyarakat terhadap kualitas pendidikan lebih positif?
Jelaskan / deskripsikan mengapa demikian?.

IV. Faktor pendukung dan penghambat

5. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor pendukung program bantuan dana block grant di madrasah bapak/ibu?
6. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor penghambat program bantuan dana block grant di madrasah bapak/ibu?

6. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Komite Madrasah Ibtidaiyah

A. Identitas Responden

1. N a m a : _____
2. J a b a t a n : Ketua Komite/majlis madrasah

B. Daftar Pertanyaan

I. Input

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bantuan block grant? Dari mana bapak/ibu mengetahui program bantuan block grant? Apakah bapak/ibu pernah mendapat penjelasan/informasi tentang program block grant dari pengelola Madrasah?
2. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan juklak/juknis tentang program bantuan block grant?
3. Kalau mendapatkan apakah bapak/ibu dapat memahaminya?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana isi juklak/juknis tersebut?
5. Sebagai Ketua Komite, Apakah dengan juklak/juknis tersebut bapak/ibu merasa terbantu?
6. Bagaimana kualitas SDM pelaksana program di madrasah bapak/ibu?
7. Bagaimana sarana dan prasarannya?

II. Proses

1. Apakah bapak/ibu pernah diajak rapat/musyawarah dalam hal penentuan alokasi dana block grant?
2. Jika pernah, Apakah bapak/ibu merasa puas dengan penentuan alokasi bantuan dana block grant tersebut?

III. Output

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di sekolah bapak/ibu?

IV. Faktor pendukung dan penghambat

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat program?

7. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Guru Madrasah Ibtidaiyah

A. Identitas Responden

1. N a m a : _____
2. J a b a t a n : Guru madarasah ibtidaiyah
3. Berapa lama mengajar: _____

B. Daftar Pertanyaan

I. Input

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bantuan block grant? Dari mana bapak/ibu mengetahui program bantuan block grant? Apakah bapak/ibu/ibu pernah mendapat penjelasan/informasi tentang program block grant dari pengelola Madrasah?
2. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan juklak/juknis tentang program bantuan block grant?
3. Kalau mendapatkan apakah bapak/ibu/ibu dapat memahaminya?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana isi juklak/juknis tersebut?
5. Sebagai Ketua Komite, Apakah dengan juklak/juknis tersebut bapak/ibu merasa terbantu?
6. Bagaimana kualitas SDM pelaksana program di madrasah bapak/ibu?
7. Bagaimana sarana dan prasarananya?

II. Proses

1. Apakah bapak/ibu/ibu pernah diajak rapat/musyawarah dalam hal penentuan alokasi dana block grant?
2. Jika pernah, Apakah bapak/ibu/ibu merasa puas dengan penentuan alokasi bantuan dana block grant ersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan/diikutsertakan dalam program peningkatan kualitas SDM di madrasah bapak/ibu?
4. Jika ya, program apa saja?

5. Bagaimana mekanisme pemilihan guru untuk mengikuti program yang diberikan?

III. Output

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di sekolah bapak/ibu?

IV. Faktor pendukung dan penghambat

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat program?



8. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan siswa

A. Identitas Responden

N a m a : Kelas : Umur:

- 1.
- 2.
- 3.

B. Daftar Pertanyaan

I. Input

1. Menurut Adik, bagaimana pelaksanaan proses belajar di madrasah adik?
2. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di madrasah adik waktu adik di kelas 3 atau 4 (tahun 2008) dan sekarang (tahun 2012) ?
3. Bagaimana buku2 pelajaran di sekolah, apakah mencukupi? (satu orang siswa mendapat satu buku)

II. Proses

1. Apakah adik merasa lebih memahami pelajaran dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia di madrasah adik?

III. Output

1. Bagaimana nilai mata pelajaran adik?

9. PEDOMAN WAWANCARA

Dengan orang tua siswa yang masuk dalam komite madrasah

A. Identitas Responden

- N a m a : 1.
2.
3.

B. Daftar Pertanyaan

I. Input

1. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi tentang program bantuan block grant?
2. Jika pernah mendapatkan, apakah bapak/ibu dapat memahaminya?

II. Proses

1. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan penentuan alokasi dana block grant di madrasah anak bapak/ibu?

III. Output

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap pendidikan di madrasah?
2. Adakah manfaat yang dirasakan Bapak/ibu sekarang ini dibandingkan tahun sebelumnya?